



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG  
KLASIFIKASI ARSIP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip yang menyatakan bahwa, Pimpinan pencipta arsip bertanggungjawab menetapkan klasifikasi arsip berdasarkan Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
- b. bahwa untuk menetapkan klasifikasi arsip sebagai landasan hukum dan juga sekaligus sebagai kepastian hukum dalam pengklasifikasian arsip, diperlukan suatu aturan dalam klasifikasi arsip di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI ARSIP LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
7. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

9. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama dalam jangka waktu tertentu.
10. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya di sebut ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas Negara dibidang kearsipan yang berkedudukan di Ibu Kota Negara.

## BAB II KLASIFIKASI ARSIP, KODE KLASIFIKASI, PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Klasifikasi Arsip

#### Pasal 2

Semua PD harus mengklasifikasikan setiap penciptaan Arsip sesuai dengan Klasifikasi Arsip.

#### Pasal 3

- (1) Arsip yang diciptakan di lingkungan Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam Klasifikasi Arsip berdasarkan:
  - a. fungsi dan/atau urusan;
  - b. kegiatan; dan
  - c. transaksi.
- (2) Pengelompokan Arsip berdasarkan Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Kode Klasifikasi

#### Pasal 4

- (1) Arsip memiliki kode klasifikasi.
- (2) Kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kombinasi huruf dan angka (*Alfanumeric*).
- (3) Kode huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menggambarkan urusan.
- (4) Kode angka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk fungsi, kegiatan, dan transaksi pada setiap urusan.

#### Pasal 5

Kode klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

- (1) Setiap Arsip yang tercipta diklasifikasikan dengan menggunakan kode klasifikasi.
- (2) Penggunaan kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. pemberkasan arsip;
  - b. pembuatan daftar arsip aktif, inaktif, dan arsip statis; dan
  - c. pembuatan daftar arsip usul pindah, arsip usul serah, dan arsip usul musnah.

## Bagian Ketiga Pengawasan

### Pasal 7

Bupati melalui PD yang membidangi urusan pemerintahan dibidang kearsipan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan kode pengklasifikasian maupun pengklasifikasian Arsip di Pemerintah Daerah.

### Pasal 8

- (1) PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kearsipan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengklasifikasian Arsip di Pemerintah Daerah serta melaporkan pengklasifikasian arsip di Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dan diserahkan setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III

### PROSES USULAN DAN PERUBAHAN KLASIFIKASI

### Pasal 9

- (1) Klasifikasi Arsip yang telah ditetapkan di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan acuan yang digunakan bagi pencipta Arsip pada semua PD dalam rangka pengelolaan Arsip Dinamis.
- (2) Penyusunan, pengusulan dan perubahan Klasifikasi Arsip di pencipta Arsip pada PD dikoordinir oleh Kepala Unit Kearsipan PD.
- (3) Untuk membantu penyusunan Klasifikasi Arsip, melakukan pengusulan atau perubahan Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PD dapat membentuk tim penyusunan Klasifikasi Arsip di Tingkat PD.

- (4) Susunan tim Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal 5 (lima) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang dengan susunan terdiri ketua tim, sekretaris dan anggota.
- (5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabat sekretaris PD sekaligus merangkap anggota, sekretaris tim dijabat oleh Kasubag Umum Kepegawaian sekaligus merangkap anggota, sedangkan anggota tim adalah tenaga fungsional kearsipan dan/atau petugas pengelola arsip yang ditunjuk kepala PD dalam mengelola arsip baik di bidang dan/atau di sekretariat minimal berjumlah 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang.
- (6) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terisi maka, ketua tim dijabat langsung oleh Kepala PD, sedangkan jabatan sekretaris Tim dijabat oleh Kasubag Umum Kepegawaian atau Kasi Umum atau jabatan lain yang setingkat pada sekretariat yang dinilai mampu, sedangkan anggota tim dapat diisi dari petugas pengelola arsip pada bidang dan atau sekretariat yang dinilai mampu.
- (7) Hasil penyusunan Klasifikasi Arsip oleh tim PD atau oleh arsiparis dan/atau pengelola arsip disampaikan secara tertulis kepada PD yang membidangi urusan pemerintahan dibidang kearsipan ditingkat Daerah.
- (8) Penyusunan Klasifikasi Arsip di unit kearsipan pada PD yang dilakukan tim harus dilakukan dengan melibatkan seluruh bidang atau bagian atau sub bagian/seksi yang dibuktikan dengan berita acara rapat atau notulen rapat.
- (9) Penyusunan Klasifikasi Arsip di unit kearsipan pada PD yang dilakukan oleh arsiparis dan/atau pengelola arsip harus dilakukan dengan melibatkan seluruh bidang atau bagian atau sub bagian/seksi yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala PD bahwa sudah dilakukan pembahasan dengan melibatkan seluruh Bidang atau Bagian atau sub bagian/seksi.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 11 April 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 11 April 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.  
NIP.19710502 200604 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : 12 TAHUN 2023

TENTANG : KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG  
TIMUR

AG	AGAMA
AT	AGRARIA DAN TATA RUANG
BD	KEBUDAYAAN
BL	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DC	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DG	PERDAGANGAN
DK	PENDIDIKAN
DR	PEMADAM KEBAKARAN
EM	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
HB	PERHUBUNGAN
HK	HUKUM
HM	HUBUNGAN MASYARAKAT
IN	PERINDUSTRIAN
KA	KEARSIPAN
KB	KELUARGA BERENCANA
KD	PERLENGKAPAN/PERALATAN/KEKAYAAN DAERAH
KI	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KK	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN
KM	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KP	KEPEGAWAIAN
KS	KESEHATAN
KT	KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
KU	KEUANGAN
LH	LINGKUNGAN HIDUP
MD	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
OK	ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
PA	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PB	PENANGGULANGAN BENCANA
PD	BINA PEMBANGUNAN DAERAH
PE	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PG	PENGADAAN
PI	PERIKANAN
PK	PERPUSTAKAAN
PM	PENANAMAN MODAL
PN	PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
PO	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PP	PENCARIAN PERTOLONGAN
PR	PERUMAHAN RAKYAT
PU	PEKERJAAN UMUM
PW	PENGAWASAN
RP	PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SD	PERSANDIAN
SO	SOSIAL
ST	STATISTIK
SP	POLISI PAMONG PRAJA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
TM	PEMERINTAHAN UMUM
TN	PERTANIAN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
AMBULLAH, S.H.  
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : 12 TAHUN 2023

TENTANG : KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG  
TIMUR

**AG**

**AG.00**

**AGAMA**

**KEBLJAKAN**

**AG.00.00**

Kebijakan Keagamaan meliputi Kebijakan dibidang Bimas Islam, Bimas Kristen. Bimas katolik, Bimas Hindu, Bimas Budha, Kerukunan Umat Beragama, dan Penyelenggaraan Haji dan Umroh

**AG.00.01**

Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan

**AG.00.02**

Penyiapan Kebijakan

**AG.00.03**

Perumusan dan Penyusunan Bahan

**AG.00.04**

Pemberian masukan dan dukungan dalam Penyusunan Kebijakan

**AG.00.05**

Penetapan dalam bentuk norma standar prosedur dan Kriteria

**AG.01**

**BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**

**AG.01.00**

**Wakaf**

**AG.01.00.00**

Permohonan izin tukar menukar tanah wakaf (Ruislah)

**AG.01.00.01**

Permohonan penunjukan lembaga keuangan syariah penerima uang wakaf

**AG.01.00.02**

Bantuan pengembangan wakaf produktif

**AG.01.00.03**

Bantuan sertifikasi tanah wakaf

**AG.01.00.04**

Arsip yang berkaitan dengan pendataan wakaf

**AG.01.00.05**

Akta ikrar wakaf

**AG.01.00.06**

Formulir Wakaf

**AG.01.00.07**

Surat Pengesahan nadzir wakaf

**AG.01.01**

**Zakat**

**AG.01.01.00**

Bimbingan dan Pembinaan lembaga zakat

**AG.01.01.01**

Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat

**AG.01.02**

**Rumah Ibadah**

**AG.01.02.00**

Bantuan pengelolaan Rumah Ibadah

**AG.01.02.01**

Penyuluhan dan bimbingan kemasjidan

**AG.01.02.02**

Sertifikat aset aset Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM)

**AG.01.03**

**Bimbingan dan Penyuluhan**

**AG.01.03.00**

Kegiatan Penyuluhan dan bimbingan penyuluh

**AG.01.03.01**

Penerangan agama islam

**AG.01.03.02**

Bimbingan dan penyuluhan kegiatan agama Islam

**AG.01.04**

**Pembinaan Lembaga Keagamaan**

**AG.01.05**

**Pembinaan aliran/keagamaan**

**AG.01.06**

**Bimbingan dan Pengembangan Kemitraan**

**AG.01.07**

**Peringatan Hari Besar Islam**

**AG.01.08**

**Perkawinan**

**AG.01.08.00**

Dokumen administrasi perkawinan

**AG.01.08.01**

Data penyuluhan pernikahan (BP4)

**AG.01.08.02**

Buku Akta Nikah, talak, cerai dan rujuk

**AG.01.08.03**

Perkawinan antar warna negara

**AG.01.08.04**

Kasus Perkawinan

**AG.01.08.05**

Kegiatan kepenghuluan dan bimbingan penghulu

**AG.01.08.06**

Dispensasi pengadilan agama tentang umur calon pengantin pria dibawah 19 tahun dan calon pengantin wanita berusia dibawah 16 tahun

**AG.01.08.07**

Biaya Pernikahan

**AG.01.09**

**Bantuan Sosial (bansos islam)**

**AG.02**

**BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

**AG.02.00**

**Kasus Rumah Ibadah**

**AG.02.01**

**Pembinaan Lembaga Keagamaan**



<b>AG.02.02</b>	<b>Bantuan Gereja (Alkitab, Baju Toga, Rehab Gedung Gereja, dll)</b>
<b>AG.02.03</b>	<b>Kasus Rohaniawan/Penyalahgunaan Wewenang</b>
<b>AG.02.04</b>	<b>Peringatan Hari Besar Kristen</b>
<b>AG.02.05</b>	<b>Bimbingan dan Peyuluhan Kegiatan Agama Kristen</b>
<b>AG.02.06</b>	<b>Pesparawi</b>
<b>AG.02.07</b>	<b>Pendirian rumah ibadah</b>
<b>AG.02.08</b>	<b>Izin Tinggal Rohaniawan (KITAS/VITAS)</b>
<b>AG.02.09</b>	<b>Laporan Organisasi Gereja</b>
<b>AG.02.10</b>	<b>Hak Milik atas Tanah</b>
<b>AG.02.11</b>	<b>Bantuan Sosial (Bansos) Kristen</b>
<b>AG.03</b>	<b>Bimbingan Masyarakat Katolik</b>
<b>AG.03.00</b>	<b>Kasus Pendirian Gereja</b>
<b>AG.03.01</b>	<b>Bantuan Perizinan</b>
<b>AG.03.02</b>	<b>Bantuan Gereja</b>
<b>AG.03.03</b>	<b>Bantuan Sarana keagamaan</b>
<b>AG.03.04</b>	<b>Bantuan Ormas Katolik</b>
<b>AG.03.05</b>	<b>Bantuan Komisi KWI dan Keuskupan</b>
<b>AG.03.06</b>	<b>Pembinaan Tokoh Agama</b>
<b>AG.03.07</b>	<b>Dialog kerukunan</b>
<b>AG.03.08</b>	<b>Pertemuan Lintas Komisi</b>
<b>AG.03.09</b>	<b>Lokakarya Musik Liturgi Provensi Gerejawi</b>
<b>AG.03.10</b>	<b>Pergelaran Musik Provinsi Gerejawi</b>
<b>AG.03.11</b>	<b>Pengembangan Keagamaan</b>
<b>AG.03.11.00</b>	<b>Statistik Keagamaan</b>
<b>AG.03.11.01</b>	<b>Data lembaga keagamaan Katolik, Ordo, Gereja, Panti Asuhan</b>
<b>AG.03.11.02</b>	<b>Data Pemeluk Agama</b>
<b>AG.03.12</b>	<b>Penyuluhan dan Tenaga Teknis</b>
<b>AG.03.12.00</b>	<b>Data Penyuluh agama</b>
<b>AG.03.12.01</b>	<b>Data Juru Penerang</b>
<b>AG.03.12.02</b>	<b>Juknis dan Materi Penyuluhan</b>
<b>AG.03.12.03</b>	<b>Bantuan Operasioan Juru Penerang</b>
<b>AG.03.12.04</b>	<b>Pedoman pengusulan pembuatan Laporan Penyuluh PNS</b>
<b>AG.03.12.05</b>	<b>Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Juru penerangan Agama Katolik</b>
<b>AG.03.12.06</b>	<b>Pedoman pemberian bantuan di Lingkungan Direktorat Urusan Agama Katolik</b>
<b>AG.03.12.07</b>	<b>Standar Pedoman Bina Iman Remaja (BIR) dan Bina Iman Anak (BIA)</b>
<b>AG.03.12.08</b>	<b>Pedoman Bimbingan Masyarakat Katolik</b>
<b>AG.03.12.09</b>	<b>Pembinaan Pembina BIR dan BIA</b>
<b>AG.03.12.10</b>	<b>Pembinaan Penyuluh Agama/Juru Penerang Katolik</b>
<b>AG.03.13</b>	<b>Pembinaan Umat, Orang Muda katolik, Keluarga Bahagia</b>
<b>AG.03.14</b>	<b>Bantuan Soaial (Bansos) Katolik</b>
<b>AG.04</b>	<b>Bimbingan Masyarakat Hindu</b>
<b>AG.04.00</b>	<b>Penyuluhan</b>
<b>AG.04.01</b>	<b>Pembinaan Lembaga Keagaam</b>
<b>AG.04.01.00</b>	<b>Kasus lembaga keagamaan (rumah ibadah)</b>
<b>AG.04.01.01</b>	<b>PHDI</b>
<b>AG.04.01.02</b>	<b>Banjar/suka dula Hindu Dharma</b>
<b>AG.04.01.03</b>	<b>Pesantian Pesantian</b>
<b>AG.04.01.04</b>	<b>Pengurus Pura</b>
<b>AG.04.01.05</b>	<b>Pangurus WHDI</b>
	<b>Pengurus Paradah</b>
<b>AG.04.01.07</b>	<b>Pasraman</b>

<b>AG.04.02</b>	<b>Bimbingan Ibadah</b>
<b>AG.04.02.01</b>	<b>Persembayangan</b>
<b>AG.04.02.02</b>	<b>Upacara keagamaan</b>
<b>AG.04.02.02.00</b>	<b>Upacara Eka Dasa Rudra</b>
<b>AG.04.02.02.01</b>	<b>Upacara Lainnya</b>
<b>AG.04.02.03</b>	<b>Pembagian Aliran/Keagamaan</b>
<b>AG.04.03</b>	<b>Bimbingan Ibadah Sosial</b>
<b>AG.04.04</b>	<b>Data Pengembangan Keagamaan</b>
<b>AG.04.04.00</b>	<b>Statistik Keagamaan</b>
<b>AG.04.04.01</b>	<b>Pemeluk Agama</b>
<b>AG.04.04.02</b>	<b>Tokoh Agama</b>
<b>AG.04.04.03</b>	<b>Pura/Candi dan Kuil</b>
<b>AG.04.05</b>	<b>Fasilitasi Rohaniawan</b>
<b>AG.04.06</b>	<b>Penyuluhan Perkawinan</b>
<b>AG.04.06.00</b>	<b>Konsultasi Pranikah Agama Hindu</b>
<b>AG.04.06.01</b>	<b>Sudhi Wadani</b>
<b>AG.04.06.02</b>	<b>Penyuluhan Pasca Nikah</b>
<b>AG.04.06.03</b>	<b>Konsultasi Perkawinan</b>
<b>AG.04.07</b>	<b>Bantuan Sosial (Bansos Hindu)</b>
<b>AG.05</b>	<b>BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA</b>
<b>AG.05.00</b>	<b>Kasus Rumah Ibadah/Yayasan</b>
<b>AG.05.01</b>	<b>Kasus Majelis Majelis (keagamaan)</b>
<b>AG.05.02</b>	<b>Laporan Pelaksanaan Kegiatan Swayamvara Tri Pitaka Gatha Tk. Nasional</b>
<b>AG.05.03</b>	<b>Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahaniti Loka Dhamma Tk. Nasional</b>
<b>AG.05.04</b>	<b>Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sippa Dhamma Samaja Tk. Nasional</b>
<b>AG.05.05</b>	<b>Daftar Organisasi Keagamaan</b>
<b>AG.05.06</b>	<b>Daftar Yayasan/Lembaga Keagamaan</b>
<b>AG.05.07</b>	<b>Pendirian Rumah Ibadah</b>
<b>AG.05.08</b>	<b>Pendirian Majelis Keagamaan</b>
<b>AG.05.09</b>	<b>Hak Milik Atas Tanah</b>
<b>AG.05.10</b>	<b>Bantuan Sosial (Bansos Budha)</b>
<b>AG.06</b>	<b>KERUKUNAN UMAT BERAGAMA</b>
<b>AG.06.00</b>	<b>Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama</b>
<b>AG.06.01</b>	<b>Kasus Keagamaan</b>
<b>AG.06.02</b>	<b>Kasus Aliran Keagamaan (Konghucu)</b>
<b>AG.07</b>	<b>HAJI</b>
<b>AG.07.00</b>	<b>Penyiapan Materi Penetapan BPIH</b>
<b>AG.07.01</b>	<b>Dokumen Kelengkapan Calon Haji</b>
<b>AG.07.02</b>	<b>Dokumen Pelayanan operasional penyelenggara Haji</b>
<b>AG.07.03</b>	<b>Pembinaan Jemaah dan Petugas Haji termasuk KHIH &amp; BPH Plus</b>
<b>AG.07.04</b>	<b>Pembatalan dan Pengembalian Biaya Haji</b>
<b>AG.07.05</b>	<b>Informasi Haji dan Siskohat</b>
<b>AG.07.06</b>	<b>Blanko setoran pelunasan BPIH</b>
<b>AG.07.07</b>	<b>Kouta Haji Seluruh Indonesia</b>
<b>AG.07.08</b>	<b>Penyisaan paaspor haji ke kedutaan Arab Saudi</b>
<b>AG.07.09</b>	<b>Dapih yang tidak terpakai</b>
<b>AG.07.10</b>	<b>Data Mutasi Calon Jemaah Haji</b>
<b>AG.07.11</b>	<b>Kliping Operasional Haji</b>
<b>AG.07.12</b>	<b>Usulan Perbaikan bimbingan manasik Haji dari masyarakat/ulama</b>
<b>AG.07.13</b>	<b>Pameran Arsip, penataran, udzakaroh, penataran calon jemaah haji dan sejenisnya</b>
<b>AG.07.14</b>	<b>Penyuluhan Ibadah Haji</b>
<b>AG.07.15</b>	<b>SK petugas PPIH di Arab Saudi</b>

AG.07.16	SK pembantu pemberangkatan pemulangan operasional pusat
AG.07.17	Usulan Petugas Haji dari lembaga Kementerian, Kanwil Kemenag Provinsi ], Perseorangan , dll
AG.07.18	Penentuan besarnya ONH
AG.07.19	Hukuman kepada jamaah haji yang melanggar ketentuan dan peraturan di Arab Saudi
AG.07.20	Pelayanan penyelesaian Barang Tercecer (Barcer) jamaah haji

**AT**

**AT.00**

**AGRARIA DAN TATA RUANG  
KEBIJAKAN**

Rumusan Kebijakan Bidang Tata Ruang, Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan Infrastruktur Keagrariaan, Bidang Pengaturan, Penetapan dan Pendaftaran Hak Tanah, Pembinaan Pejabat Pembuat Akte Tanah, serta pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat, Bidang Penatagunaan Tanah, Penataan, Penguasaan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir, Pulau Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu, Konsolidasi Tanah, dan Landreform, Bidang Pengadaan, Penilaian, Pengaturan dan Penetapan Tanah Instansi, Pembinaan, Pengendalian Pemanfaatan Tanah, Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah serta Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Bidang Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Agraria/Pertanahan, Pemanfaatan Ruang dan Tanah

AT.00.00	Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
AT.00.01	Penyiapan Kebijakan
AT.00.02	Perumusan Kebijakan
AT.00.03	Harmonisasi/pemberian masukan
AT.00.04	Penetapan dalam bentuk NSPK
	<b>TATA RUANG</b>
	Perencanaan dan Kemitraan
AT.01	Perencanaan Umum dan Monitoring Evaluasi Bidang Tata Ruang
	Rencana Program, monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan tata ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional
AT.01.00	
AT.01.01	Rencana Program, monitoring dan evaluasi di bidang pemanfaatan ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional
AT.01.02	Rencana Program, monitoring dan evaluasi bidang penataan dan pengembangan kawasan perkotaan, penataan kawasan pedesaan, penataan kawasan ekonomi dan penataan kawasan baru
AT.01.03	Rencana program, monitoring dan evaluasi bidang pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah wilayah 1, pembinaan wilayah II, pembinaan wilayah III, dan pembinaan wilayah IV
AT.02	Data, Informasi dan Kemitraan
AT.02.00	Data dan informasi di bidang perencanaan tata ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional
AT.02.01	Data dan Informasi di bidang pemanfaatan ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional
AT.02.02	Data dan informasi penataan dan pengembangan kawasan perkotaan, penataan, kawasan pedesaan, penataan kawasan ekonomi dan penataan kawasan baru

AT.02.03	Data dan informasi bidang pemanfaatan dan pengembangan kawasan perkotaan, penataan kawasan pedesaan, penataan kawasan ekonomi dan penataan kawasan baru
AT.02.04	Kemitraan bidang tata ruang dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi non pemerintah
AT.02.05	Pemberdayaan masyarakat di bidang tata ruang
AT.03	Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang
AT.03.00	Perencanaan Tata Ruang
AT.03.01	a. Kebijakan dan strategi nasional di bidang perencanaan tata ruang dan peninjauan kembali Rencana tata ruang wilayah nasional, pulau dan kepulauan, dan kawasan perbatasan negara
AT.03.02	b. Kebijakan dan strategi nasional di bidang perencanaan tata ruang dan peninjauan kembali tata ruang kawasan strategis nasional di wilayah I
AT.04	c. Kebijakan dan strategi nasional di bidang perencanaan tata ruang dan peninjauan kembali tata ruang kawasan strategis nasional di wilayah II
AT.04.00	Pemanfaatan Ruang
AT.04.01	Kebijakan dan strategi nasional di bidang pemanfaatan ruang wilayah nasional, pulau dan kepulauan dan kawasan perbatasan negara
AT.04.02	Rencana Terpadu Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah Pulau/Kepulauan
AT.04.03	Rencana Terpadu Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah Kawasan Strategis Nasional di Wilayah I
AT.04.04	Rencana Terpadu Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah Kawasan Strategis Nasional di Wilayah II
AT.04.05	Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional di Wilayah I
AT.05	Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional di Wilayah II
AT.05.00	Penataan Kawasan
AT.05.01	Roadmap Penataan dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Kawasan Pedesaan, Kawasan Perkotaan dan Kawasan Baru
AT.05.02	Kajian Teknis Penataan dan Pengembangan Kawasan Ekonomi, Kawasan Pedesaan, Kawasan Perkotaan dan Kawasan Baru
AT.05.03	Rencana Induk Kawasan Ekonomi, Kawasan Pedesaan, Kawasan Perkotaan dan Kawasan Baru
AT.05.04	Perancangan dan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Pedesaan, Kawasan Perkotaan dan Kawasan Baru
AT.06	Kesepakatan Lintas Sektor, Lintas Wilayah, dan Lintas Pemangku Kepentingan di Kawasan Ekonomi, Kawasan Pedesaan, Kawasan Perkotaan dan Kawasan Baru
AT.06.00	Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
AT.06.01	Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan ruang Daerah Provinsi dan Kabupaten di Wilayah I, II, III, IV
AT.06.02	Bimbingan Teknis dan Bantuan Teknik Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan ruang daerah serta Standar Pelayanan Minimum Bidang Penataan Ruang di Wilayah I, II, III, IV
AT.06.02	Pelaksanaan Evaluasi dalam rangka Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten beserta Rencana Rinci

<b>AT.06.03</b>	<b>Pengembangan Kapasitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang</b>
<b>AT.07</b>	<b>Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Kota dan Perkotaan di Wilayah I, II, III, IV</b>
<b>AT.07.00</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Bantuan Teknik Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan ruang daerah serta Standar Pelayanan Minimum Bidang Penataan Ruang di Wilayah I, II, III, IV</b>
<b>AT.07.01</b>	<b>Pelaksanaan Evaluasi dalam Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota beserta Rencana Rinci</b>
<b>AT.07.02</b>	<b>Pengembangan Kapasitas Pemerintah Kota dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang</b>
<b>AT.08</b>	<b>INFRASTRUKTUR KEAGRARIAAN SURVEI KEAGARIAAN</b>
<b>AT.08.00</b>	<b>Perencanaan kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan</b>
<b>AT.08.01</b>	<b>Laporan Kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan</b>
<b>AT.09</b>	<b>Pengukuran Keagrariaan</b>
<b>AT.09.00</b>	<b>Pengukuran Permohonan Pengukuran Pertama Kali Pemeliharaan Data Pengukuran Pengembalian Batas Pengukuran Mengetahui Status Pengukuran Inventarisasi Pengukuran</b>
<b>AT.09.01</b>	<b>Pemetaan Infrastruktur Keagrariaan</b>
<b>AT.10</b>	<b>Peta Indikatif Batas Kawasan dan Wilayah Administrasi</b>
<b>AT.10.00</b>	<b>Peta Dasar Pertanahan</b>
<b>AT.10.01</b>	<b>Peta Dasar Teknis</b>
<b>AT.10.02</b>	<b>Peta Tematik</b>
<b>AT.10.03</b>	<b>a. Peta Tematik Penggunaan Tanah d. Peta Tematik Kemampuan Tanah d. Peta Tematik Gambaran Umum Penguasaan Tanah d. Peta Tematik Pemanfaatan Tanah e. Peta Tematik Kepemilikan Tanah (Status Tanah) f. Peta Tematik Sebaran Bidang Tanah g. Peta Tematik Masalah Pertanahan h. Peta Tematik Sosial Ekonomi i. Peta Tematik Lainnya</b>
<b>AT.11</b>	<b>Layanan Informasi/Data a. Titik Dasar Teknik/titik batas kawasan dan wilayah b. Layanan Data Epemeris GPS/CORS Hubungan Hukum Keagrariaan</b>
<b>AT.11.00</b>	<b>Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang Penetapan Panitia Pelaksanaan, Penguasaan Benda-benda Milik Belanda (P3MB) Prk 5 yang belum ditindaklanjuti dengan penerbitan SK</b>
<b>AT.11.01</b>	<b>Data Pendukung Izin Prinsip Pembelian bangunan dan tanah</b>
<b>AT.11.02</b>	<b>Klarifikasi penjelasan terkait dengan objek P3MB.PRK 5 dan bekas milik asing dari China</b>
<b>AT.11.03</b>	<b>Keputusan Menteri Keuangan tentang penyelesaian status kepemilikan aset bekas milik asing atau Cina dan Keputusan yang diterbitkan oleh instansi lain yang terkait</b>
<b>AT.11.04</b>	<b>Hasil evaluasi Pengaturan dan Penetapan Hak Obyek P3MB/Prk 5 dan Aset Bekas Milik Asing Lainnya</b>
<b>AT.11.05</b>	<b>Permohonan penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang belum ditindaklanjuti dengan penerbitan SK (Masih Dalam Proses)</b>

AT.11.06	Permohonan perpanjangan/pembaruan HGU/HGB/HP yang belum ditindaklanjuti dengan penerbitan SK (masih dalam proses)
AT.11.07	Permohonan penetapan Hak Guna Usaha yang belum ditindaklanjuti dengan penerbitan SK (Masih dalam proses)
AT.11.08	Inventarisasi Data Tanah Hak
AT.11.09	Surat Keputusan Pemberian Hak Milik, Pemberian/Perpanjangan/Pembaruan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Pemberian Hak Atas Ruang, Hak Komunal a. Risalah Pengolahan Data b. Surat Keputusan c. Nota Dinas SK
AT.11.10	Penjualan dan Pemberian Hak Atas Tanah Objek P3MB/PRK5 a. Ijin Pembelian/ Ijin Prinsip b. Risalah Pengolahan Data c. SK Penjualan dan Pemberian Hak Atas d. Tanah Obyek P3MB/PRKS (Konsep Peta 7) e. Nota Dinas
AT.11.11	Surat Keputusan Penunjukan Badan Hukum Keagamaan yang dapat memperoleh Hak Milik a. Risalah Pengolahan Data b. Surat Keputusan c. Nota Dinas
AT.11.12	Berkas dukungan administrasi/korespondensi
AT.11.13	Kumpulan tembusan surat/SK dari daerah
AT.12	Pendaftaran Hak Tanah
AT.12.00	Warkah Penerbitan Hak Atas Tanah
AT.12.01	Izin Peralihan Hak
AT.12.02	Izin Pelepasan Hak
AT.12.03	Warkah Pencatatan dan Informasi Pertanahan
AT.12.04	Warkah dan Buku Tanah Hak Tanggungan
AT.12.05	Warkah Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah
AT.13	Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah
AT.13.00	Permohonan Pengangkatan PPAT untuk pertama kali
AT.13.01	Laporan Bulanan Pejabat Pembuat Akta Tanah
AT.13.02	Permohonan Pindah Wilayah Kerja PPAT
AT.13.03	Permohonan Pengangkatan kembali PPAT karena mengikuti jabatan notaris
AT.13.04	Permohonan Pensiun PPAT
AT.13.05	Permohonan cuti PPAT
AT.13.06	Rekomendasi Kanwil/Kantah terkait dengan PPAT
AT.13.07	Berita acara penyerahan protokol PPAT
AT.13.08	Data Base PPAT
AT.14	Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat
AT.14.00	Data Penerima manfaat untuk kegiatan Pasca Legalisasi Aset
AT.14.01	Surat Keputusan Kelompok Kerja untuk kegiatan Legislasi aset lintas sektor
AT.14.02	Laporan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Legalisasi Aset Lintas Sektor
AT.14.03	Laporan Kegiatan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah
AT.15	PENATAAN AGRARIA
AT.15.00	Penatagunaan Tanah
AT.15.01	Buku A, B, C Kabupaten Kota Neraca Penatagunaan Tanah a. Buku Laporan b. Album Peta c. Data Digital

<b>AT.15.02</b>	<b>Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanian</b>
<b>AT.15.03</b>	<b>Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka izin lokasi</b> a. Surat Keputusan Pertimbangan Teknis Pertanahan Ijin Lokasi b. Risalah Ijin Lokasi c. Database Peta Digital d. Database Peta Tekstual
<b>AT.15.04</b>	<b>Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka izin Perubahan Penggunaan Tanah</b> a. Surat Keputusan Pertimbangan Teknis Pertanahan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah b. Risalah Ijin Perubahan Penggunaan Tanah c. Database Peta Digital d. Database Peta Tekstual
<b>AT.15.05</b>	<b>Telaah Analisa Dampak Lingkungan</b>
<b>AT.16</b>	<b>Penataan Penguasaan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu</b>
<b>AT.16.00</b>	<b>Inventarisasi dan Identifikasi Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu</b> a. Laporan Hasil Kegiatan b. Peta P4T WP3WT c. Peta Pertanahan WP3WT d. Peta Digital
<b>AT.16.01</b>	<b>Penataan Kawasan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu</b> a. Laporan Hasil Kegiatan Penataan Kawasan b. Peta Potensi Penataan Kawasan WP3WT d. Peta Digital
<b>AT.16.02</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan</b> a. Laporan Hasil Kegiatan Monitoring Pemanfaatan Kawasan b. Peta Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan c. Peta Digital
<b>AT.17</b>	<b>Pelaksanaan Konsolidasi Tanah</b>
<b>AT.18.00</b>	<b>Permohonan Konsolidasi Tanah dari Masyarakat/Pemda/Kantah</b>
<b>AT.18.01</b>	<b>SK Pembentukan TIM</b>
<b>AT.18.02</b>	<b>Identifikasi Subyek dari Obyek</b> a. Peta Keliling dan Rincikan b. Peta Topografi dan Penggunaan Tanah c. Data Yuridis/ Kepemilikan
<b>AT.18.03</b>	<b>Penyusunan Blok Plan dan Desain</b> a. Peta Blok Plan dan Desain Konsolidasi Tanah
<b>AT.18.04</b>	<b>Musyawarah Kesepakatan</b> a. Peta Desain konsolidasi tanah yang telah disepakati
<b>AT.18.05</b>	<b>Pelepasan Hak Atas Tanah</b> a. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah b. Berita Acara Penerimaan Pelepasan Hak Atas Tanah
<b>AT.18.06</b>	<b>Usulan Penegasan Tanah sebagai Obyek Konsolidasi Tanah</b>
<b>AT.18.07</b>	<b>SK Penegasan Tanah sebagai Obyek Konsolidasi Tanah</b>
<b>AT.18.08</b>	<b>SK Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah</b>
<b>AT.18.09</b>	<b>Peta Bidang tanah hasil staking out berdasarkan desain</b>
<b>AT.18.10</b>	<b>Penetapan/pemberian Hak Atas Tanah</b>
<b>AT.18.11</b>	<b>SK Penetapan Hak Atas Tanah</b>
<b>AT.18.12</b>	<b>Penerbitan Sertifikat dan Buku tanah</b>
<b>AT.19</b>	<b>Laporan Rencana Umum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah</b>
<b>AT.19.00</b>	<b>Permohonan Keterangan Lokasi Konsolidasi Tanah</b>
<b>AT.20</b>	<b>Sosialisasi Konsolidasi Tanah</b>

AT.20.00	Bukti Sosialisasi/Penyuluhan
	a. Daftar hadir
	b. Profil calon lokasi konsolidasi tanah
	Buku dan Peta Potensi Obyek Konsolidasi Tanah
AT.21	Pelaporan Kegiatan Konsolidasi Tanah
AT.21.00	Monitoring Tindak Lanjut KT
AT.21.01	Hasil Akhir Kegiatan KT
AT.22	Landreform
AT.22.00	SK Penegasan Tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagai obyek Landreform
AT.22.01	SK Persetujuan pembayaran ganti rugi tanah kelebihan maksimum, absentee dan partikelir
	a. Berkas usulan pembayaran ganti kerugian dan realisasi pembayaran ganti kerugian
AT.22.02	Daftar Penerimaan Redis Perdesa
AT.22.03	Daftar Tanah-tanah Partikelir dan Eigendom yang luasnya lebih dari 10 bouw yang terkena UU Nomor 1 tahun 1958
AT.22.04	SK Lokasi Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
AT.22.05	Data Spasial dan Tekstual IP4T
	Pengadaan Tanah
AT.23	Pengadaan Tanah
AT.23.00	Permohonan Pengadaan Tanah beserta lampirannya
AT.23.01	Pelimpahan Kewenangan
AT.23.02	Pembentukan Satgas-satgas
AT.23.03	Hasil Pengukuran dan Pemetaan Keliling dan Bidang Tanah
	a. Mulai dari surat tugas sampai data ukur, sketsa lokasi, koordinat, peta bidang, peta keliling, daftar luas tanah
AT.23.04	Hasil Pengumpulan Data Pihak yang berhak dan Obyek Pengadaan Tanah
AT.23.05	Pengukuran dan Pemetaan serta pengumpulan data pihak yang berhak setelah dilakukan verifikasi dan perbaikan
	a. Penetapan Penilai Tanah, Bangunan, Tanaman dll.
AT.23.06	Hasil Penilaian Obyek Pengadaan Tanah
AT.23.07	Hasil Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian
AT.23.08	Pembayaran Ganti Kerugian
AT.23.09	Penitipan Ganti Kerugian
AT.23.10	Pemutusan Ganti Kerugian
AT.23.11	Eksekusi Lokasi Pengadaan Tanah
AT.23.12	Penyerahan Lokasi Pengadaan Tanah
AT.23.13	Laporan Inventarisasi Data Tanah Pemerintah
	a. Administrasi
	b. Survei
AT.24	Penilaian Tanah
AT.24.00	Laporan Nilai Properti Tanah
AT.24.01	Lisensi Penilai Pertanahan
	a. Lisensi Perorangan
	b. Lisensi Perbadan
AT.24.02	Peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan
AT.24.03	Peta Zona Nilai Tanah
	a. Survei berdasarkan persepsi masyarakat
	b. Peta Penyebaran Transaksi jual beli tanah
	c. Hasil Updating Peta Zona Nilai tanah, Indeks Nilai tanah, Pembaruan Peta ZNT
AT.25	Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD



<b>AT.25.00</b>	<b>Permohonan Penetapan Hak Pakai, Hak Milik ( sesuai ketentuan), Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha</b>
<b>AT.25.01</b>	<b>Klarifikasi penjelasan terkait dengan objek Hak Pakai, Hak Milik ( sesuai ketentuan), Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha</b>
<b>AT.25.02</b>	<b>Perjanjian Kerja Sama Hak Pengelolaan</b>
<b>AT.25.03</b>	<b>Persetujuan Memperoleh HGB di atas Hak Pengelolaan</b>
<b>AT.25.04</b>	<b>Surat Keputusan Hak Atas Tanah Pemerintah</b>
<b>AT.25.05</b>	<b>Permohonan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD yang ditolak</b>
<b>AT.26</b>	<b>Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Tanah</b>
	<b>Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah</b>
<b>AT.27</b>	<b>Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>
<b>AT.27.00</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b>
	<b>a. Bahan bimbingan teknis dan supervisi</b>
	<b>b. Bimbingan teknis dan supervisi</b>
	<b>c. Pemanfaatan dan Evaluasi bimbingan teknis dan supervisi</b>
<b>AT.27.01</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b>
	<b>a. Laporan Pemantauan bidang Pengawasan teknis dan khusus</b>
	<b>b. Laporan Evaluasi bidang Pengawasan Teknis dan Khusus</b>
	<b>c. Laporan penyelenggaraan pengawasan teknis dan khusus</b>
<b>AT.28</b>	<b>Penertiban dan Pemanfaatan Ruang</b>
<b>AT.28.00</b>	<b>Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di bidang penataan Ruang</b>
	<b>a. Database PPNS penataan ruang</b>
	<b>b. Laporan Hasil koordinasi nasional, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS</b>
	<b>c. Mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas PPNS penataan ruang</b>
<b>AT.28.01</b>	<b>Penyelidikan tindak pidana penataan ruang</b>
	<b>a. Perencana Penyidikan</b>
	<b>b. Pelaksanaan Penyidikan</b>
	<b>c. Pengendalian dan Pengawasan Penyidikan</b>
	<b>d. Serah Terima Berkas Penyidikan</b>
	<b>e. Pengawasan Persidangan</b>
<b>AT.28.02</b>	<b>Sosialisasi Kebijakan</b>
<b>AT.28.03</b>	<b>Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang</b>
<b>AT.28.04</b>	<b>Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang</b>
<b>AT.28.05</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang</b>
<b>AT.28.06</b>	<b>Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan</b>
	<b>a. Penerimaan Pengaduan Masyarakat</b>
	<b>b. Persiapan</b>
	<b>c. Pengamanan dan Penanganan Tempat Kejadian Perkara</b>
	<b>d. Laporan Pengawasan, pengamanan, penelitian dan pemeriksaan</b>
<b>AT.29</b>	<b>Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar</b>
<b>AT.29.00</b>	<b>Identifikasi dan Verifikasi Potensi Tanah Terlantar</b>
	<b>a. Penyelenggaraan Kegiatan Identifikasi dan Verifikasi Potensi Tanah Terlantar</b>
	<b>b. Mengendalikan Kegiatan identifikasi dan verifikasi potensi tanah terlantar</b>
	<b>c. Evaluasi penyelenggaraan identifikasi dan verifikasi potensi tanah</b>

<b>AT.29.01</b>	<b>Pembangunan Struktur Data Tanah Terlantar</b> <b>a. Pembangunan struktur data penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan data tanah terlantar</b>  <b>b. Mengendalikan pembangunan struktur data tanah terlantar</b>  <b>c. Mengevaluasi penyelenggaraan pembangunan struktur data tanah terlantar</b>  <b>d. Laporan Hasil penyimpanan struktur data tanah terlantar</b>
<b>AT.29.02</b>	<b>Pemutakhiran Data Tanah Terlantar</b> <b>a. Mengelola/mengumpulkan basis data tanah terlantar</b> <b>b. Laporan data tanah terlantar, data berasal dari penertiban tanah terlantar</b>
<b>AT.29.03</b>	<b>Penertiban dan Penetapan Tanah Terlantar</b> <b>a. Penertiban dan Penetapan data terlantar</b>  <b>b. Mengendalikan penertiban dan penetapan tanah terlantar</b>  <b>c. Evaluasi penertiban dan penetapan tanah terlantar</b>  <b>d. Laporan Hasil Penertiban dan Penetapan tanah terlantar</b>
<b>AT.29.04</b> <b>AT.29.05</b>	<b>Surat Keputusan Penetapan Tanah Terlantar</b> <b>Pendayagunaan Tanah Terlantar</b> <b>a. Analisis peruntukan tanah terlantar</b> <b>b. identifikasi ketersediaan dan kapasitas obyek TCUN</b> <b>c. Analisis pemanfaatan tanah terlantar</b> <b>d. Evaluasi Pemanfaatan tanah terlantar</b> <b>e. Laporan Pemanfaatan tanah terlantar</b> <b>f. Analisis obyek tanah negara bekas tanah terlantar</b> <b>g. evaluasi analisis peruntukan tanah terlantar</b> <b>h. Laporan analisis peruntukan tanah terlantar</b>
<b>AT.29.06</b>	<b>Syarat Keputusan penetapan peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara</b>
<b>AT.29.07</b>	<b>Surat Keputusan penetapan badan hukum penerima tanah cadangan umum negara</b>
<b>AT.30</b> <b>AT.30.00</b>	<b>Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah</b>  <b>Penyelesaian Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang</b> <b>Penyelesaian Sengketa Tanah dan Ruang</b> <b>a. Surat Pengaduan</b> <b>b. Resume</b> <b>c. Laporan Hasil Penelitian Data Administrasi, Yuridis, dan Fisik</b> <b>d. SK Tim penyelesaian Sengketa</b> <b>e. Hasil/analisis sengketa tanah dan ruang</b> <b>f. Hasil Pengkajian Sengketa Tanah dan Ruang</b> <b>g. Notulen dan berita acara gelar/paparan kasus</b> <b>h. Notulen dan berita acara pelaksanaan mediasi</b> <b>i. Nota Kesepakatan/ perdamaian</b> <b>j. Surat Keluar</b>
<b>AT.30.01</b>	<b>Penyelesaian Konflik Tanah dan Ruang</b> <b>a. Surat Pengaduan</b> <b>b. Resume</b> <b>c. Laporan Hasil Penelitian Data Administrasi, Yuridis, dan Fisik</b> <b>d. SK Tim penyelesaian Sengketa</b> <b>e. Hasil/analisis sengketa tanah dan ruang</b> <b>f. Hasil Pengkajian Sengketa Tanah dan Ruang</b> <b>g. Notulen dan berita acara gelar/paparan kasus</b> <b>h. Notulen dan berita acara pelaksanaan mediasi</b> <b>i. Nota Kesepakatan/ perdamaian</b> <b>j. Surat Keluar</b>
<b>AT.31</b>	<b>Penanganan Perkara Tanah dan Ruang</b>

	Surat Gugatan
	Release Panggilan Sidang
	Surat Tugas
	Surat Kuasa
	Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-bukti, putusan
	Memori banding/kontra memori banding, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali
AT.32	Penanganan, Pencegahan, dan Pembatalan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang
AT.32.00	Surat Pengaduan
	Resume
	Laporan Hasil Penelitian Data Administrasi, Yuridis dan Fisik
	Hasil Analisis Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang
	Hasil pengkajian sengketa dan konflik tanah dan ruang
	Notulen dan Berita Acara Gelar/Paparan Khusus
	Risalah Pengolahan Data (RPD)/ Laporan Penyelesaian Sengketa dan Konflik tanah dan ruang
	Keputusan Pembatalan Hak/Sertifikat
	Notulen dan Berita Acara Pelaksanaan Mediasi
	Nota Kesepakatan/Perdamaian
	Surat Keluar
AT.33	Pembatalan Hak Atas Tanah
	Risalah Pengolahan Data dokumen Resmi BPN
	Putusan Pengadilan yang Inkracht
	SK Pembatalan penghentian hubungan hukum sebagai tindak lanjut putusan pengadilan
	SK Pembatalan penghentian hubungan hukum karena adanya cacat hukum administrasi
AT.34	Surat Pemberitahuan/pengumuman Pembatalan Pemanfaatan Ruang dan Tanah
AT.34.00	Pengkajian Kasus Pemanfaatan Ruang dan Tanah
AT.34.01	Peta Kasus Pemanfaatan Ruang dan Tanah
AT.34.02	Permohonan Informasi kasus agraria, ruang dan tanah
AT.35	Laporan Kasus Pertanahan
	Laporan perkembangan penanganan kasus pertanahan
	Laporan perkembangan penanganan kasus pertanahan
	Laporan Penyelesaian Penanganan Kasus Pertanahan

## **BD**

	<b>KEBUDAYAAN</b>
BD.00	Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseuman
BD.00.00	Registrasi Nasional
BD.00.00.00	Pendataan dan Penetapan
BD.00.00.01	Pengelolaan Data
BD.00.01	Pelindungan
BD.00.01.00	Perizinan dan Pengamanan
BD.00.01.01	Pemeliharaan dan Pemugaran
BD.00.02	Pengembangan dan Pemanfaatan
BD.00.02.00	Pengembangan
BD.00.02.01	Pemanfaatan
BD.00.03	Eksplorasi dan Dokumentasi
BD.00.03.00	Eksplorasi cagar Budaya
BD.00.03.01	Dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum
BD.01	Pembinaan Kesenian dan Perfilman
BD.01.00	Pembinaan Seni Pertunjukan
BD.01.00.00	Seni pertunjukan tradisional
BD.01.00.01	Seni pertunjukan nontradisional
BD.01.01	Pembinaan Seni Rupa
BD.01.01.00	Seni rupa murni
BD.01.01.01	Seni terapan

BD.01.01.01	Seni terapan
BD.01.02	Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film
BD.01.02.00	Literasi
BD.01.02.01	Apresiasi
BD.01.03	Dokumentasi dan publikasi
BD.01.03.00	Dokumentasi seni dan film
BD.01.03.01	Publikasi seni dan film
BD.02	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME
BD.02.00	Kelembagaan dan kepercayaan
BD.02.00.00	Pemberdayaan lembaga
BD.02.00.01	Hubungan antar lembaga
BD.02.01	Komunitas Kepercayaan
BD.02.01.00	Komunitas adat
BD.02.01.01	Upacara adat
BD.02.02	Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional
BD.02.02.00	Pengetahuan tradisional
BD.02.02.01	Ekspresi budaya tradisional
BD.02.03	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial
BD.02.03.00	Lingkungan budaya
BD.02.03.01	Pranata Sosial
BD.03	Sejarah Dan Nilai Budaya
BD.03.00	Sejarah
BD.03.00.00	Penggalian sumber sejarah
BD.03.00.01	Penulisan sejarah
BD.03.01	Pemetaan nilai
BD.03.01.00	Pemetaan
BD.03.01.01	Klasifikasi
BD.03.02	Verifikasi dan Perumusan Nilai
BD.03.02.00	Verifikasi nilai
BD.03.02.01	Perumusan nilai
BD.04	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
BD.04.00	Internalisasi nilai budaya
BD.04.00.00	Pengemasan nilai budaya
BD.04.00.01	Penanaman nilai budaya
BD.04.01	Kekayaan budaya
BD.04.01.00	Pencatatan kekayaan budaya
BD.04.01.01	Penetapan kekayaan budaya
BD.04.02	Warisan budaya nasional dan dunia
BD.04.02.00	Warisan budaya benda
BD.04.02.01	Warisan budaya tak benda
BD.04.03	Diplomasi budaya
BD.04.03.00	Diplomasi dalam negeri
BD.04.03.01	Diplomasi luar negeri

## BL

BL.00	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>
BL.00.00	Kebijakan
BL.00.01	Pengkajian dan pengusulan kebijakan
BL.00.02	Penyiapan Kebijakan
BL.00.03	Perumusan Kebijakan
BL.00.04	Norma standar Prosedur Kriteria(NSPK)
BL.01	Memorandum of understanding(MoU)
BL.01.00	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
BL.01.01	Ketahanan Ideologi Negara
BL.01.02	Wawasan Kebangsaan
BL.01.03	Bela Negara
BL.01.04	Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan
BL.02	Pembauran dan Kewarganegaraan
BL.02.00	Kewaspadaan Nasional
BL.02.00	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan

BL.02.01	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
BL.02.02	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
BL.02.03	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
BL.02.04	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
BL.03	Ketahanan Seni, Budaya, adat, Agama, dan Kemasyarakatan
BL.03.00	Ketahanan Seni
BL.03.01	Ketahanan Budaya
BL.03.02	Agama dan Kepercayaan
BL.03.03	Organisasi Kemasyarakatan
BL.03.04	Masalah Sosial Kemasyarakatan
BL.04	Politik Dalam Negeri
BL.04.00	Implementasi Kebijakan Politik
BL.04.01	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
BL.04.01.01	Keanggotaan
BL.04.01.02	Persidangan
BL.04.01.03	Kesejahteraan
BL.04.01.04	Hak
BL.04.01.05	Sekretaris DPRD Kabupaten/ Kota
BL.04.01.06	Alat Kelengkapan DPRD
BL.04.01.07	Fraksi DPRD
BL.04.01.08	Fasilitasi DPRD
BL.04.01.09	Administrasi DPRD
BL.04.02	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
BL.04.03	Pendidikan Budaya Politik
BL.04.04	Pemilihan Umum
BL.05	Ketahanan ekonomi
BL.05.00	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
BL.05.01	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
BL.05.02	Perilaku Perekonomian Masyarakat
BL.05.03	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi
<b>DC</b>	<b>KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>
DC.00	Pendaftaran Penduduk
DC.00.00	Identitas Penduduk
DC.00.00.00	Pelaksanaan pelayanan kartu keluarga
DC.00.00.01	pelaksanaan pelayanan kartu Tanda Penduduk Elektronik
DC.00.00.02	Pelaksanaan pelayanan kartu Tanda Identitas Anak
DC.00.01	Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah NKRI
DC.00.01.00	Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
DC.00.01.01	Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing Dalam Wilayah NKRI
DC.00.02	Pindah Datang Penduduk Antar Negara
DC.00.02.00	Pendaftaran perpindahan penduduk Indonesia keluar Negeri dan WNI dari luar negeri
DC.00.02.01	Pendaftaran orang asing tinggal terbatas
DC.00.03	Pendataan Penduduk Rentan
DC.00.03.00	Pendataan penduduk korban bencana
DC.00.03.01	Pendataan penduduk daerah terbelakang
DC.00.03.02	Pendataan orang terlantar
DC.00.03.03	Pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan
DC.00.04	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
DC.01	Pencatatan Sipil
DC.01.00	Kelahiran dan Kematian
DC.01.00.00	Pelayanan Pencatatan Kelahiran
DC.01.00.01	Pelayanan Pencatatan Lahir Mati

DC.01.00.02	Pencatatan Kematian
DC.01.01	Perkawinan dan Perceraian
DC.01.01.00	Pelayanan Pencatatan perkawinan dan perceraian agama islam
DC.01.01.01	Pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama non islam
DC.01.01.02	Pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pencatatan perkawinan dan perceraian
DC.01.02	Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta
DC.01.02.00	Pelayanan perubahan dan pembatalan akta
DC.01.02.01	Pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta
DC.01.02.02	Pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta
DC.01.03	Pencatatan Kewarganegaraan
DC.01.03.00	Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Kewarganegaraan Akibat Kelahiran
DC.01.03.01	Pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat non kelahiran
DC.01.03.03	Pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengangkatan pelayanan pencatatan pewarganegaraan
DC.01.03.21	Pelaksanaan pencatatan pewarganegaraan kelahiran dan non kelahiran
DC.01.04	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
DC.02	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
DC.02.00	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
DC.02.01	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan
DC.02.02	Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan
DC.02.03	Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan
DC.02.04	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
DC.03	Pengembangan Kebijakan Penduduk
DC.03.00	Kuantitas Penduduk
DC.03.00.00	Pelaksanaan penyusunan analisis jumlah, struktur dan komposisi penduduk
DC.03.00.01	Pelaksanaan analisis pertumbuhan penduduk
DC.03.00.02	Kebijakan kuantitas penduduk
DC.03.01	Kualitas Penduduk
DC.03.01.00	Pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia anak, remaja dan pemuda
DC.03.01.01	Pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia produktif dan lanjut usia
DC.03.01.02	Pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka kebijakan kualitas penduduk
DC.03.02	Mobilitas Penduduk
DC.03.02.00	Pelaksanaan penataan persebaran penduduk antarwilayah
DC.03.02.01	Pelaksanaan penataan urbanisasi dan migrasi non permanen
DC.03.02.02	Kebijakan mobilitas penduduk
DC.03.03	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
DC.03.03.00	Pelaksanaan pengembangan sistem perlindungan penduduk
DC.03.03.01	Pelaksanaan pengembangan sistem pemberdayaan penduduk
DC.03.03.02	Perlindungan dan pemberdayaan penduduk
DC.03.04	Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
DC.03.04.00	Pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui jalur luar sekolah

DC.03.04.01	Pengembangan wawasan kependudukan
DC.03.04.02	Pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan
<b>DC.04</b>	<b>Penyerasian Kependudukan</b>
DC.04.00	Indikator Kependudukan
DC.04.00.00	Analisis indikator kependudukan
DC.04.00.01	Indikator Statis Kependudukan
DC.04.00.02	Penerapan pengembangan indikator kependudukan
DC.04.01	Proyeksi Penduduk
DC.04.01.00	Analisis proyeksi penduduk
DC.04.01.01	Penyusunan proyeksi penduduk
DC.04.01.02	Perumusan implikasi proyeksi penduduk
DC.04.01.03	Penyusunan penetapan dan perumusan implikasi proyeksi penduduk
DC.04.02	Perencanaan Kependudukan
DC.04.03	Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah
DC.04.04	Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah
<b>DC.05</b>	<b>Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan</b>
DC.05.00	Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan
DC.05.00.00	Kebijakan teknis pelayanan kerja sama dan inovasi pelayanan Kependudukan
DC.05.00.01	Pembinaan dan koordinasi pelayanan kerja sama dan inovasi pelayanan Kependudukan
DC.05.00.02	Pelayanan dan penerbitan dokumen kerjasama dan inovasi pelayanan Kependudukan
DC.05.00.03	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kerja sama dan inovasi pelayanan Kependudukan
DC.05.00.04	Pengembangan inovasi pelayanan Kependudukan
DC.05.01	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
DC.05.01.00	Pemanfaatan data kependudukan
DC.05.01.01	Koordinasi Pemanfaatan data kependudukan
DC.05.01.02	Dokumen kerahasiaan Individu
DC.05.01.03	Pemeliharaan Arsip Kependudukan
DC.05.02	Evaluasi dan pelaporan

## **DG**

	<b>PERDAGANGAN</b>
<b>DG.00</b>	<b>Kebijakan Bidang Perdagangan</b>
DG.00.00	Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
DG.00.01	Penyiapan bahan
DG.00.02	Perumusan Kebijakan
DG.00.03	Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
DG.00.04	Penetapan dalam bentuk NSPK
DG.00.05	Perumusan dan penetapan standar
<b>DG.01</b>	<b>Perdagangan Dalam Negeri</b>
DG.01.00	Bina Usaha
DG.01.00.00	Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
DG.01.00.01	Bina Usaha Jasa Perdagangan
DG.01.00.02	Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan
DG.01.00.03	Informasi Perusahaan (Pendaftaran Perusahaan dan Seksi Analisa LKTP)
DG.01.00.04	Pelaku Pasar (Pengecer dan Pemasok)
DG.01.01	Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri
DG.01.01.00	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
DG.01.01.01	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
DG.01.01.02	Pengembangan Produk Lokal
DG.01.01.03	Pencitraan Produk Dalam Negeri
DG.01.02	Logistik dan Sarana Distribusi

DG.01.02.00	Pengembangan Sarana Distribusi (Perencanaan, Bimbingan teknis pengembangan)
DG.01.02.01	Pengelolaan Sarana Distribusi (Bimbingan teknis pengelolaan, Evaluasi pengelolaan)
DG.01.02.02	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik (Pemerintah, Lembaga non pemerintah)
DG.01.02.03	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik
DG.01.03	Bahan Pokok dan Barang Strategis
DG.01.03.00	Informasi Pasar
DG.01.03.01	Informasi Hasil Industri
DG.01.03.02	Barang Strategis
DG.01.03.03	Bahan Pokok Agro
DG.02	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
DG.02.00	Standarisasi
DG.02.00.00	Kelembagaan dan informasi standar
DG.02.00.01	Kerjasama Standarisasi (regional, bilateral dan multilateral)
DG.02.00.02	Perumusan dan penerapan standar
DG.02.00.03	Tata usaha (Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Program, Inventaris Kantor/BMAN)
DG.02.01	Pemberdayaan Konsumen
DG.02.01.00	Kerjasama, informasi, dan publikasi
DG.02.01.01	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen
DG.02.01.02	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
DG.02.01.03	Fasilitas kelembagaan
DG.02.02	Pengawasan Barang beredar dan jasa
DG.02.02.00	Produk pertambangan dan aneka industri
DG.02.02.01	Produk pertanian, kimia dan kehutanan
DG.02.02.03	Jasa (Distribusi dan Bisnis)
DG.02.02.04	Kerjasama
DG.02.03	Metrologi
DG.02.03.00	Sarana dan Kerjasama (Metrologi Legal)
DG.02.03.01	Kelembagaan dan dan penilaian (Metrologi Legal)
DG.02.03.02	UTTP dan Standar Ukuran
DG.02.03.03	Pengawasan
DG.02.03.04	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
DG.03	Perdagangan Berjangka Komoditi
DG.03.00	Perniagaan
DG.03.00.00	Pengkajian pasar
DG.03.00.01	Pengawasan Transaksi
DG.03.00.02	Pengawasan Keuangan dan Audit
DG.03.01	Analisis Pasar
DG.03.01.00	Pengkajian pasar
DG.03.01.01	Pengembangan Pasar
DG.03.01.02	Sistem informasi
DG.03.02	Pasar Fisik dan Jasa
DG.03.02.00	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang
DG.03.02.01	Pengawasan pasar lelang
DG.03.02.02	Pengawasan sistem gudang
DG.04	Pengembangan Ekspor Nasional
DG.04.00	Pasar dan Informasi Ekspor
DG.04.00.00	Pengembangan Pasar
DG.04.00.01	Pengembangan sistem informasi ekspor
DG.04.00.02	Sistem informasi ekspor
DG.04.00.03	Pelayanan informasi ekspor
DG.04.01	Produk Ekspor dan Ekonomi Kreatif
DG.04.01.00	Hasil industri manufaktur
DG.04.01.01	Produk agro
DG.04.01.02	Jasa
DG.04.01.03	Ekonomi Kreatif
DG.04.02	Kerjasama Pengembangan Ekspor
DG.04.02.00	Luar Negeri



DG.04.02.01	Dalam Negeri
DG.04.03	Promosi dan Citra
DG.04.03.00	Promosi
DG.04.03.01	Perencanaan dan Pemantauan Citra
DG.04.03.02	Penerapan Citra
DG.05	Bimbingan Teknis
DG.06	Evaluasi
DG.07	Laporan Statistik Perdagangan
DG.07.00	Laporan Statistik Bulanan, Triwulan, Semester
DG.07.01	Laporan Statistik Tahunan

## **DK**

<b>DK.00</b>	<b>PENDIDIKAN</b>
DK.00.00	KEBIJAKAN
DK.00.01	Kebijakan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
<b>DK.01</b>	Memory of Understanding (MoU)
DK.01.00	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal
DK.01.01	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)
DK.01.02	Pelatihan Sosial
DK.01.03	Peringatan Hari anak Internasional
DK.01.04	Block Grant
DK.01.05	Penyelenggaraan Program
DK.01.06	Naskah Perjanjian Hibah Daerah
DK.01.07	Data Tamat Belajar PAUD dan Dikmas
DK.01.08	Data Sarana Prasarana PAUD dan Dikmas
DK.01.09	Surat Keterangan Lulusan Taman Kanak-Kanak Formal dan Non Formal
<b>DK.02</b>	Surat Keterangan jenjang SPS/TPA/KB
DK.02.00	Pendidikan Masyarakat
DK.02.01	Penyelenggaraan Program
DK.02.02	Penilaian dan pemberian bantuan sosial
DK.02.03	Lomba/Pemberian Penghargaan
DK.02.04	Pameran
DK.02.05	Rakor
DK.02.06	Sosialisasi
DK.02.07	Setifikasi dan Akreditasi
DK.02.08	Peringatan Hari anak Internasional
DK.02.09	Pendidikan Paket A
DK.02.10	Pendidikan Paket B
DK.02.11	Pendidikan Paket C
<b>DK.03</b>	Kursus dan Pelatihan
DK.03.00	Pendidik dan Tenaga Pendidik
DK.03.01	Penyelenggaraan Program
DK.03.02	Pemberian Bantuan Sosial
DK.03.03	Pembinaan program :bintek, orientasi teknis, dan temu karya
DK.03.04	Standar kursus dan pelatihan
DK.03.05	Lomba lembaga kursus berprestasi
DK.03.06	Publikasi dan promosi kursus
DK.03.07	Sertifikasi
<b>DK.04</b>	Pendidikan Dasar (SD)
DK.04.00	Kurikulum
DK.04.01	bahan Ajaran
DK.04.02	Pelatihan
DK.04.03	Block Grant
DK.04.04	Bimbingan Teknis/Sosialisasi
DK.04.05	Lomba, Sayembara dan Festival
DK.04.06	Bantuan Operasional Sekolah
DK.04.07	Bantuan Siswa Miskin
DK.04.08	Data Induk Siswa

DK.04.09	Berkas Mutasi Siswa
DK.04.10	Data kelulusan Siswa
DK.04.11	Data Siswa yang Putus Sekolah
DK.04.12	Izin Operasional Sekolah
DK.04.13	Data Kebutuhan Sarana Prasarana Sekolah
DK.04.14	Surat Keterangan Ijazah
DK.05	Sekolah Menengah Pertama (SMP)
DK.05.00	Kurikulum
DK.05.01	Bahan Ajaran
DK.05.02	Pelatihan
DK.05.03	Block Grand
DK.05.04	Bimbingan Teknis/Sosialisasi
DK.05.05	Lomba, Sayembara dan Festival
DK.05.06	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
DK.05.07	Bantuan Siswa Miskin
DK.05.08	Data Laporan Kelulusan
DK.05.09	Data kebutuhan Sarana dan Prasarana
DK.05.10	Data Laporan Bulanan
DK.05.11	Data Laporan Perpustakaan
DK.05.12	Data Mutasi Siswa
DK.05.13	Data Siswa yang Putus Sekolah
DK.05.14	Izin Operasional Sekolah
DK.05.15	surat keterangan ijazah
DK.06	Pendidikan khusus/Layanan Khusus
DK.06.00	Bahan Ajar
DK.06.01	Petunjuk Teknis
DK.06.02	Block grant
DK.06.03	Sosialisasi, bimtek
DK.06.04	Lomba, sayembara, jambore, festival
DK.06.05	Kurikulum/bahan pembelajaran
DK.06.06	Alat bantu pembelajaran
DK.06.07	Pendataan
DK.06.08	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi)
DK.07	Pendidik dan Tenaga Pendidik
DK.07.00	Pendataan dan Pemetaan
DK.07.01	Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidik
DK.07.02	Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik: standar, Uji kompetensi, sertifikasi
DK.07.03	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
DK.07.04	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
DK.07.05	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
DK.07.06	Block Grant
DK.07.07	Bimbingan teknis/sosialisasi
DK.07.08	Data Induk siswa
DK.07.09	Pensiun PNS/P3K
DK.07.10	Pengajuan NUPTK Guru
DK.07.11	Surat tentang Proses perceraian
DK.07.12	Sertifikasi Guru
DK.07.13	Percerian
DK.08	Sekolah Menengah Atas
DK.08.00	Kurikulum
DK.08.01	Bahan Ajar
DK.08.02	Pelatihan
DK.08.03	Block grant
DK.08.04	Bimbinganteknis/sosialisasi
DK.08.05	Lomba , Sayembara, festival
DK.08.06	Bantuan operasional Sekolah (BOS)
DK.08.07	Bantuan siswa miskin
DK.09	Penilaian Pendidik

DK.09.00	Penilaian Akademik
DK.09.01	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
DK.09.02	Penilaian Non Akademik
DK.10	Data dan Statistik Pendidikan
DK.10.00	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
DK.10.01	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
<b>DR</b>	<b>PEMADAM KEBAKARAN</b>
DR.01	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
DR.01.00	Identifikasi Potensi Bencana
DR.01.01	Organisasi Sistem dan Prosedur
DR.01.02	Sarana dan Prasarana
DR.01.03	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
<b>EM</b>	<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>
EM.00	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
EM.00.00	Pengusulan kebijakan
EM.00.01	Penyiapan bahan
EM.00.02	Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan
EM.00.03	Pengumpulan dan pengolahan data
EM.00.04	Penetapan dalam bentuk NSPK
EM.01	Rekomendasi Kegeologian
EM.01.00	Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah
EM.01.01	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
EM.01.02	Pertambangan
EM.01.03	Panas Bumi
EM.01.04	Geosains
EM.01.05	Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)
EM.01.06	Kelayakan Lingkungan
EM.02	Penelitian Kegeologian
EM.02.00	Administrasi pelaksanaan penelitian
EM.02.01	Administrasi tenaga penelitian
EM.02.02	Administrasi penggunaan peralatan penelitian
EM.02.03	Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi
EM.02.04	Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian
EM.02.05	Sumber Daya Geologi
EM.02.06	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
EM.02.07	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
EM.02.08	Survei Geologi
EM.03	Inventarisasi dan evaluasi kegeologian
EM.03.00	Sumber Daya Geologi
EM.03.01	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
EM.03.02	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
EM.03.03	Survei Geologi
EM.03.04	Konservasi
EM.04	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi
EM.04.00	Peta potensi dan sebaran
EM.04.01	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
EM.04.02	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara
EM.04.03	Survei Geologi
EM.05	Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
EM.05.00	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi
EM.05.01	Rencana dan Realisasi Investasi
EM.05.02	Penetapan Harga Minyak Mentah
EM.05.03	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi
EM.05.04	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
EM.05.05	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

EM.05.06	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri
EM.05.07	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKBI) dan Rencana Impor Barang (RIB)
<b>EM.06</b>	<b>Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi</b>
EM.06.00	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)
EM.06.01	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi
EM.06.02	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi
EM.06.03	Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)
EM.06.04	Perpanjangan Kontrak KKS
EM.06.05	Penetapan Alokasi dan Harga Gas
EM.06.06	Partisipasi <i>Interest</i>
EM.06.07	Tumpang Tindih Lahan
<b>EM.07</b>	<b>Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi</b>
EM.07.00	Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain
EM.07.01	Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran
EM.07.02	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
<b>EM.08</b>	<b>Teknik dan Lingkungan</b>
EM.08.00	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
EM.08.01	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)
EM.08.02	Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)
EM.08.03	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las
EM.08.04	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi
EM.08.05	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi
EM.08.06	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
EM.08.07	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir
EM.08.08	Penghargaan Keselamatan Kerja
EM.08.09	Usaha penunjang
<b>EM.09</b>	<b>Infrastruktur</b>
EM.09.00	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
EM.09.01	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
EM.09.02	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
EM.09.03	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
<b>EM.10</b>	<b>Penyiapan Program Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi</b>
EM.10.00	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
EM.10.01	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga
EM.10.02	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi
EM.10.03	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT
EM.10.04	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT
EM.10.05	Penyusunan Neraca Energi
EM.10.06	Road Map di Bidang EBT
<b>EM.11</b>	<b>Panas Bumi</b>
EM.11.00	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
EM.11.01	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
EM.11.02	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
EM.11.03	Rekomendasi Bahan Peledak
EM.11.04	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak

EM.11.05	Izin Tangki Bahan Bakar Cair
EM.11.06	Persetujuan sertifikasi Welding Procedure Specification (WPS) dan Procedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las
EM.11.07	Penerbitan Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
EM.11.08	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
EM.11.09	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
EM.11.10	Penetapan kapasitas usaha panas bumi
EM.11.11	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
EM.11.12	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
EM.11.13	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
EM.11.14	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi
EM.11.15	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
EM.11.16	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
EM.12	Bioenergi
EM.12.00	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)
EM.12.01	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)
EM.12.02	Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor
EM.12.03	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
EM.12.04	Evaluasi/Revisi HIP BBN
EM.12.05	Database Pengusahaan Bioenergi
EM.12.06	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik
EM.12.07	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
EM.12.08	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga
EM.13	Aneka Energi
EM.13.00	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
EM.13.01	Penetapan Kapasitas Usaha
EM.13.02	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
EM.13.03	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
EM.13.04	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)
EM.14	Konservasi Energi
EM.14.00	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi
EM.14.01	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi
EM.14.02	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE
EM.14.03	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast
EM.14.04	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi
EM.14.05	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca
EM.14.06	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi
EM.14.07	Profil investasi efisiensi energi
EM.14.08	<i>Investment Grade Audit</i> (IGA)
EM.14.09	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE
EM.15	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE
EM.15.00	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga
EM.15.01	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
EM.15.02	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE
EM.15.03	Evaluasi Program Kerja
EM.16	Bina Program Tenaga Listrik
EM.16.00	Investasi dan pendanaan tenaga listrik
EM.16.01	Pengembangan listrik pedesaan

	Data dan Informasi Ketenagalistrikan
<b>EM.17</b>	Bina Usaha Ketenagalistrikan
EM.17.00	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan
EM.17.01	Harga dan Subsidi Listrik
EM.17.02	Hubungan komersial tenaga listrik
EM.17.03	Perlindungan konsumen listrik
<b>EM.18</b>	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
EM.18.00	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan
EM.18.01	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan
EM.18.02	Usaha penunjang ketenagalistrikan
EM.18.03	Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan
<b>EM.19</b>	Sertifikasi
EM.19.00	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
EM.19.01	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)
EM.19.02	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik
EM.19.03	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik
EM.19.04	Registrasi Sertifikasi
<b>EM.20</b>	Akreditasi Ketenagalistrikan
<b>EM.21</b>	Standarisasi Kompetensi
<b>EM.22</b>	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan
EM.22.00	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
EM.22.01	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
EM.22.02	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
EM.22.03	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
<b>EM.23</b>	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
EM.23.00	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
EM.23.01	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
EM.23.02	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)
EM.23.03	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT
EM.23.04	Laporan hasil pengawasan penunjukan
<b>EM.24</b>	Bina Program Mineral dan Batubara
EM.24.00	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara
EM.24.01	Rencana Induk Mineral dan Batubara
EM.24.02	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara
EM.24.03	Data dan Informasai Mineral dan Batubara
EM.24.04	Pelaporan Program Mineral dan Batubara
EM.24.05	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler
EM.24.06	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara
EM.24.07	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara
EM.24.08	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara
<b>EM.25</b>	Pembinaan Pengusahaan Mineral
EM.25.00	Ketenagakerjaan
EM.25.01	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
EM.25.02	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral
EM.25.03	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral
EM.25.04	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral
EM.25.05	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)
EM.25.06	Perizinan usaha pertambangan mineral
EM.25.07	Kontrak Karya (KK)

EM.25.08	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)
EM.25.09	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
EM.25.10	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral
EM.25.11	Teguran kepada pengusahaan Kontrak Karya (KK)
EM.25.12	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral
EM.25.13	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
EM.25.14	Pelaporan usaha pertambangan mineral
EM.25.15	Penghargaan usaha pertambangan mineral
EM.25.16	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
EM.26	Pembinaan Pengusahaan Batubara
EM.26.00	Ketenagakerjaan
EM.26.01	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
EM.26.02	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara
EM.26.03	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara
EM.26.04	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara
EM.26.05	Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut)
EM.26.06	Perizinan Usaha Pertambangan Batubara
EM.26.07	Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
EM.26.08	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
EM.26.09	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
EM.26.10	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
EM.26.11	Teguran kepada pengusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
EM.26.12	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara
EM.26.13	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
EM.26.14	Pelaporan usaha pertambangan batubara
EM.26.15	Penghargaan usaha pertambangan batubara
EM.26.16	Penerbitan sertifikat <i>clear and clean</i> (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara
EM.27	Penerimaan Negara
EM.27.00	Penerimaan Negara Bukan Pajak
EM.27.01	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
EM.27.02	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
EM.28	Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
EM.28.00	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)
EM.28.01	Pengawasan Standardisasi
EM.28.02	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang
EM.28.03	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja
EM.28.04	Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang
EM.28.05	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
EM.28.06	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
EM.28.07	Rekomendasi bahan kimia

EM.28.08	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
EM.28.09	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan pelaksanaan reklamasi
EM.28.10	Pemberian Penghargaan
EM.28.11	Pengawasan lingkungan pertambangan
EM.28.12	Usaha Jasa Mineral dan Batubara
EM.28.13	Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara
EM.28.14	Rekomendasi Teknis
EM.28.15	Persetujuan Teknis
EM.28.16	Pengawasan Teknis
EM.28.17	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara
EM.28.18	Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
EM.29	Program Penelitian dan Pengembangan
EM.29.00	Rencana Penelitian dan Pengembangan
EM.29.01	Pengembangan dan inovasi
EM.29.02	Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/pengkajian/pengembangan/inovasi
EM.29.03	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi
EM.29.04	Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
EM.29.05	Pembinaan penelitian/Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
EM.29.06	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
EM.29.07	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
EM.29.08	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
EM.29.09	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
EM.29.10	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
EM.29.11	Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK
EM.29.12	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral
EM.30	Sarana Litbang
EM.30.00	Administrasi penggunaan peralatan
EM.30.01	Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi
EM.31	Afiliasi
EM.31.00	Proyek Percontohan
EM.31.01	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
EM.31.02	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan
EM.31.03	Penyajian Informasi
EM.32	Penelitian dan Pengembangan Kegeologian
EM.32.00	Pemetaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan
EM.32.01	Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai
EM.32.02	Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan
EM.32.03	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan
EM.33	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi
EM.33.00	Teknologi Eksplorasi
EM.33.01	Teknologi Eksploitasi
EM.33.02	Laboratorium
EM.33.03	Study



EM.33.04	Teknologi Proses
EM.33.05	Teknologi Aplikasi Produk
EM.33.06	Teknologi Gas
EM.34	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara
EM.34.00	Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya
EM.34.01	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral
EM.34.02	Teknologi Pemanfaatan Batubara
EM.35	Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan
EM.35.00	Energi baru terbarukan
EM.35.01	Teknologi Ketenagalistrikan
EM.35.02	Lingkungan dan Konservasi Energi
EM.35.03	Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi

## **HB**

### **PERHUBUNGAN**

HB.00	Kebijakan Teknis dan Strategis Bidang Perhubungan
HB.00.00	Kebijakan Teknis dan Strategis Bidang Perhubungan
HB.01	Jaringan Prasarana dan Pelayanan
HB.01.00	Penentuan Lokasi Terminal Barang Tipe Pengumpul dan Tipe Penunjang
HB.01.01	Penentuan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C
HB.01.02	Penetapan Lokasi Terminal Barang Utama
HB.01.03	Standar Pelayanan Minimal Pengoperasian Terminal
HB.01.04	Jaringan Trayek Angkutan Antar Kota/Provinsi
HB.01.05	Jaringan Lintas pada Jaringan Jalan Primer
HB.01.06	Penetapan Kelas Jalan Primer
HB.01.07	Kualifikasi Teknis Petugas Terminal
HB.01.08	Jaringan Transportasi Jalan Sekunder
HB.02	Pengembangan Transportasi Jalan
HB.02.00	Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
HB.02.01	Pengembangan Transportasi Jalan
HB.03	Sarana ANgkutan Jalan
HB.03.00	Pengujian Kendaraan Bermotor
HB.03.00.00	Pengesahan Hasil Uji Tipe Kendaraan Bermotor
HB.03.00.01	Sertifikat Uji Tipe Kendaraan Bermotor
HB.03.00.02	Sertifikasi Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor
HB.03.00.03	Akreditasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor
HB.03.01	Teknologi Kendaraan Bermotor
HB.03.01.00	Sertifikasi Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor
HB.03.01.01	Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor
HB.03.01.02	Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor
HB.03.01.03	Harmonisasi dan Standarisasi Regulasi Kendaraan Bermotor
HB.04	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
HB.04.00	Analisa Dampak Lalu Lintas Jalan Nasional di Luar Kawasan Perkotaan
HB.04.01	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Nasional
HB.05	Perlengkapan Jalan
HB.05.00	Pedoman Teknis Perlengkapan Jalan
HB.05.01	Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan
HB.05.02	Akreditasi Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor
HB.05.03	Kualifikasi Teknis Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor

HB.05.04	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional/Kabupaten
<b>HB.06</b>	<b>Angkutan Penumpang</b>
HB.06.00	Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi
HB.06.01	Izin Trayek Antarkota AntarProvinsi/Kabupaten
HB.06.02	Izin Operasi Angkutan Pariwisata dan Angkutan Penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara dan antar kota/provinsi
HB.06.03	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
HB.06.04	Pemberian subsidi angkutan umum
HB.06.05	Angkutan perintis
HB.06.06	Penghargaan perusahaan angkutan umum
<b>HB.07</b>	<b>Angkutan Barang</b>
HB.07.00	Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
HB.07.01	Tarif angkutan barang
HB.07.02	Izin operasi angkutan barang tertentu
HB.07.03	Pembinaan angkutan barang
HB.07.04	Izin dispensasi angkutan jalan
<b>HB.08</b>	<b>Monitoring Operasional</b>
HB.08.00	Pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan
HB.08.01	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan
HB.08.02	Berkas pelanggaran Perda
<b>HB.09</b>	<b>Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil</b>
HB.09.00	Pedoman Teknis
HB.09.01	Penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
HB.09.02	Bimtek PPNS
HB.09.03	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
<b>HB.10</b>	<b>Analisa dan Evaluasi Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan</b>
HB.10.00	Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
HB.10.01	Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan
<b>HB.11</b>	<b>Pengembangan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan</b>
HB.11.00	Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan(peta jaringan dan blueprint jaringan)
HB.11.01	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan
<b>HB.12</b>	<b>Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan</b>
HB.12.00	Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
<b>HB.13</b>	<b>Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan</b>
HB.13.00	Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan
HB.13.01	Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan
<b>HB.14</b>	<b>Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan</b>
HB.14.00	Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
HB.14.01	Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan
HB.14.02	Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional

HB.14.03	Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
HB.15	Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan
HB.15.00	Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
HB.15.01	Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
HB.16	Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
HB.16.00	Manajemen Lalu Lintas
HB.16.01	Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan
HB.16.02	Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas angkutan sungai dan danau
HB.16.03	Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau
HB.17	Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
HB.17.00	Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan
HB.17.01	Penetapan kelas akhir dan peta alur pelayaran sungai dan danau
HB.17.02	Perambuan sungai, danau dan penyeberangan
HB.18	Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
HB.18.00	Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
HB.18.01	Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional
HB.19	Tarif dan Keperintisan
HB.19.00	Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
HB.19.01	Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan
HB.20	Bina Sistem Transportasi Perkotaan
HB.20.00	Jaringan Transportasi Perkotaan
HB.20.01	Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
HB.20.02	Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan
HB.21	Lalu Lintas Perkotaan
HB.21.00	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
HB.21.01	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
HB.21.02	Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
HB.22	Angkutan Perkotaan
HB.22.00	Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
HB.22.01	Jaringan trayek perkotaan
HB.22.02	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
HB.23	Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan
HB.23.00	Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang
HB.23.01	Pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi

HB.23.02	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
HB.24	Dampak Transportasi Perkotaan
HB.24.00	Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan
HB.24.01	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
HB.24.02	Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan
HB.24.03	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota
HB.24.04	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
HB.24.05	Masterplan transportasi perkotaan
HB.25	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan
HB.25.00	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan
HB.25.01	Kualifikasi unit pengkajian
HB.25.02	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
HB.26	Pengembangan Keselamatan
HB.26.00	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
HB.26.01	Harmonisasi kebijakan
HB.27	Promosi dan Kemitraan Keselamatan
HB.27.00	Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan deseminasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
HB.27.01	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
HB.28	Bina Keselamatan Angkutan Umum
HB.28.00	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum
HB.28.01	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau
HB.29	Audit Keselamatan
HB.29.00	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia
HB.29.01	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
HB.29.02	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
HB.30	Inspeksi Keselamatan
HB.30.00	Pedoman keselamatan
HB.30.01	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
HB.30.02	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
HB.31	Parkir
HB.31.00	Surat Tugas Juru Parkir
HB.31.01	Izin tempat khusus parkir swasta
HB.31.02	Surat Tugas TKP Pemerintah
HB.32	Angkutan Laut Dalam Negeri
HB.32.00	Penyusunan Jaringan dan Penempatan Kapal Liner
HB.32.00.00	Jaringan trayek berjadwal tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri
HB.32.00.01	Penempatan kapal dan pemberian persetujuan penetapan dispensasi syarat bendera kapal asing
HB.32.01	Tramper dan Pelayanan Rakyat

HB.32.01.00	Trayek tidak berjadwal tetap dan tidak teratur (tramper) angkutan laut dalam negeri
HB.32.01.01	Usaha pelayaran rakyat
HB.33	Angkutan Laut Khusus dan Penunjang Angkutan Laut
HB.33.00	Pertambangan, Pariwisata dan Tenaga Kerja Bongkar Muat:
HB.33.00.00	Operasional angkutan laut khusus pertambangan dan lepas pantai pariwisata dan tenaga kerja bongkar muat
HB.33.00.01	Persetujuan penetapan dispensasi syarat bendera kapal asing angkutan laut khusus yang beroperasi di perairan indonesia
HB.33.01	Aneka Industri dan Penunjang Angkutan Laut
HB.33.01.00	Operasional angkutan laut khusus aneka industri, kehutanan dan perikanan
HB.33.01.01	Persetujuan penetapan dispensasi syarat bendera kapal asing angkutan laut khusus yang beroperasi di perairan indonesia serta penunjang angkutan laut
HB.34	Pengembangan Usaha Angkutan Laut
HB.34.00	Analisa Kebutuhan dan Bimbingan Armada
HB.34.00.00	pengembangan armada
HB.34.00.01	analisis ekonomi kebutuhan armada
HB.34.01	Bimbingan Usaha dan Tarif Angkutan Laut
HB.34.01.00	usaha angkutan laut dan tarif angkutan laut
HB.34.01.01	perizinann penyelenggaraan usaha pelayaran
HB.34.01.02	izin operasi angkutan laut khusus serta izin usaha angkutan multimoda
HB.35	Pengembangan Sistem dan Informasi Angkutan Laut
HB.35.00	Pengolahan Data dan Informasi Angkutan Laut
HB.35.00.00	Rencana kebutuhan angkutan laut pada waktu dan atau kondisi tertentu
HB.35.00.01	Angkutan bahan pokok
HB.35.01	Evaluasi Angkutan Laut
HB.35.01.00	Pelaksanaan kegiatan angkutan laut pada waktu dan atau kondisi tertentu
HB.35.01.01	Angkutan bahan pokok untuk kelancaran angkutan laut
HB.36	Pengembangan Pelabuhan
HB.36.00	Tatanaan dan Evaluasi Kepelabuhan
HB.36.00.00	Tatanaan kepelabuhan
HB.36.00.01	Pengumpulan dan evaluasi data dan informasi kepelabuhan
HB.36.00.02	Persetujuan penetapan lokasi pelabuhan
HB.36.00.03	Penyusunan laporan
HB.36.01	Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Pengembangan Pelabuhan
HB.36.01.00	Rencana induk dan pengembangan pelabuhan
HB.37	Perancangan Fasilitas Pelabuhan
HB.37.00	Pedoman dan Rancangan Teknis Fasilitas Pelabuhan
HB.37.00.00	Perancangan teknis fasilitas dan peralatan pelabuhan
HB.37.00.01	Survei topografi dan hidro-occonografi dan geoteknik
HB.37.00.02	Persetujuan desain, pembangunan fasilitas dan peralatan pelabuhan
HB.37.01	Penyusunan Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan
HB.37.01.00	Pembangunan dan perawatan fasilitas dan peralatan pelabuhan
HB.37.01.01	Sertifikasi fasilitas dan peralatan pelabuhan
HB.38	Pengerukan dan Reklamasi
HB.38.00	Program dan Perancangan Teknis Pengerukan dan Reklamasi
HB.38.00.00	Perancangan dan survei teknis pelaksanaan pengerukan dan reklamasi
HB.38.01	Bimbingan Peralatan Pengerukan dan Reklamasi
HB.38.01.00	Perizinan

HB.38.01.01	Penggunaan kapal dan alat bantu keruk
HB.38.01.02	Pekerjaan pengerukan dan reklamasi
HB.39	Pemanduan dan Penundaan Kapal
HB.39.00	Perairan dan Pelayanan Pandu
HB.39.00.00	Penetapan wilayah perairan pandu
HB.39.01	Standar pelayanan pemanduan dan penundaan kapal
HB.39.01.00	Tenaga Pandu dan Sarana Bantu Pemanduan
HB.39.01.01	Kualifikasi dan sertifikasi tenaga pandu
HB.39.01.02	Standardisasi sarana bantu pemanduan
HB.40	Bimbingan Pelayanan Jasa dan Operasional Pelabuhan
HB.40.00	Bimbingan Pelayanan Jasa dan Tarif Pelabuhan
HB.40.00.00	Tarif jasa kepelabuhan
HB.40.00.01	Kinerja pelayanan pelabuhan
HB.40.01	Bimbingan Tata Guna Tanah dan Perairan
HB.40.01.00	Penetapan batas daerah lingkungan kerja
HB.40.01.01	Penggunaan atas tanah dan perairan
HB.40.01.02	Kerjasama kepelabuhan
HB.40.01.03	Persetujuan pengoperasian pelabuhan
HB.41	Kelaikan Kapal
HB.41.00	Konstruksi dan Stabilitas Kapal
HB.41.01	Rancang Bangun dan Pemasukan Kapal
HB.42	Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
HB.42.00	Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
HB.43	Nautis, Teknis dan Radio Kapal
HB.43.00	Penilikan Keselamatan Kapal teknis permesinan kapal elektronika dan radio kapal perlengkapan dan peralatan kapal
HB.43.01	Sertifikasi Keselamatan Kapal
HB.44	Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal
HB.44.00	Pencegahan dan Ganti Rugi Pencemaran
HB.44.01	Manajemen Keselamatan Kapal
HB.45	Kepelautan
HB.45.00	Pengawakan dan Perlindungan Awak Kapal
HB.45.01	Standardisasi dan Sertifikasi Pelaut
HB.46	Perambuan
HB.46.00	Operasi dan Survei
HB.46.00.00	Pemberian ijin spesifikasi teknis sarana bantu navigasi pelayaran
HB.46.00.01	Pengamatan laut dan survei alur pelayaran
HB.46.00.02	Penandaan daerah terbatas dan terlarang
HB.46.00.03	Daerah ship to ship
HB.46.00.04	Maklumat pelayaran bahaya navigasi
HB.46.00.05	Design sistem rute dan tata cara berlalu lintas
HB.46.01	Peralatan dan Pemeliharaan Perambuan
HB.46.01.00	Peralatan
HB.46.01.01	Perencanaan pembangunan
HB.46.01.02	Replacement
HB.46.01.03	Perbaikan dan pemeliharaan
HB.46.01.04	Gambar design konstruksi
HB.46.01.05	Kelainan dan keandalan sarana bantu navigasi pelayaran dan koreksi peta laut
HB.47	Telekomunikasi Pelayaran
HB.47.00	Operasi
HB.47.00.00	Penyusunan kinerja stasiun radio pantai
HB.47.00.01	Stasiun radio kapal dan sarana bantu navigasi pelayaran elektronika
HB.47.00.02	Pemberian rekomendasi ijin radio telekomunikasi pelayaran
HB.47.00.03	Ijin identifikasi untuk dinas bergerak pelayaran
HB.47.00.04	Ijin kuasa perhitungan jasa telekomunikasi pelayaran
HB.47.01	Peralatan dan Pemeliharaan Telekomunikasi Pelayaran
HB.47.01.00	Perencanaan bangunan gedung

HB.47.01.01	Sistem jaringan
HB.47.01.02	Peralatan dan suku cadang
HB.47.01.03	Pemeliharaan dan perbaikan peralatan telekomunikasi pelayaran
HB.47.01.04	Penilaian teknis
HB.48	Kapal Negara Kenavigasian
HB.48.00	Operasi dan Pengawakan
HB.48.00.00	Pengoperasian, pengawakan dan perbekalan kapal
HB.48.00.01	Formasi dan penempatan kapal negara kenavigasian
HB.48.01	Pembangunan dan Pemeliharaan
HB.48.01.00	Rancang bangun dan pembangunan kapal
HB.48.01.01	Pemeliharaan dan penilaian teknis penghapusan kapal
HB.48.01.02	Perlengkapan dan suku cadang kapal negara kenavigasian
HB.49	Pangkalan Kenavigasian
HB.49.00	Bangunan
HB.49.00.00	Pemeliharaan bangunan gedung
HB.49.00.01	Lokasi pembangunan dan fasilitas pangkalan
HB.49.00.02	Penilaian teknis fasilitas pangkalan
HB.49.01	Perbengkelan
HB.49.01.00	Rencana kebutuhan peralatan suku cadang bengkel
HB.49.01.01	Pemeliharaan, perbaikan dan penilaian teknis
HB.49.01.02	Peralatan galangan dan bengkel
HB.50	Sarana dan Prasarana Kenavigasian
HB.50.00	Program
HB.50.00.00	Penyusunan rencana dan program kerja
HB.50.00.01	Penyusunan rencana anggaran sarana dan prasarana kenavigasian
HB.50.01	Evaluasi dan Pelaporan
HB.50.01.00	Pelaporan pelaksanaan rencana dan program kerja
HB.50.01.01	Pelaporan pelaksanaan anggaran dan pembangunan sarana dan prasarana kenavigasian
HB.51	Patroli dan Pengamanan Penjagaan Laut dan Pantai
HB.51.00	Patroli
HB.51.00.00	Patroli
HB.51.00.01	Penanganan perompakan dan pembajakan
HB.51.00.02	Sistem pelaporan kapal
HB.51.00.03	Analisa kerawanan wilayah
HB.51.00.04	Penegakkan peraturan perundang-undangan dilaut, pantai dan pelabuhan
HB.51.00.05	Penetapan kualifikasi teknis petugas patroli
HB.51.01	Pengamanan
HB.51.01.00	Pengamanan sarana dan prasarana transportasi dilaut, pantai dan pelabuhan
HB.51.01.01	Perijinan penggunaan, pendistribusian amunisi dan senjata api
HB.51.01.02	Penetapan kualifikasi teknis petugas pengamanan
HB.52	Pengawasan Keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
HB.52.00	Advokasi dan Diseminasi Pengawasan Keselamatan
HB.52.00.00	Advokasi dan diseminasi pengawasan keselamatan pelayaran
HB.52.00.01	Penetapan kualifikasi teknis petugas advokasi dan diseminasi
HB.52.01	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
HB.52.01.00	Penyelidikan, penyidikan, dan serta pengajuan berkas perkara pelanggaran dan tindak pidana pelayaran
HB.52.01.01	Penetapan kualifikasi teknis petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil
HB.53	Tertib Pelayaran
HB.53.00	Kebandaran
HB.53.00.00	Pengawasan penanganan muatan berbahaya

HB.53.00.01	Tertib lalulintas kapal dan tertib bandar
HB.53.00.02	Izin berlayar
HB.53.00.03	Pengawasan kapal asing
HB.53.00.04	Penetapan kualifikasi teknis petugas kesyahbandaran
HB.53.00.05	Pengawasan penanganan muatan berbahaya
HB.53.01	Kecelakaan Kapal
HB.53.01.01	Pengusutan kecelakaan dan bencana kapal
HB.53.01.01	Pengajuan pemeriksaan lanjutan perkara
HB.53.01.02	Pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Pelayaran dan pelaporan
HB.53.01.03	Penetapan kualifikasi teknis petugas penanganan pemrosesan kecelakaan kapal
HB.54	Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air
HB.54.00	Penanggulangan Musibah
HB.54.00.00	<i>search and rescue</i>
HB.54.00.01	Penanggulangan pencemaran
HB.54.00.02	Tuntutan ganti kerugian pencemaran dan pemadaman kebakaran
HB.54.00.03	Penetapan kualifikasi teknis petugas <i>search and rescue</i> , pemadam kebakaran dan penanggulangan pencemaran
HB.54.01	Pekerjaan Bawah Air
HB.54.01.00	Pendirian perubahan dan pembongkaran bangunan dan instalasi di perairan
HB.54.01.01	Kegiatan penyelaman
HB.54.01.02	Penanganan kerangka kapal dan salvage
HB.54.01.03	Penetapan kualifikasi teknis petugas penyelam
HB.55	Sarana dan Prasarana
HB.55.00	Sarana dan Prasarana Operasional
HB.55.00.00	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional Kesatuan Penjagaan laut dan Pantai
HB.55.00.01	pemeliharaan senjata api
HB.55.01	Awak kapal
HB.55.01.00	Peningkatan kuantitas dan kualitas petugas dibidang awak kapal Penjagaan laut dan pantai
HB.55.01.01	penyiapan rencana, program kerja dan laporan
<b>HK</b>	<b>HUKUM</b>
HK.00	HUKUM
HK.00.00	Program Legislasi
HK.00.01	Peraturan Daerah termasuk Naskah Akademik, Rancangan Awal, Rancangan Akhir sampai dengan ditetapkan beserta telaah hukum
HK.00.02	Peraturan Bupati termasuk naskah Akademik, Rancangan Awal, Rancangan Akhir sampai dengan ditetapkan beserta Telaah Hukum
HK.00.03	Keputusan/Ketetapan Bupati termasuk Rancanagan Awal, Rancangan Akhir sampai dengan ditetapkan beserta telaah Hukum
HK.00.04	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten termasuk Rancangan Awal, Rancangan Akhir sampai dengan ditetapkan beserta Telaah Hukum
HK.00.05	Instruksi/Surat Edaran Bupati
HK.00.06	Instruksi/Surat Edaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
HK.00.07	Surat Perintah Bupati
HK.00.08	Surat Perintah Pejabat Setingkat Eselon II dan II Daerah
HK.00.09	Peraturan Pimpinan Lembaga Negara/Badan Pemerintah/Instansi/Desa
HK.00.09.00	Peraturan DPRD
HK.00.09.01	Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa



HK.00.10	Standar/Pedoman/Prosedur kerja/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis yang bersifat nasional/regional/internasional termasuk rancangan awal sampai rancangan akhir
HK.00.11	Nota Kesepakatan/Memorandum of understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerjasama
HK.00.12	Dokumentasi Hukum
HK.00.13	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum
HK.00.14	Kasus/Sengketa Hukum
HK.00.14.00	Pidana
HK.00.14.01	Perdata
HK.00.14.02	Tata Usaha Negara
HK.00.14.03	Perburuan
HK.00.14.04	Arbitrase
HK.00.14.05	Sengketa adat
HK.00.15	Perizinan
HK.00.15.00	Berkas perizinan sejak permohonan sampai dengan diterbitkannya surat ijin
HK.00.15.01	Permohonan ijin yang ditolak
HK.00.16	Hak atas kekayaan intelektual (HAKI)
HK.00.16.00	Hak Cipta
HK.00.16.01	Hak Paten
HK.00.16.02	Hak Desain Industri
HK.00.16.03	Hak Rahasia Dagang
HK.00.16.04	Hak Merk
HK.00.16.05	DTLS ( Desain Tata letak Sirkuit Terpadu)
HK.00.17	Permohonan HAKI yang ditolak (Hak cipta, Paten. Desain Industri, Merk, Rahasia Dagang, Desain tata letak Sirkuit Terpadu)
HK.00.18	Penghargaan Kelembagaan

## **HM**

HM.00	<b>HUBUNGAN MASYARAKAT</b>
HM.00.00	<b>HUBUNGAN MASYARAKAT</b>
HM.00.00.00	Keprotokolan
HM.00.00.01	Kebijakan terkait Hubungan Masyarakat
HM.00.00.02	Penyelenggaraan acara kedinasan
HM.00.00.03	Buku Tamu
HM.00.00.04	Agenda Kegiatan Pimpinan Lembaga/Instansi
HM.00.00.03.00	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
HM.00.00.03.01	Kunjungan Dinas Pimpinan Lembaga/Instansi
HM.00.00.04	Kunjungan Dinas Pejabat Lain/Pegawai
HM.00.00.04	Daftar nama/alamat kantor/pejabat
HM.00.00.04	Dokumentasi/liptutan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing dalam berbagai media : Kertas/Foto/Video/Rekaman Suara/Multimedia
HM.00.01	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan
HM.00.02	Kliping Koran
HM.00.02.00	Brosur/leafet/poster/plakat
HM.00.02.01	Pengumuman/pemberitaan
HM.00.02.02	Hubungan antar Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansi
HM.00.03	Hubungan antar lembaga pemerintah
HM.00.03.01	Hubungan dengan organisasi sosial/LSM
HM.00.03.02	Hubungan dengan perusahaan
HM.00.03.03	Hubungan dengan perguruan
HM.00.03.04	Forum kehumasan (Bakohumas/Perhumas)
HM.00.03.05	Hubungan dengan media massa
HM.00.03.05.00	Siaran pers/konferensi pers/Press release
HM.00.03.05.01	Kunjungan wartawan/peliputan

HM.00.03.05.02	Wawancara
HM.00.04	Dengar Pendapat/Hearing DPRD
HM.00.05	Bahan/materi pidato/sidang DPRD, Muspida
HM.00.06	Provinsi/Kabupaten/Kota
HM.00.07	Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal
HM.00.08	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik
	Pameran/sayembara/lomba, festival, pembuatan spanduk dan iklan
HM.00.09	Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan Administrasi pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan kepada masyarakat yang memiliki jasa presentasi besar
HM.00.10	Ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, permohonan maaf

## **IN**

	<b>PERINDUSTRIAN</b>
IN.00	<b>KEBIJAKAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>
IN.00.00	Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
IN.00.01	Penyiapan Kebijakan
IN.00.02	Perumusan Kebijakan
IN.00.03	Harmonisasi/pemberian masukan
IN.00.04	Penetapan dalam bentuk NSPK
IN.01	<b>IKLIM USAHA DAN KERJA SAMA</b>
IN.01.00	Industri Manufaktur
IN.01.01	Industri Agro
IN.01.02	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
IN.01.03	Industri Kecil dan Menengah
IN.02	<b>PROMOSI INDUSTRI</b>
IN.02.00	Industri Manufaktur
IN.02.01	Promosi Industri Agro
IN.02.02	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
IN.02.03	Industri Kecil dan Menengah
IN.03	<b>STANDARISASI DAN TEKNOLOGI</b>
IN.03.00	Industri Manufaktur
IN.03.01	Industri Agro
IN.03.02	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
IN.03.03	Industri Kecil dan Menengah
IN.04	<b>HAK DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>
IN.04.00	Industri Manufaktur
IN.04.01	Industri Agro
IN.04.02	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
IN.04.03	Industri Kecil dan Menengah
IN.05	<b>INDUSTRI HIJAU</b>
IN.05.00	Industri Manufaktur
IN.05.01	Industri Agro
IN.05.02	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
IN.05.03	Industri Kecil dan Menengah
IN.06	<b>ANALISIS INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN/KOTA</b>
IN.06.00	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota
IN.07	<b>MONITORING DAN EVALUASI KOMPETENSI INTI INDUSTRI (PROVINSI DAN KAB/KOTA)</b>
IN.07.00	Monitoring dan Evaluasi Kerja sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota
IN.08	<b>PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG</b>
IN.08.00	Pengembangan Kawasan Industri
IN.09	<b>FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI</b>
IN.09.00	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri
IN.10	<b>KERJASAMA INDUSTRI</b>
IN.10.00	Ketahanan Industri
IN.11	<b>STANDARISASI</b>
IN.11.00	Standar
IN.12	<b>PENGKAJIAN KEBIJAKAN DAN IKLIM USAHA INDUSTRI</b>
IN.12.00	Kebijakan Industri

IN.12.01	Perpajakan dan Tarif
IN.12.02	Pengembangan Model Industrial
IN.13	PENKAJIAN INDUSTRI HIJAU DAN LINGKUNGAN HIDUP
IN.13.00	Industri Hijau
IN.13.01	Lingkungan Hidup
IN.13.02	Energi
IN.14	TEKNOLOGI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
IN.14.00	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
IN.14.01	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
IN.14.02	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
IN.15	LAPORAN STATISTIK PERINDUSTRIAN
IN.15.00	Laporan Statistik Bulanan, Triwulan, Semester
IN.15.01	Laporan Statistik Tahunan
<b>KA</b>	<b>KEARSIPAN</b>
KA.00	Kebijakan Kearsipan
KA.00.00	Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
KA.00.01	Penyiapan Kebijakan
KA.00.02	Perumusan Kebijakan
KA.00.03	Penetapan NSPK
KA.01	Pembinaan Kearsipan
KA.01.00	Akreditasi Kearsipan
KA.01.00.00	Proses akreditasi
KA.01.00.01	Berkas Penetapan Sertifikat Akreditasi
KA.01.00.02	Dasa Base Sertifikasi Arsiparis
KA.01.01	Sertifikasi Arsiparis
KA.01.01.00	Proses Sertifikasi Arsiparis
KA.01.01.01	Berkas Penetapan Sertifikasi Arsiparis
KA.01.01.02	Data Base Sertifikasi Arsiparis
KA.01.02	Bina Arsiparis
KA.01.02.00	Pengembangan Profesi Arsiparis
Ka.01.02.01	Bimbingan Konsultasi Arsiparis
KA.01.02.02	Penilaian Arsiparis
KA.01.02.02.00	Berkas Pengajuan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit(DUPAK)
KA.01.02.02.01	Berkas Penetapan Angka Kredit (PAK) Arsiparis
KA.01.02.03	Pemilihan Arsiparis Teladan
KA.01.02.03.00	Penyelenggaraan
KA.01.02.03.01	Berkas penetapan arsipris teladan
KA.01.02.04	Data base Arsiparis
KA.01.03	Bimbingan dan Konsultasi
KA.01.03.00	Penerapan siste Klasifikasi(Klasifikasi arsip, Tata Naskah Dinas, Klasifkasi Akses Keamanan)
KA.01.03.01	Penggunaan Sarana dan Prasarana Kearsipan
KA.01.03.02	Unit Kearsipan
KA.01.03.03	Sumber Daya Manusia
KA.01.04	Supervisi dan Evaluasi
KA.01.04.00	Perencanaan
KA.01.04.01	Pelaksanaan
KA.01.04.02	Laporan tahunan supervisi dan evaluasi
KA.01.05	Data base bimbingan dan konsultasi dan supervisi
KA.01.06	Fasilitasi Kearsipan
KA.01.06.00	SDM Kearsipan
KA.01.06.01	Prasarana dan Sarana
KA.01.07	Penilaian Organisasi Kearsipan
KA.01.07.00	Penyelenggaraan
KA.01.07.01	Penetapan/Penghargaan Orgnanisasi Kearsipan
KA.01.08	Jadwal Retensi Arsip
KA.01.08.00	Pengusulan dan Persetujuan/ Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip
KA.01.08.01	Penetapan dan Pengesahan JRA
KA.02	Pengelolaan Arsip

<b>KA.02.00</b>	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis</b>
<b>KA.02.00.00</b>	<b>Penciptaan</b>
<b>KA.02.00.01</b>	<b>Penggunaan</b>
<b>KA.02.00.01.00</b>	<b>Pengklasifikasian Pengamanan dan akses arsip</b>
<b>KA.02.00.01.01</b>	<b>Peminjaman</b>
<b>KA.02.00.02</b>	<b>Pemeliharaan</b>
<b>KA.02.00.02.00</b>	<b>Pemberkasan</b>
<b>KA.02.00.02.01</b>	<b>Penataan Arsip Aktif</b>
<b>KA.02.00.02.02</b>	<b>Penyimpanan Arsip</b>
<b>KA.02.00.02.02.00</b>	<b>Skema penyimpanan arsip aktif dan in aktif</b>
<b>KA.02.00.02.02.01</b>	<b>Pengamanan</b>
<b>KA.02.00.02.03</b>	<b>Alih Media</b>
<b>KA.02.00.02.04</b>	<b>Program Arsip Vital</b>
<b>KA.02.00.03</b>	<b>Autentikasi Arsip Dinamis</b>
<b>KA.02.00.04</b>	<b>Penyusutan</b>
<b>KA.02.00.04.00</b>	<b>Pemindahan Arsip Inaktif(berita acara dan daftar arsip yang di pindahkan)</b>
<b>KA.02.00.04.01</b>	<b>Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna</b>
<b>KA.02.00.04.02</b>	<b>Penyerahan arsip statis</b>
<b>KA.02.00.05</b>	<b>Database Pengelolaan Arsip Dinamis</b>
<b>KA.02.00.05.00</b>	<b>Data base Pengelolaan Arsip aktif dan inaktif</b>
<b>KA.02.01</b>	<b>Pengelolaan Arsip Statis</b>
<b>KA.02.01.00</b>	<b>Akuisisi</b>
<b>KA.02.01.00.00</b>	<b>Monitoring fisik dan daftar</b>
<b>KA.02.01.00.01</b>	<b>Verifikasi terhadap daftar arsip</b>
<b>KA.02.01.00.02</b>	<b>Menetapkan status arsip statis</b>
<b>KA.02.01.00.03</b>	<b>Persetujuan untuk penyerahan</b>
<b>KA.02.01.00.04</b>	<b>Penetapan arsip yang diserahkan</b>
<b>KA.02.01.00.05</b>	<b>Berita acara Penyerahan arsip</b>
<b>KA.02.01.00.06</b>	<b>Daftar arsip yang diserahkan</b>
<b>KA.02.01.01</b>	<b>Sejarah Lisan</b>
<b>KA.02.01.01.00</b>	<b>Administrasi pelaksanaan sejarah lisan</b>
<b>KA.02.01.01.01</b>	<b>Hasil wawancara sejarah lisan</b>
<b>KA.02.01.02</b>	<b>Daftar pencarian arsip statis</b>
<b>KA.02.01.03</b>	<b>Penghargaan dan imbalan</b>
<b>KA.02.01.04</b>	<b>Pengolahan</b>
<b>KA.02.01.04.00</b>	<b>Menata informasi</b>
<b>KA.02.01.04.01</b>	<b>Menata fisik</b>
<b>KA.02.01.04.02</b>	<b>Menyusun sarana bantu temu balik</b>
<b>KA.02.01.05</b>	<b>Preservasi</b>
<b>KA.02.01.05.00</b>	<b>Preventif</b>
<b>KA.02.01.05.00.00</b>	<b>Penyimpanan</b>
<b>KA.02.01.05.00.01</b>	<b>Pengendalian hama terpadu</b>
<b>KA.02.01.05.00.02</b>	<b>Reproduksi(alih media)</b>
<b>KA.02.01.05.00.03</b>	<b>Perencanaan dan penanggulangan bencana</b>
<b>KA.02.01.05.01</b>	<b>Kuratif</b>
<b>KA.02.01.05.02</b>	<b>Laporan hasil pengujian mutu preservasi</b>
<b>KA.02.01.06</b>	<b>Autentifikasi arsip statis</b>
<b>KA.02.01.07</b>	<b>Akses arsip statis</b>
<b>KA.02.01.07.00</b>	<b>Layanan arsip</b>
<b>KA.02.01.07.01</b>	<b>Penerbitan naskah sumber</b>
<b>KA.02.01.07.01.00</b>	<b>Administrasi dan proses penyusunan</b>
<b>KA.02.01.07.01.01</b>	<b>Hasil naskah sumber arsip</b>
<b>KA.02.01.07.02</b>	<b>Pameran arsip</b>
<b>KA.02.01.08</b>	<b>Jasa Kearsipan</b>
<b>KA.02.01.08.00</b>	<b>Konsultasi Kerasipan</b>
<b>KA.02.01.08.01</b>	<b>Manual Kerasipan</b>
<b>KA.02.01.08.02</b>	<b>Penetapan Arsip</b>
<b>KA.02.01.08.03</b>	<b>Otomasi Kerasipan</b>
<b>KA.02.01.08.04</b>	<b>Penyimpanan Arsip</b>
<b>KA.02.01.08.05</b>	<b>Perawatan dan Pemilihan arsip</b>
<b>KA.02.01.08.06</b>	<b>Data base jasa Kearsipan</b>

<b>KA.03</b>	Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN dan JIKN
<b>KA.03.00</b>	Perencanaan menjadi simpul jaringan SIKN melalui JIKN
<b>KA.03.01</b>	Pendidikan dan pelatihan materi simpul jaringan SIKN melalui JIKN
<b>KA.03.02</b>	Pengelolaan informasi arsip simpul jaringan SIKN melalui JIKN
<b>KA.04</b>	Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana
<b>KA.04.00</b>	Perencanaan pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana
<b>KA.04.01</b>	Pelaksanaan pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana
<b>KA.04.02</b>	evaluasi dan pelaporan pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana
<b>KA.05</b>	Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan kelurahan.
<b>KA.05.00</b>	Persiapan Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan kelurahan.
<b>KA.05.01</b>	Pelaksanaan Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan kelurahan.
<b>KA.05.02</b>	Evaluasi dan Pelaporan Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan kelurahan.
<b>KA.06</b>	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan
<b>KA.06.00</b>	Permohonan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan
<b>KA.06.01</b>	Kajian/Telaah izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan
<b>KA.06.02</b>	Penolakan/Pemberian izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan

## **KB**

	<b>KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA</b>
<b>KB.00</b>	Kebijakan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
<b>KB.00.00</b>	Pengkajian dan pengusulan kebijakan
<b>KB.00.01</b>	Penyiapan kebijakan
<b>KB.00.02</b>	Perumusan Kebijakan
<b>KB.00.03</b>	Masukan dan dukungan kebijakan
<b>KB.00.04</b>	Penetapan NSPK
<b>KB.01</b>	Analisis Pemaduan kebijakan pengendalian penduduk
<b>KB.01.00</b>	Pengumpulan dan pengolahan data
<b>KB.01.01</b>	Evaluasi dan pelaporan
<b>KB.02</b>	Fasilitas pemaduan kebijakan pengendalian penduduk
<b>KB.02.00</b>	Penyiapan fasilitas
<b>KB.02.01</b>	Evaluasi dan pelaporan
<b>KB.03</b>	Profil dan proyeksi penduduk
<b>KB.03.00</b>	Data profil dan proyeksi penduduk
<b>KB.03.01</b>	Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk
<b>KB.04</b>	Penetapan parameter pengendalian penduduk
<b>KB.04.00</b>	Penetapan sasaran parameter
<b>KB.04.01</b>	Evaluasi sasaran parameter
<b>KB.05</b>	Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk
<b>KB.05.00</b>	Pemanfaatan profil dan proyeksi
<b>KB.05.01</b>	Pemanfaatan parameter
<b>KB.06</b>	Pengembangan
<b>KB.06.00</b>	Pengembangan Sistem
<b>KB.07</b>	Pengembangan Materi
<b>KB.07.00</b>	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal

KB.07.01	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
KB.08	Monitoring dan Evaluasi
KB.08.00	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
KB.08.01	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
KB.09	Analisis Dampak Kependudukan
KB.09.00	Analisis Sosial
KB.09.01	Analisis Ekonomi
KB.09.02	Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan
KB.09.03	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
KB.10	Bina kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah
KB.10.00	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah
KB.10.01	Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana
KB.10.02	Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah
KB.10.02.00	Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
KB.10.02.01	Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
KB.11	Bina kesertaan keluarga berencana jalur swasta
KB.11.00	Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta
KB.11.01	Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta
KB.11.02	Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta
KB.11.02.00	Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
KB.11.02.01	Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta
KB.12	Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran khusus
KB.12.00	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan
KB.12.00.00	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
KB.12.00.01	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
KB.12.01	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
KB.12.01.00	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
KB.12.01.01	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
KB.12.02	Kesertaan keluarga berencana pria
KB.12.02.00	Peningkatan akses keluarga berencana pria
KB.12.02.01	Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
KB.13	Kesehatan Reproduksi
KB.13.00	Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak
KB.13.01	Pencegahan PMS dan HIV/AIDS
KB.13.02	Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas
KB.14	Bina keluarga Balita dan Anak
KB.14.00	Pelebagaan bina keluarga Balita dan anak
KB.14.00.00	Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak
KB.14.00.01	Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak
KB.14.01	Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak
KB.14.01.00	Monitoring bina keluarga Balita dan anak
KB.14.01.01	Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak
KB.15	Bina ketahanan remaja
KB.15.00	Pelebagaan bina ketahanan remaja
KB.15.00.00	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
KB.15.00.01	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat
KB.15.01	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja

KB.15.01.00	Monitoring bina ketahanan remaja
KB.15.01.01	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja
<b>KB.16</b>	<b>Bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan</b>
KB.16.00	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
KB.16.00.00	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
KB.16.00.01	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan
KB.16.01	Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
KB.16.01.00	Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
KB.16.01.01	Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
KB.16.02	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
KB.16.02.00	Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
KB.16.02.01	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
<b>KB.17</b>	<b>Pemberdayaan Ekonomi Keluarga</b>
KB.17.00	Pengembangan program usaha ekonomi keluarga
KB.17.01	Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga
KB.17.02	Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga
KB.17.02.00	Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
KB.17.02.01	Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga
KB.17.03	Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga
<b>KD</b>	<b>PERLENGKAPAN/PERALATAN/KEKAYAAN DAERAH</b>
<b>KD.00</b>	<b>PERLENGKAPAN/PERALATAN/KEKAYAAN DAERAH</b>
KD.00.00	Ketentuan-ketentuan tentang Pengelolaan Barang Daerah
KD.00.01	rencana Kebutuhan Barang
KD.00.01.00	Usulan SKPD/OPD
KD.00.01.01	Rencana/Daftar Kebutuhan Barang (RKBU/DKBU) Pemerintah Kabupaten
KD.00.02	Standarisasi, meliputi : Standarisasi Barang dan Harga
KD.00.03	Pengadaan Barang dan Jasa
KD.00.03.00	Barang
KD.00.03.01	Jasa
KD.00.04	Peminjaman Barang Bergerak, meliputi Alat Perlengkapan kantor, Kendaraan Dinas, Barang Inventaris dan Barang Bergerak lainnya
KD.00.05	Bukti-bukti kepemilikan
KD.00.05.00	Bukti-bukti kepemilikan Gedung/Bangunan meliputi : Sertifikat Tanah, Ijin Bangunan Gambar berikut Bestek (Rancang Bangun Gedung), Silsilah Riwayat Bangunan, Cara Perolehan dan Pengalihan Kepemilikan
KD.00.05.01	Bukti-bukti Kepemilikan Barang Bergerak, meliputi : Kendaraan Dinas, Barang Inventaris dan Barang Bergerak Lainnya
KD.00.06	Administrasi Pergudangan meliputi : Buku Gudang, Buku Pengadaan, Buku penerimaan Barang, Buku Pengeluaran Barang, Kartu Barang, Kartu Persediaan Barang dan Laporan Mutasi Barang
KD.00.07	Pemeliharaan Barang meliputi : Pemeliharaan dan Perbaikan Perabot Kantor, Kendaraan Dinas dan Barang Inventaris Lainnya serta Balik Nama Barang
KD.00.08	Pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

KD.00.09	Inventaris Barang
KD.00.09.00	Barang Bergerak
KD.00.09.01	Barang Tidak Bergerak
KD.00.10	Distribusi
KD.00.10.00	Barang Habis Pakai
KD.00.10.01	Barang Bergerak
KD.00.10.02	Barang Tidak Bergerak
KD.00.11	Penghapusan (Penjualan, Pemindahantanganan, Tukar Guling, Hibah) Gedung Bangunan dan Kelengkapan persyaratan
KD.00.12	Kasus Penolakan Pembelian Rumah Dinas oleh Penghuni/Bukan Penghuni, meliputi : Permohonan dan Hasil Pembahasan Persyaratannya
<b>KI</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>
<b>KL.00</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>KL.00.00</b>	<b>Kebijakan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika / Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika</b>
<b>KL.01</b>	<b>SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA</b>
<b>KL.01.00</b>	<b>Penataan Sumber Daya</b>
<b>KL.01.01</b>	<b>Operasi Sumber Daya</b>
<b>KL.01.02</b>	<b>Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika</b>
<b>KL.02</b>	<b>PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA</b>
<b>KL.02.00</b>	<b>POS</b>
<b>KL.02.01</b>	<b>Telekomunikasi</b>
<b>KL.02.01.00</b>	<b>Telekomunikasi Permanen</b>
<b>KL.02.02</b>	<b>Penyiaran</b>
<b>KL.02.03</b>	<b>Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal</b>
<b>KL.02.04</b>	<b>Pengendalian Pos dan Informatika</b>
<b>KL.03</b>	<b>APLIKASI INFORMATIKA</b>
<b>KL.03.00</b>	<b>e- Government</b>
<b>KL.03.01</b>	<b>e- Business</b>
<b>KL.03.02</b>	<b>Pemberdayaan Industri Informatika</b>
<b>KL.03.02.00</b>	<b>Pemberdayaan Industri Informatika Permanen</b>
<b>KL.03.03</b>	<b>Pemberdayaan Industri Informatika</b>
<b>KL.03.04</b>	<b>Keamanan Informasi</b>
<b>KL.03.04.00</b>	<b>Kemanan Informasi Permanen</b>
<b>KL.04</b>	<b>INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>
<b>KL.04.00</b>	<b>Komunikasi Publik</b>
<b>KL.04.01</b>	<b>Pengolahan dan Penyediaan Informasi</b>
<b>KL.04.02</b>	<b>Pengelolaan Media Publik</b>
<b>KL.04.03</b>	<b>Kemitraan Komunikasi</b>
<b>KL.04.04</b>	<b>Layanan Informasi Internasional</b>
<b>KL.05</b>	<b>PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA</b>
<b>KL.05.00</b>	<b>Infrastruktur Informatika</b>
<b>KL.05.01</b>	<b>Sistem dan Data</b>
<b>KL.05.02</b>	<b>Pusat Kerjasama Internasional</b>
<b>KL.05.03</b>	<b>Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat</b>
<b>KL.05.03.00</b>	<b>Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Retensi</b>
<b>KK</b>	<b>KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAN</b>
<b>KK.00</b>	<b>KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAN</b>
<b>KK.00.00</b>	<b>Kebijakan terkait Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan</b>
<b>KK.00.01</b>	<b>Telekomunikasi</b>
<b>KK.00.02</b>	<b>Perjalanan Dinas</b>
<b>KK.00.03</b>	<b>Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya</b>



KK.00.04	Risalah/Notulen Rapat
KK.00.04.00	Rapat Pimpinan Daerah/Setingkat Eselon I
KK.00.04.01	Rapat Pimpinan Eselon II dan III
KK.00.04.02	Rapat Staf
KK.00.05	Administrasi Penyediaan Konsumsi dan Akomodasi
KK.00.06	Pengurusan kendaraan dinas
KK.00.07	Pemeliharaan gedung dan taman
KK.00.08	Pengelolaan jaringan listrik, air, telepon dan komputer
KK.00.09	Ketertiban dan keamanan
KK.00.09.00	Pengamanan, penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat, kantor dan rumah dinas
KK.00.09.01	Laporan ketertiban dan keamanan
KK.00.10	Administrasi pengelolaan parkir
KK.00.11	Administrasi pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan dan pegawai lainnya

## **KM**

	<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>
KM.00	Kebijakan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
KM.00.00	Pengkajian dan Pengusulan Kebijaka
KM.00.01	Penyiapan kebijakan
KM.00.02	Perumusan kebijakan
KM.00.03	Pemberian masukan dan dukungan kebijakan
KM.00.04	Penetapan dalam bentuk NSPK
KM.01	Monitoring dan Evaluasi
KM.02	Kelembagaan Koperasi dan UKM
KM.02.00	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
KM.02.01	Peraturan Daerah
KM.02.02	Tata laksana Koperasi dan UKM
KM.02.03	Keanggotaan Koperasi
KM.02.04	Pengendalian dan Akuntabilita
KM.03	Produksi
KM.03.00	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
KM.03.01	Kehutanan dan Perkebunan
KM.03.02	Perikanan dan Peternakan
KM.03.03	Industri Kerajinan dan Pertambangan
KM.03.04	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
KM.04	Pembiayaan
KM.04.00	Program Pendanaan Koperasi dan UKM
KM.04.01	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
KM.04.02	Urusan Permodalan
KM.04.03	Asuransi dan Jasa Keuangan
KM.04.04	Pembiayaan dan Peminjaman Kredit
KM.04.05	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
KM.05	Pemasangan dan Jaringan Usaha
KM.05.00	Perdagangan Dalam Negeri
KM.05.01	Ekspor dan Impor
KM.05.02	Sarana dan Prasarana Pemasaran
KM.05.03	Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi dan UKM
KM.05.04	Informasi dan Publikasi Bisnis Koperasi dan UKM
KM.05.05	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM
KM.06	Pengembangan Sumber Daya Manusia
KM.06.00	Pengembangan Kewirausahaan
KM.06.01	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
KM.06.02	Peran Serta Masyarakat
KM.06.03	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
KM.06.04	Advokasi
KM.07	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
KM.07.00	Produktifitas dan Mutu
KM.07.01	Restrukturisasi Usaha
KM.07.02	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
KM.07.03	Fasilitasi Investasi UKMK
KM.07.04	Pengembangan Sistem Bisnis

<b>KM.08</b>	Pengkajian Sumber Daya UKMK
<b>KM.08.00</b>	Penelitian Koperasi
<b>KM.08.01</b>	Penelitian UKM
<b>KM.08.02</b>	Penelitian Sumber Daya
<b>KM.08.03</b>	Pengembangan Perkaderan UMK

**KP**

<b>KP.00</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>
<b>KP.01</b>	Kebijakan Bidang Kepegawaian
	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN
	Perencanaan kebutuhan ASN : a. Bahan penyusunan rencana kebutuhan b. Analisa kebutuhan c. Pengolahan data kebutuhan
<b>KP.01.00</b>	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
<b>KP.01.01</b>	Perencanaan pertimbangan formasi
<b>KP.01.02</b>	Penetapan kebutuhan ASN
<b>KP.01.03</b>	Standarisasi Jabatan
<b>KP.02</b>	Formasi dan pengadaan pegawai
<b>KP.02.00</b>	Formasi ASN
<b>KP.02.00</b>	Formasi ASN
<b>KP.02.01</b>	Proses rekrutmen ASN
<b>KP.02.02</b>	Pengumuman kelulusan ASN
<b>KP.02.03</b>	Berkas lamaran yang tidak diterima
<b>KP.02.04</b>	Pengangkatan ASN
<b>KP.02.05</b>	Open Biding(seleksi terbuka jabatan)
<b>KP.02.06</b>	Pengelolaan sistem rekrutmen ASN
<b>KP.02.07</b>	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi ASN
<b>KP.03</b>	Mutasi pegawai
<b>KP.03.00</b>	Alih tugas
<b>KP.03.02</b>	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
<b>KP.03.03</b>	Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai
<b>KP.03.04</b>	Peninjauan Masa Kerja
<b>KP.03.05</b>	BAPERJAKAT
<b>KP.04</b>	Pengembangan Karir
<b>KP.04.00</b>	Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta
<b>KP.04.01</b>	Penyesuaian Ijazah
<b>KP.04.02</b>	Penyusunan Sistem Karier
<b>KP.04.03</b>	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
<b>KP.04.04</b>	Angka Kredit
<b>KP.05</b>	Kinerja
<b>KP.05.00</b>	Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
<b>KP.05.01</b>	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
<b>KP.05.02</b>	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
<b>KP.06</b>	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
<b>KP.06.00</b>	Kode Etik Pegawai
<b>KP.06.01</b>	Disiplin
<b>KP.06.02</b>	Pemberhentian dengan hormat
<b>KP.06.03</b>	Pemberhentian dengan tidak hormat
<b>KP.06.04</b>	Pemberhentian sementara
<b>KP.06.05</b>	Pensiun ASN
<b>KP.07</b>	Bantuan hukum
<b>KP.07.00</b>	Pemberian bantuan hukum
<b>KP.07.01</b>	Bantuan hukum pegawai
<b>KP.08</b>	Status dan kedudukan pegawai
<b>KP.08.00</b>	Status Kepegawaian
<b>KP.08.01</b>	Kedudukan Kepegawaian

KP.08.02	Keberatan Pegawai
KP.08.03	Perselisihan Pegawai
<b>KP.09</b>	Sistem Informasi Kepegawaian
KP.09.00	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
KP.09.02	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik
KP.09.03	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
<b>KP.10</b>	Pengawasan dan Pengendalian
KP.10.00	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
KP.10.01	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
KP.10.02	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
KP.10.03	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
KP.10.04	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
KP.10.05	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
<b>KP.11</b>	Administrasi Pegawai
KP.11.00	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
KP.11.01	Cuti Sakit
KP.11.02	Cuti Bersalin
KP.11.03	Cuti Tahunan
KP.11.04	Cuti Alasan Penting
KP.11.05	Cuti Besar
KP.11.05	Cuti Besar
KP.11.06	Cuti Diluar Tanggungan Negara
KP.11.07	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
KP.11.08	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan
KP.11.09	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
KP.11.10	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
KP.11.11	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
KP.11.12	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan
<b>KP.12</b>	Kesejahteraan Pegawai
KP.12.00	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
KP.12.01	Asuransi Pegawai/BPJS
KP.12.02	Tabungan Perumahan
KP.12.03	Bantuan Sosial
KP.12.04	Pakaian Dinas
KP.12.05	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
KP.12.06	Pemberian Tali Kasih
KP.12.07	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
KP.12.08	Olahraga dan Rekreasi
KP.12.09	Rekam Medis
<b>KP.13</b>	Administrasi Perseorangan
KP.13.00	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
KP.13.01	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
KP.13.02	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
KP.13.03	Sekretaris Daerah
KP.13.04	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
<b>KP.14</b>	Penilaian Kompetensi
KP.14.00	Penilaian Kompetensi
KP.14.01	Hasil Penilaian Kompetensi

## **KS**

<b>KS.00</b>	<b>KESEHATAN</b>
KS.00.00	Kebijakan bidang kesehatan
<b>KS.01</b>	Kebijakan Teknis Bidang Kesehatan
<b>KS.02</b>	Memorandum of Understanding
KS.02.00	Upaya kesehatan dasar
KS.02.01	Pelayanan kedokteran keluarga
KS.02.02	Praktek klinis dokter dipelayanan kesehatan primer
KS.02.03	Pelaksanaan kesehatan primer
	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas

KS.02.04	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
KS.02.05	ICD 10, Destistry & Stomatology
KS.02.06	Infeksi menular lewat transfusi darah
KS.02.07	Penyakit mulut di tingkat primer
KS.02.08	Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah
KS.02.09	Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan
KS.02.10	Akreditasi puskesmas
KS.02.11	Puskesmas berprestasi
KS.02.12	peningkatan mutu tenaga kesehatan
KS.03	Upaya Kesehatan Rujukan
KS.03.00	Pelayanan kesehatan rujukan
KS.03.01	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)
KS.03.02	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
KS.03.03	Pelayanan pasien jaminan kesehatan
KS.03.04	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)
KS.03.05	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
KS.04	Keperawatan dan keteknisian medik
KS.04.00	Pelayanan Keperawatan Dasar
KS.04.01	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit
KS.04.02	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
KS.04.03	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
KS.04.04	Bina pelayanan kebidanan
KS.04.05	Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterampilan Fisik
KS.05	Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
KS.05.00	Perizinan dan sertifikasi
KS.05.01	Sarana dan prasarana kesehatan
KS.05.02	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
KS.05.03	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
KS.05.04	Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
KS.06	Kesehatan Jiwa
KS.06.00	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
KS.06.00	1) Pengembangan Sistem
KS.06.01	1) Pengembangan sistem jalur pendidikan formal
KS.06.01	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
KS.06.02	Etikolegal dan asesmen
KS.06.02	b) Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
KS.06.03	Pencegahan dan penanggulangan narkotika Psikotropika dan zat adiktif, rokok, dan alkohol
KS.06.04	Kesehatan jiwa kelompok beresiko
KS.07	Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra)
KS.07.00	Surveilans dan respon kejadian luar biasa (KLB)
KS.07.01	Imunisasi
KS.07.02	Kesehatan matra
KS.08	Pengendalian penyakit menular langsung
KS.08.00	Pengendalian tuberkolosis
KS.08.01	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
KS.08.02	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut
KS.08.03	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
KS.08.04	Pengendalian kusta dan frambusia
KS.09	Pengendalian penyakit bersumber binatang
KS.09.00	Pengendalian malaria
KS.09.01	Pengendalian arbovirosis
KS.09.02	Pengendalian zoonosis
KS.09.03	Pengendalian filariasis dan kecacingan

KS.09.04	Pengendalian Vektor
KS.10	Pengendalian penyakit tidak menular
KS.10.00	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
KS.10.01	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
KS.10.02	Penyakit kanker
KS.10.03	Penyakit kronis dan generatif
KS.10.04	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
KS.11	Penyehatan lingkungan
KS.11.00	Penyehatan air dan sanitasi dasar
KS.11.01	Pemukiman dan tempat umum
KS.11.02	Kawasan dan sanitasi darurat
KS.11.03	Higien sanitasi pangan
KS.11.04	Pengamanan limbah, udara, radiasi
KS.12	Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan
KS.12.00	Pengembangan teknologi laboratorium
KS.13	Sertifikasi kesehatan dan pengujian kesehatan
KS.13.00	Ship sanitation
KS.13.01	Sertifikat
KS.14	Gizi
KS.14.00	Gizi makro
KS.14.01	Gizi mikro
KS.14.02	Gizi klinik dan dietetik
KS.14.03	Konsumsi makanan dan jasa makanan
KS.14.04	Kewaspadaan gizi
KS.15	Kesehatan ibu
KS.15.00	Kesehatan ibu hamil
KS.15.01	Kesehatan ibu bersalin dan nifas
KS.15.02	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
KS.15.03	Keluarga berencana
KS.15.04	Perlindungan kesehatan reproduksi
KS.16	Kesehatan Anak
KS.16.00	Kelangsungan hidup bayi
KS.16.01	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
KS.16.02	Kewaspadaan penanganan balita beresiko
KS.16.03	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
KS.16.04	Perlindungan kesehatan anak
KS.17	Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer
KS.17.00	Kesehatan tradisional keterampilan
KS.17.01	Kesehatan tradisional ramuan
KS.17.02	Kesehatan alternatif dan komplementer
KS.17.03	Penapisan dan kemitraan
KS.18	Kesehatan kerja dan olahraga
KS.18.00	Pelayanan kesehatan kerja
KS.18.01	Kapasitas kerja
KS.18.02	Lingkungan kerja
KS.18.03	Kemitraan kesehatan kerja
KS.18.04	Kesehatan olahraga
KS.18.05	Kesehatan perkotaan
KS.19	Kefarmasian dan alat kesehatan
KS.19.00	Harga Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan, Pengelolaan, Analisis, Pemantauan)
KS.19.01	Pengadaan obat
KS.19.02	Perbekalan kesehatan
KS.20	Produksi dan distribusi alat kesehatan
KS.20.00	Alat Kesehatan
KS.20.01	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
KS.20.02	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
KS.21	Kefarmasian (Standarisasi, klinis, komunitas dan Obat Tradisional)

KS.21.00	Pelayanan kefarmasian
KS.21.01	Farmasi klinis
KS.21.02	Farmasi Komunitas
KS.21.03	Penggunaan obat rasional
KS.22	Produksi dan distribusi kefarmasian
KS.22.00	Obat tradisional
KS.22.01	Kosmetik dan makanan
KS.22.02	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
KS.22.03	Kemandirian obat dan bahan baku obat
KS.23	<b>SURAT KETERANGAN, SERTIFIKASI DAN PERLJINAN</b>
KS.23.00	Surat keterangan
KS.23.01	Sertifikasi dan perijinan
KS.24	Penanggulangan krisis kesehatan
KS.24.00	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
KS.24.01	Tanggap darurat dan pemulihan
KS.24.02	Pemantauan dan informasi
KS.24.03	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
KS.24.04	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana
KS.25	<b>PENGEMBANGAN DAN JAMINAN KESEHATAN</b>
KS.25.00	Tersedianya data NHA setiap tahun
KS.25.01	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
KS.26	<b>INTELIGENSIA KESEHATAN</b>
KS.26.00	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan
KS.26.01	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan
KS.27	<b>KESEHATAN HAJI</b>
KS.27.00	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji
KS.27.01	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji
KS.28	<b>PROMOSI KESEHATAN</b>
KS.28.00	Sarana Promosi Kesehatan
KS.28.01	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran
KS.28.02	Pengembangan pesan promosi kesehatan
KS.28.03	Hari kesehatan
KS.29	<b>KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA</b>
KS.29.00	Surat tanda registrasi (STR) dokter dan dokter gigi
KS.30	<b>DATA DAN INFORMASI</b>
KS.30.00	Statistik kesehatan
KS.30.01	Analisis dan diseminasi informasi
KS.30.02	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan
KS.31	<b>KEBLJAKAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b>
KS.31.00	Pengkajian dan pengusulan kebijakan
KS.31.01	Penyiapan kebijakan
KS.31.02	Perumusan dan penyusunan bahan
KS.31.03	Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
KS.31.04	Penetapan dalam bentuk NSPK
KS.32	<b>PENGAWASAN PRODUK TERAPETIK DAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF</b>
KS.32.00	Penilaian obat dan produk biologi
KS.32.00.00	Penilaian obat baru, obat copy dan produk biologi
KS.32.00.00.00	a. Pra registrasi
KS.32.00.00.01	Registrasi
	registrasi obat inovator termasuk dokumen terkait
	Registrasi obat copy
	Registrasi ulang

	KS.32.00.00.05	Registrasi Uji Klinik
	KS.32.00.00.06	Persetujuan registrasi
	KS.32.00.00.07	Pengembalian Nomor Ijin Edar (NIE)
KS.32.01		Evaluasi produk terapeutic penggunaan khusus
	KS.32.01.00	Standardisasi produk terapeutic dan peralatan kesehatan rumah tangga
	KS.32.01.01	Standardisasi dan pengaturan produk terapeutic dan perbekalan kesehatan rumah tangga
	KS.32.01.02	Standardisasi dan penilaian bio availabilitas/bio equaivalensi obat
KS.32.02		Bimbingan industri farmasi
	KS.32.02.00	Pengawasan produk-produk terapeutic dan perbekalan kesehatan rumah tangga
	KS.32.02.00.00	Inspeksi dan sertifikasi produksi produk terapeutic dan perbekalan kesehatan rumah tangga
	KS.32.02.00.01	Inspeksi sarana produksi terapeutic dan perbekalan kesehatan rumah tangga
	KS.32.02.01	Sertifikasi cara pembuatan obat yang baik
	KS.32.02.02	Pemantauan pelaksanaan sampling dan evaluasi hasil sampling dan pengujian Balai Besar Badan Pengawasan Obat dan Makanan).
	KS.32.02.03	Pemantauan harga obat
KS.32.03		Perijinan industri farmasi
	KS.32.03.00	Pengawasan distribusi produk terapeutic dan perbekalan kesehatan rumah tangga
	KS.32.03.00.00.00	Inspeksi dan sertifikasi produksi produk terapeutic dan perbekalan kesehatan rumah tangga
	KS.32.03.00.00.01	Laporan hasil pemeriksaan dari balai besar badan pengawasan obat dan makanan (BPOM)
	KS.32.03.00.00.02	Laporan hasil pemeriksaan sarana distribusi oleh pusat
	KS.32.03.00.01	Laporan Kasus
	KS.32.03.00.02.00	Sertifikasi sarana distribusi produk terapeutic dan perbekalan kesehatan rumah tangga)
	KS.32.03.00.02.01	Penanggulangan produk ilegal
	KS.32.03.00.02.02	Surat edaran produk ilegal
	KS.32.03.00.02.03	Laporan produk ilegal dari Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BB/BPOM) seluruh Indonesia
	KS.32.03.00.02.04	Laporan hasil pengujian produk ilegal dan PPOMN hasil lunder cover buy
	KS.32.03.00.03	Laporan penarikan produk ilegal dari Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BB/BPOM) dan PBF/idnustri farmasi
	KS.32.03.01	Laporan kasus
	KS.32.03.02	Laporan tindak lanjut hasil inspeksi
KS.32.04		Pengawasan promosi dan penandaan produk terapeutic dan perbekalan kesehatan rumah tangga
	KS.32.04.00	Surveilans dan analisis risiko produksi terapeutic dan perbekalan kesehatan rumah tangga
	KS.32.04.01	Pengawasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
	KS.32.04.02	Inspeksi narkotika, psikotropika dan prekursor (NPP)
KS.33		Pengaturan dan sertifikasi NPP
	KS.33.00	Pengawasan produk tembakau (rokok)
	KS.33.00.00	PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLIMEN
	KS.33.00.01	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik
	KS.33.00.02	Persetujuan pendaftaran baru dan variasi obat tradisional dan suplemen kesehatan
	KS.33.00.01	.Persetujuan pendaftaran ulang obat tradisional dan suplemen kesehatan
	KS.33.00.02	Notifikasi kosmetika

KS.33.00.03	Master of control document (pencatatan nomor ijin edar (NIE)
KS.33.00.04	Obat tradisional dan kosmetik bermasalah
KS.33.00.05	Survelan keamanan obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik
KS.33.00.06	Survelan keamanan obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik
KS.33.01	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
KS.33.01.00	Standardisasi obat tradisional dan suplemen makanan
KS.33.01.00.00	Peraturan pedoman dan standar
KS.33.01.00.01	Rancangan peraturan/pedoman/standarisasi termasuk hasil kajian dan rekomendasi pakar
KS.33.01.00.02	Hasil kajian/notulen/laporan
KS.33.01.00.03	Sosialisasi dan pelatihan
KS.33.01.00.04	Protokol dan dokumen uji klinik
KS.33.01.01	Standardisasi kosmetik
KS.33.01.01.00	Peraturan pedoman dan standar
KS.33.01.01.01	Rancangan peraturan/pedoman/standarisasi termasuk hasil kajian dan rekomendasi pakar
KS.33.01.01.02	Hasil kajian/notulen/laporan
KS.33.01.01.03	Sosialisasi dan pelatihan
KS.33.01.01.04	Protokol dan dokumen uji klinik
KS.33.01.02	Standardisasi sarana produk obat tradisional, kosmetik dan suplemen makanan
KS.33.01.02.00	Peraturan pedoman dan standar
KS.33.01.02.01	Rancangan peraturan/pedoman/standarisasi termasuk hasil kajian dan rekomendasi pakar
KS.33.01.02.02	Hasil kajian/notulen/laporan
KS.33.01.02.03	Sosialisasi dan pelatihan
KS.33.01.02.04	Protokol dan dokumen uji klinik
KS.33.02	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
KS.33.02.00	Inspeksi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
KS.33.02.01	Sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
KS.33.03	Obat Asli Indonesia
KS.33.03.00	Hasil pengembangan obat asli Indonesia (OAI) baik media cetak maupun media elektronik
KS.33.03.01	Kajian pengembangan obat asli Indonesia (OAI)
KS.33.03.02	Sosialisasi dan diseminasi pengembangan obat asli Indonesia (OAI)
KS.34	<b>PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA</b>
KS.34.00	Penilaian keamanan pangan
KS.34.00.00	Persetujuan pendaftaran pangan olahan
KS.34.00.01	Pencabutan pendaftaran pangan olahan
KS.34.00.02	Master of control document (pencatatan nomor ijin edar (NIE)
KS.34.00.03	Variasi pendaftaran pangan olahan
KS.34.01	Standardisasi produk pangan
KS.34.02	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan
KS.34.02.00	Laporan hasil pemeriksaan sarana produksi distribusi
KS.34.02.01	Laporan hasil pemeriksaan/pengujian produk pangan, label pangan dan iklan
KS.34.02.02	Tindak lanjut produk tidak memenuhi ketentuan (TMK)
KS.34.02.03	Kasus khusus terkait produk pangan
KS.34.02.04	Laporan hasil audit verifikasi sarana produksi
KS.34.02.05	Surat persetujuan pencantuman label halal
KS.34.02.06	Surat keterangan ekspor/impor
KS.34.02.07	Sertifikasi hygiene sanitasi



KS.34.03	Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan
KS.34.04	Pengawasan produk dan bahan berbahaya
KS.34.04.00	Standardisasi produk dan bahan berbahaya
KS.34.04.01	Pengamanan produk dan bahan berbahaya
KS.34.04.02	Penyuluhan bahan berbahaya

**KT**

<b>KT.00</b>	<b>KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI</b>
KT.00.00	Kebijakan mengenai Ketenagakerjaan
KT.00.01	Pengkajian dan pengusulan kebijakan
KT.00.02	Penyiapan Kebijakan
KT.00.03	Perumusan Kebijakan
KT.00.04	Masukan dan Dukungan Kebijakan
<b>KT.01</b>	Penetapan NSPK
KT.01.00	Perencanaan Tenaga Kerja Makro
KT.01.01	Perencanaan Tenaga Kerja Nasional
<b>KT.02</b>	Perencanaan Tenaga Kerja Daerah
KT.02.00	Perencanaan Tenaga Kerja Mikro
KT.02.01	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
<b>KT.03</b>	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
KT.03.00	Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan
KT.03.01	Pengembangan Standarisasi Kompetensi
KT.03.02	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
KT.03.03	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas
<b>KT.04</b>	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
KT.04.00	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja
KT.04.01	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
KT.04.02	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
KT.04.03	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
<b>KT.05</b>	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
KT.05.00	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
KT.05.01	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
KT.05.02	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
KT.05.03	Tenaga Pelatihan
<b>KT.06</b>	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
KT.06.00	Bina Pemagangan
KT.06.01	Pemagangan dalam Negeri
KT.06.02	Pemagangan Luar Negeri
KT.06.03	Perizinan dan Advokasi Pemagangan
<b>KT.07</b>	Promosi dan Jenjang Pemagangan
KT.07.00	Produktivitas dan Kewirausahaan
KT.07.01	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
KT.07.02	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
KT.07.03	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
<b>KT.08</b>	Pengembangan Kewirausahaan
KT.08.00	Pengembangan Pasar Kerja
KT.08.01	Informasi Pasar Kerja
KT.08.02	Analisis Pasar Kerja
KT.08.03	Bursa Kerja
<b>KT.09</b>	Analisis Jabatan
KT.09.00	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
KT.09.01	Antar Kerja
KT.09.02	Penempatan Tenaga Kerja Khusus
KT.09.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
<b>KT.10</b>	Pemberdayaan Pengantar Kerja
KT.10.00	Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
KT.10.01	Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
KT.10.02	Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
	Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

KT.10.03	Kerjasama Internasional
KT.11	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja
KT.11.00	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektor Informal
KT.11.01	Pengembangan Padat Karya
KT.11.02	Terapan Teknologi Tepat Guna
KT.11.03	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga
KT.12	Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
KT.12.00	Analisis dan Perijinan Sektor Industri
KT.12.01	Analisis dan Perizinan Sektor Jasa
KT.12.02	Pengendalian Kerjasama Kelembagaan
KT.13	Standardisasi Profesi
KT.13.00	Sistem Informasi dan Registrasi
KT.13.01	Pembakuan Akreditasi
KT.14	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi
KT.14.00	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama Bersama
KT.14.01	Perjanjian Kerja
KT.14.02	Kesejahteraan Pekerja
KT.14.03	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
KT.15	Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial
KT.15.00	Organisasi Pekerja dan Pengusaha
KT.15.01	Kelembagaan Hubungan Industrial
KT.15.02	Pemasarakatan Hubungan Industrial
KT.16	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
KT.16.00	Pengupahan
KT.16.01	Jaminan Sosial Tenaga kerja dalam Hubungan Kerja
KT.17	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial
KT.17.00	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
KT.17.01	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
KT.17.02	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
KT.18	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
KT.18.00	Pengkajian K3
KT.18.01	Bimbingan Teknis dan Evaluasi K3
KT.19	Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
KT.19.00	SDM K3
KT.19.01	Kompetensi K3
KT.20	Laporan Statistik Ketenagakerjaan
KT.20.00	Laporan Statistik Bulanan, Triwulan dan Semester
KT.20.01	Laporan Statistik Tahunan

## **KU**

	<b>KEUANGAN</b>
KU.00	<b>RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P)</b>
KU.00.00	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
KU.00.01	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
KU.00.02	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
KU.00.03	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)

<b>KU.01</b>	<b>PENYUSUNAN ANGGARAN</b>
<b>KU.01.00</b>	Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan
<b>KU.01.01</b>	Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten/Kota
<b>KU.01.02</b>	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
<b>KU.01.03</b>	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
<b>KU.02</b>	<b>PELAKSANAAN ANGGARAN</b>
<b>KU.02.00</b>	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
<b>KU.02.01</b>	Pendapatan
<b>KU.02.01.00</b>	Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Dokumen Piutang Daerah, dan Dokumen Pengelolaan Investasi.
<b>KU.02.02</b>	Belanja
<b>KU.02.03</b>	Pembiayaan Daerah
<b>KU.02.03.01.00</b>	Bukti Pengeluaran Pembiayaan
<b>KU.02.04</b>	Dokumen Penatausahaan Keuangan
<b>KU.02.05</b>	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
<b>KU.02.06</b>	Daftar Gaji
<b>KU.02.07</b>	Kartu Gaji
<b>KU.02.08</b>	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
<b>KU.02.09</b>	Laporan Keuangan Tahunan
<b>KU.03</b>	<b>BANTUAN/PINJAMAN LUAR NEGERI</b>
<b>KU.03.00</b>	Permohonan Pinjaman Luar Negeri (Blue Book)
<b>KU.03.01</b>	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book )
<b>KU.03.02</b>	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan Dokumen Sejenisnya
<b>KU.03.03</b>	Dokumen Loan Agreement (PHLN) seperti : Draft Agreement, Legal Opinion , Surat Menyurat dengan Lender
<b>KU.03.04</b>	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, a.l. : Usulan Luncuran Dana
<b>KU.03.05</b>	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut Lampirannya :
<b>KU.03.06</b>	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
<b>KU.03.07</b>	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu : Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan Data Pendukung lainnya.
<b>KU.03.08</b>	Replenishment (permintaan penarikan dana dari negara donor) meliputi antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE)
<b>KU.03.09</b>	Staff Appraisal Report
<b>KU.03.10</b>	Report /Laporan
<b>KU.03.11</b>	Laporan Hutang Daerah
<b>KU.03.12</b>	Completion Report/Annual Report
<b>KU.03.13</b>	Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Bantuan/Pinjaman Luar Negeri
<b>KU.04</b>	<b>PENGELOLAAN APBD/DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)</b>
<b>KU.04.00</b>	Keputusan Kepala Daerah
<b>KU.04.01</b>	Peraturan Daerah / Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
<b>KU.05</b>	<b>SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD)</b>
<b>KU.05.00</b>	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

KU.05.01	Dokumen Kebijakan Akuntansi
KU.05.02	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
KU.05.03	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca
KU.05.04	Bulanan/Triwulanan/Semesteran
KU.06	Laporan Realisasi APBD Periodik
	<b>PENYALURAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN</b>
	Penetapan Pimpinan Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas
KU.06.00	Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk
	Specimen Tanda Tangan
KU.06.01	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya
KU.06.02	Buku Rekening Bank
KU.06.03	Keputusan Pembukuan Rekening
KU.06.04	Pembukuan Anggaran
KU.08	<b>EVALUASI KEUANGAN DAERAH</b>
KU.09	<b>PELAKSANAAN ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAYA</b>
	<b>BANTUAN PEMILU</b>
	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung
KU.09.00	Bendahara KPUD, Bendahara pada Panitia Pilkada dan
	Pemilu
	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran
KU.09.01	Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu
	Berkas Setor Sisa Dana Pilkada/Pemilu termasuk Setor
KU.09.02	Komisi Pengadaan Barang/Jasa, Rabat, Bunga, Jasa
	Giro
	Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya
KU.09.03	Bukti Transfer Bank
	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan
KU.09.04	Operasional (PPKO) termasuk
	Perubahan/Pergeseran/Revisinya
KU.10	<b>PELAKSANAAN ANGGARAN OPERASIONAL PEMILU</b>
	Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional
KU.10.00	(PPKO) Pemilu dan PPKO Kabupaten
	termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya
	Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya
KU.10.01	Bukti Transfer Bank
	Berkas Penyaluran Biaya Pemilu ke PPK, PPS dan KPPS
KU.10.02	termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank dan lain-lain
KU.11	<b>PEMERINTAHAN DESA</b>
	Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
KU.11.00	
KU.11.01	Program Kerja Pemerintah Desa
KU.11.02	Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
KU.11.03	Bukti Pungutan Desa
KU.11.04	Dokumen Pembebasan Eks Tanah Kas Desa
KU.11.05	Dokumen Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa
KU.11.06	Dokumen Perubahan Peruntukkan Tanah Kas Desa
KU.11.07	Surat Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Pamong
KU.11.08	Lain-lain Pendapatan Asli Desa
KU.11.09	Pembukuan Kas Desa
KU.11.10	Bukti Pengeluaran Keuangan Kas Desa
KU.11.11	Laporan Keuangan Kas Desa
KU.11.12	Pertanggungjawaban Kepala Desa (Laporan Keuangan
	Tahunan Desa)
KU.12	<b>PERIMBANGAN KEUANGAN</b>
	Kebijakan
KU.12.00	
KU.12.01	<b>DANA PERIMBANGAN: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi</b>
	Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)
	<b>NON DANA PERIMBANGAN : Dana Otonomi Khusus (Dana</b>
KU.12.02	Otsus), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Keistimewaan DIY,
	Dana Desa, Dana Darurat

KU.12.03	Hibah Daerah
KU.12.04	Pembiayaan Daerah
KU.12.05	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
KU.12.06	Pelaksanaan Transfer
KU.12.07	Laporan Keuangan
KU.12.08	Pengembangan Pendanaan Daerah
KU.12.09	Data Keuangan Daerah dan Data Non Keuangan Daerah
KU.12.10	Pemantauan, Supervisi dan Evaluasi
KU.12.11	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
KU.12.12	Kajian dan Diseminasi
KU.12.13	Bahan Masukan Nota Keuangan

## **LH**

<b>LH.00</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>
LH.00.00	Kebijakan
LH.00.01	Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
LH.00.02	Penyiapan Bahan
LH.00.03	Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan
LH.00.04	Pengumpulan dan Pengolahan Data
LH.01	Penetapan dalam bentuk NSPK
LH.01.00	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
LH.01.01	Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
LH.02	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
LH.02.00	Penerapan Kebijakan
LH.02.01	Evaluasi Penerapan
LH.03	Perencanaan Lingkungan Hidup
LH.03.00	Ekonomi Lingkungan
LH.03.01	Perencanaan
LH.04	Insentif dan Pendanaan Lingkungan
LH.04.00	Dampak Lingkungan
LH.04.01	Bimtek Dampak Lingkungan
LH.04.02	Evaluasi dan Tindak Lanjut
LH.05	Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan
LH.05.00	Pemantauan dan Pengawasan
LH.05.01	Manufaktur Prasarana dan Jasa
LH.05.02	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
LH.05.03	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
LH.06	Udara Sumber Bergerak
LH.06.00	Evaluasi dan Pengembangan
LH.06.01	Manufaktur, Prasarana dan Jasa
LH.06.02	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
LH.06.03	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
LH.07	Udara Sumber Bergerak
LH.07.00	Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan
LH.07.01	Pemanfaatan
LH.07.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik
LH.07.03	Keamanan Hayati
LH.08	Pengendalian kerusakan Lahan
LH.08.00	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat
LH.08.01	Sungai
LH.08.02	Rawa
LH.09	Danau/atau kolong
LH.09.00	Pengendalian Kerusakan Pesisir dan laut
LH.09.01	Pencegahan
LH.09.02	Penanggulangan
LH.09.03	Pemulihan
LH.10	Pemulihan
LH.10.00	Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer
LH.10.01	Perangkat mitigasi

LH.10.01	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
LH.10.02	Pengendalian Bahan Perusak Ozon
LH.10.03	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
LH.11	Adaptasi Perubahan Iklim
LH.11.00	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim
LH.11.01	Kerentanan Perubahan Iklim
LH.12	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
LH.12.00	Registrasi dan Notifikasi
LH.12.01	Pemantauan
LH.12.02	Evaluasi dan Tindak Lanjut
LH.13	Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun
LH.13.00	Pengumpulan dan pemanfaatan
LH.13.01	Pengangkutan dan Pengolahan
LH.13.02	Penimbunan dan Dumping
LH.13.03	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas
LH.14	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3
LH.14.00	Pemantauan
LH.14.01	Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi
LH.15	Pengelolaan Sampah
LH.15.00	Pembatasan sampah
LH.15.01	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
LH.15.02	Pembentukan Dewan Adipura
LH.15.03	Penetapan pemenang adipura
LH.16	Hukum Administrasi Lingkungan
LH.16.00	Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
LH.16.01	Penataan hukum administrasi lingkungan
LH.17	Penyelesaian Sengketa Lingkungan
LH.17.00	Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
LH.17.01	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
LH.18	Penegakan hukum pidana lingkungan
LH.18.00	Penyidikan
LH.18.01	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut
LH.18.02	Koordinasi pembinaan penyidik PNS
LH.19	Perjanjian Internasional Lingkungan
LH.19.00	Pendapat Hukum perjanjian nasional
LH.19.01	Evaluasi Perjanjian Nasional
LH.20	Komunikasi Lingkungan
LH.20.00	Pengembangan Komunikasi
LH.20.01	Publikasi dan Kampanye
LH.21	Penguatan Inisiatif Masyarakat
LH.21.00	Komunitas Pendidikan Lingkungan
LH.21.01	Kearifan Lingkungan
LH.22	Peningkatan Peran Masyarakat
LH.22.00	Masyarakat Perkotaan
LH.22.01	Masyarakat Pedesaan
LH.23	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
LH.23.00	Organisasi Sosial Masyarakat
LH.23.01	Organisasi Profesi Dunia Usaha
LH.24	Data dan Informasi Lingkungan
LH.24.00	Pengelolaan Data
LH.24.01	Pengelolaan Informasi
LH.24.02	Pengembangan Perangkat Lunak
LH.24.03	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
LH.25	Kelembagaan Lingkungan
LH.25.00	Kelembagaan dan Tata Laksana
LH.25.01	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
LH.26	Standarisasi dan teknologi
LH.26.00	Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan

LH.26.01	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
LH.26.01	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
LH.26.02	Teknologi Ramah Lingkungan
LH.27	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan
LH.27.00	Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan
LH.27.01	Laboratorium Rujukan dan Pengujian
<b>MD</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>
<b>MD.00</b>	<b>PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN</b>
MD.00.00	Kebijakan terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
MD.00.01	Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan
MD.00.02	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
MD.00.03	Fasilitasi Permusyawaratan Desa
MD.00.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
MD.00.05	Pengembangan Kapasitas Desa
<b>MD.01</b>	<b>KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT</b>
MD.01.00	Lembaga Masyarakat
MD.01.01	Pembangunan Partisipatif
MD.01.02	Pendataan Potensi Masyarakat
MD.01.01.01	Inventarisasi Potensi Masyarakat
MD.01.01.02	Evaluasi Perkembangan Masyarakat
MD.01.03	Pengembangan Kawasan Perdesaan
MD.01.04	Pelatihan Masyarakat
<b>MD.02</b>	<b>PEMBERDAYAAN ADAT DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT</b>
MD.02.00	Budaya Nusantara
MD.02.01	Pemberdayaan Perempuan
MD.02.02	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
MD.02.03	Kesejahteraan Sosial
MD.02.04	Tenaga Kerja Perdesaan
<b>MD.03</b>	<b>USAHA EKONOMI MASYARAKAT</b>
MD.03.00	Usaha Pertanian dan Pangan
MD.03.01	Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
MD.03.02	Produksi dan Pemasaran
MD.03.03	Usaha Ekonomi dan Keluarga
MD.03.04	Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal
<b>MD.04</b>	<b>SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PEDESAAN</b>
MD.04.00	Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan
MD.04.01	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan
MD.04.02	Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan
MD.04.03	Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan
MD.04.04	Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan
<b>OK</b>	<b>ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN</b>
<b>OK.00</b>	<b>ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN</b>
OK.00.00	Kebijakan terkait Organisasi dan Ketatalaksanaan
OK.00.01	Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah
OK.00.01.00	Pembentukan
OK.00.01.01	Perubahan
OK.00.01.02	Pembubaran
OK.00.02	Uraian Jabatan dan Tata Kerja
OK.00.02.00	Tata Tetib Kantor
OK.00.02.01	Analisis Jabatan
OK.00.03	Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional
OK.00.04	Tata Laksana
OK.00.04.00	Prosedur tetap atau SOP

OK.00.04.01	Mekanisme Kerja
OK.00.04.02	Proses Bisnis
OK.00.04.03	Tata Naskah Dinas
OK.00.04.04	Pakaian Dinas
OK.00.04.05	Uraian Tata Laksana
OK.00.04.06	Standar Pelayanan
OK.00.04.07	Survei Kepuasan Masyarakat
OK.00.04.08	Inovasi Pelayanan Publik
OK.00.04.09	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik
OK.00.04.10	Forum Konsultasi Publik
OK.00.05	Evaluasi Organisasi/Tata Laksana/Pelayanan
OK.00.05.00	Evaluasi Struktur Organisasi
OK.00.05.01	Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi
OK.00.05.02	Evaluasi Uraian Jabatan
OK.00.05.03	Laporan Kinerja

#### **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

#### **PA**

##### **PA.00**

PA.00.00	KEBIJAKAN
PA.00.01	Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
PA.00.02	Penyiapan Kebijakan
PA.00.03	Perumusan Kebijakan
PA.00.04	Masukan dan Dukungan Kebijakan
PA.00.04	Penetapan NSPK

##### **PA.01**

PA.01.00	PENGARUSUTAMAAN GENDER EKONOMI, POLITIK SOSIAL DAN HUKUM
PA.01.01	Data Gender
PA.01.02	Advokasi dan Fasilitasi

##### **PA.02**

PA.02.00	PERLINDUNGAN PEREMPUAN (KEKERASAN, MASALAH SOSIAL, TENAGA KERJA, KORBAN PERDAGANGAN)
PA.02.01	Data Perlindungan Perempuan
PA.02.02	Advokasi dan Fasilitasi
PA.02.03	Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Perempuan
PA.02.04	Sistem Aplikasi dan Jaringan Informasi Gender
PA.02.05	Analisis dan Penyajian Informasi Gender

##### **PA.03**

PA.03.00	PERLINDUNGAN ANAK (HAK SIPIL, MASALAH SOSIAL, KEKERASAN TERHADAP ANAK, ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)
PA.03.01	Data Perlindungan Anak
PA.03.02	Advokasi dan Fasilitasi
PA.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Anak

##### **PA.04**

PA.04.00	Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Anak
PA.04.01	TUMBUH KEMBANG ANAK (PENDIDIKAN, KESEHATAN, PARTISIPASI, LINGKUNGAN DAN PENANAMAN NILAI-NILAI LUHUR, PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK)
PA.04.02	Data tumbuh kembang anak
PA.04.03	Advokasi dan Fasilitasi
PA.04.03	Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Tumbuh Kembang Anak

##### **PA.05**

PA.05	Penyelenggaraan Parenting Pola Pengasuhan Anak
-------	--

#### **PENANGGULANGAN BENCANA**

#### **PB**

##### **PB.00**

PB.00.01	Kebijakan Penanggulangan Bencana meliputi kebijakan dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Logistik dan Peralatan meliputi:
----------	--

PB.00.01	Pengkajian dan pengusulan kebijakan
----------	-------------------------------------



PB.00.02	Penyiapan kebijakan
PB.00.03	Perumusan dan penyusunan bahan
PB.00.04	Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
PB.00.05	Penetapan dalam bentuk NSPK
PB.01	<b>PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN</b>
PB.01.00	Pengurangan Resiko Bencana
PB.01.00.00	Pencegahan
	Pengkajian Resiko
	Pengelolaan Resiko
PB.01.00.01	Mitigasi
	Mitigasi Struktur
	Mitigasi Non Struktur
PB.01.01	Pemberdayaan Masyarakat
PB.01.01.00	Peran Lembaga Usaha
	Usaha Padat Modal
	Usaha Padat Karya
PB.01.01.01	Peran Organisasi Sosial Masyarakat
	Organisasi Internasional
	Organisasi Sosial Masyarakat Nasional
PB.01.01.02	Peran Masyarakat
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat
	Peningkatan Ketahanan Masyarakat
PB.01.02	Kesiapsiagaan
PB.01.02.00	Peringatan Dini
	Pemaduan Sistem Jaringan
	Pemantauan dan Peringatan
PB.01.02.01	Perencanaan Siaga
	Kebutuhan dan Potensi Sumber Daya
	Penerapan Rencana Strategis
PB.01.02.02	Penyiapan Sumber Daya
	Penyediaan dan Penyiapan Sumber Daya
	Pengendalian
PB.02	<b>PENANGANAN DARURAT</b>
PB.02.00	Tanggap Darurat
PB.02.00.00	Perencanaan Darurat
	Pendataan Darurat
	Perencanaan Operasi
PB.02.00.01	Pengendalian Operasi
	Pengorganisasian Pos Komando
	Sarana dan Prasarana Pos Komando
PB.02.00.02	Penyelamatan dan Evakuasi
	Penyelamatan
	Evakuasi
PB.02.01	Bantuan Darurat
PB.02.01.00	Bantuan Sandang Pangan
	Bantuan Sandang
	Bantuan Pangan
PB.02.01.01	Bantuan Kesehatan dan Air Bersih
	Bantuan Kesehatan
	Bantuan Air Bersih
PB.02.01.02	Bantuan Hunian Sementara
	Pembangunan Hunian Sementara
	Pendukung Hunian Sementara
PB.02.02	Perbaikan Darurat
PB.02.02.00	Pembersihan Lingkungan
	Penyiapan Peralatan
	Angkutan
PB.02.02.00	Perbaikan Sarana Vital
	Prasarana Sosial
	Prasarana Ekonomi
PB.02.02.00	Pemantauan dan Pelaporan

	Pemantauan
	Pelaporan
<b>PB.03</b>	<b>REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI</b>
<b>PB.03.00</b>	Penilaian Kerusakan
<b>PB.03.00.00</b>	Inventarisasi Kerusakan
	Inventarisasi Fisik
	Inventarisasi Sosial Ekonomi
<b>PB.03.00.00</b>	Estimasi Pembiayaan
	Estimasi Pembiayaan Pembangunan
	Estimasi Pembiayaan Sosial Ekonomi
<b>PB.03.01</b>	Pemulihan dan Peningkatan Fisik
<b>PB.03.01.00</b>	Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Umum
	Rehabilitasi Fasilitas Umum
	Rekonstruksi Fasilitas Umum
<b>PB.03.01.01</b>	Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Sosial
	Rehabilitasi Fasilitas Sosial
	Rekonstruksi Fasilitas Sosial
<b>PB.03.01.02</b>	Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan
	Rehabilitasi Rekonstruksi Berat
	Rehabilitasi Rekonstruksi Ringan
<b>PB.03.02</b>	Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi
<b>PB.03.02.00</b>	Pemulihan dan Peningkatan Sosial
	Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya
	Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan
<b>PB.03.02.01</b>	Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi
	Pemulihan Ekonomi
	Peningkatan Ekonomi
<b>PB.03.03</b>	Penanganan Pengungsi
<b>PB.03.03.00</b>	Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi
	Perlindungan Pengungsi
	Pemberdayaan Pengungsi
<b>PB.03.03.01</b>	Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi
	Kompensasi
	Pengembalian hak
<b>PB.03.03.02</b>	Penempatan Pengungsi
	Pemulangan dan Repatriasi
	Relokasi/Pengalihan
<b>PB.04</b>	<b>LOGISTIK DAN PERALATAN</b>
<b>PB.04.00</b>	Logistik
<b>PB.04.00.00</b>	Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan
	Analisis Kebutuhan
	Pengadaan
<b>PB.04.00.01</b>	Penyimpanan dan Distribusi
	Penyimpanan
	Distribusi
<b>PB.04.01</b>	Peralatan
<b>PB.04.01.00</b>	Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan
	Analisis Kebutuhan
	Pengadaan
<b>PB.04.01.01</b>	Penyimpanan dan Pemeliharaan
	Penyimpanan
	Pemeliharaan
<b>PB.04.01.02</b>	Pengerahan dan Distribusi
	Pengerahan
	Distribusi
<b>PD</b>	<b>BINA PEMBANGUNAN DAERAH</b>
<b>PD.00</b>	Perencanaan pembangunan Daerah/Per Wilayah
<b>PD.00.00</b>	Kebijakan terkait Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>PD.01</b>	Pengembangan Wilayah
<b>PD.01.00</b>	penyusunan pedoman penyerasian pengembangan wilayah

PD.01.01	penyusunan dan pemutakhiran basis data dan informasi pengembangan wilayah
PD.01.02	penyusunan dan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah
PD.01.03	Kawasan Strategis dan Andalan
PD.01.04	Wilayah tertinggal
PD.01.05	Wilayah pesisir laut dan pulau pulau kecil
PD.02	Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
PD.02.00	Penataan Ruang Wilayah
PD.02.00	Penataan Ruang Wilayah
PD.02.01	Penataan Ruang Kawasan
PD.02.02	Konservasi dan Rehabilitasi
PD.02.03	Perencanaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air
PD.02.04	Pengendalian Lingkungan Hidup
PD.03	Pengembangan Ekonomi Daerah
PD.03.00	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah
PD.03.01	Promosi dan investasi daerah
PD.03.02	Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah
PD.03.03	Kemitraan Usaha
PD.03.04	Kelembagaan Ekonomi Daerah
PD.04	Penataan Perkotaan
PD.04.00	Perencanaan Pengendalian Perkotaan
PD.04.01	Penataan kota besar metropolitan, Kota Menengah dan Kota Kecil
PD.04.01	Penataan kota besar metropolitan, Kota Menengah dan Kota Kecil
PD.04.02	Kerjasama Perkotaan
<b>PE</b>	<b>PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>
PE.00	Kebijakan
PE.00.00	Kebijakan Teknis Bidang Pariwisata
PE.00.01	Penyiapan Kebijakan
PE.00.02	Perumusan Kebijakan
PE.00.03	Masukan dan dukungan kebijakan
PE.00.04	Penetapan NSPK
PE.00.05	Pembinaan Kepariwisata
PE.00.06	Hasil Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan
PE.01	Pengembangan Destinasi Wisata
PE.01.00	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
PE.01.00.00	Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata)
PE.01.00.01	Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata (Perancangan Destinasi Pariwisata)
PE.01.00.02	Pengembangan Zona Kreatif
PE.01.00.03	Investasi Pariwisata
PE.01.01	Pengembangan Daya Tarik Wisata
PE.01.01.00	Bimtek Daya Tarik Wisata
PE.01.01.01	Fasilitasi Pengembangan Daya Tarik Wisata
PE.01.01.02	Pengembangan daya tarik wisata kota pusaka
PE.01.01.03	Penilaian Kelayakan Tugas Pembantuan
PE.01.01.04	Penghargaan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Cipta Award)
PE.01.02	Industri Pariwisata
PE.01.02.00	Sarana Pariwisata
PE.01.02.01	Jasa Pariwisata
PE.01.02.02	Pengembangan Produk dan Pelayanan
PE.01.02.03	Pemeliharaan
PE.01.02.04	Perawatan / Rehabilitasi
PE.01.03	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
PE.01.03.00	Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata
PE.01.03.01	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa

PE.01.03.02	Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat
PE.01.04	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event
PE.01.04.00	Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja
PE.01.04.01	Pengembangan Rekreasi dan Hiburan
PE.01.04.02	Pengembangan Wisata Alam dan Budaya
PE.01.04.03	Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif dan Event
PE.01.04.04	Pengembangan Wisata Edukasi
PE.02	Pemasaran Pariwisata
PE.02.00	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
PE.02.00.00	Informasi Pasar Dalam Negeri
PE.02.00.01	Informasi Pasar Luar Negeri
PE.02.00.02	Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widya Wisata
PE.02.00.03	Perancangan Pemasaran Pariwisata
PE.02.00.04	Penerapan Branding Pariwisata Nasional dan Penetapan Tag line Pariwisata
PE.02.01	Promosi Pariwisata Luar Negeri
PE.02.01.00	Wilayah ASEAN
PE.02.01.01	Wilayah Asia
PE.02.01.02	Wilayah Timur Tengah dan Afrika
PE.02.01.03	Wilayah Amerika dan Pasifik
PE.02.01.04	Wilayah Eropa
PE.02.02	Promosi Pariwisata Dalam Negeri
PE.02.03	Pencitraan Indonesia
PE.02.03.00	Strategi Pencitraan Indonesia
PE.02.03.01	Komunikasi Media Cetak, Media Elektronik dan Digital, dan Media Ruang
PE.02.03.02	Kerjasama dan Kemitraan
PE.02.04	Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus
PE.02.04.00	Promosi KIE Korporasi
PE.02.04.01	Promosi KIE Pemerintah dan Non Pemerintah
PE.02.04.02	Promosi Minat Khusus
PE.03	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
PE.03.00	Pengembangan industri Perfilman
PE.03.00.00	Fasilitasi Industri Perfilman
PE.03.00.01	Festival dan Eksibisi Film
PE.03.00.02	Produksi
PE.03.00.03	Pemasaran Film
PE.03.01	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
PE.03.01.00	Pengembangan Seni Pertunjukan
PE.03.01.01	Pengembangan Industri Musik
PE.03.01.02	Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik
PE.03.01.03	Infrastruktur dan Dokumentasi Seni Pertunjukan dan Industri Musik
PE.03.02	Pengembangan Seni Rupa
PE.03.02.00	Pengembangan Seni Rupa Murni, Seni Rupa Terapan, Fotografi
PE.03.02.01	Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi
PE.04	Ekonomi Kreatif Berbasi Media, Desain, dan IPTEK
PE.04.00	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
PE.04.00.00	Pengembangan Film Animasi dan Komik
PE.04.00.01	Pengembangan Tulisan Fiksi dan Non Fiksi
PE.04.00.02	Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video
PE.04.00.03	Pengembangan Karya Kreatif Periklanan
PE.04.01	Desain dan Arsitektur
PE.04.01.00	Arsitektur dan Desain Interior
PE.04.01.01	Komunikasi Visual
PE.04.01.02	Desain Produk dan Kemasan
PE.04.01.03	Mode
PE.04.02	Kerjasama dan Fasilitasi
PE.04.02.00	Lisensi Teknologi
PE.04.02.01	Sentra Kreatif

PE.04.02.01	Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis
PE.04.02.03	Akses Pembiayaan
<b>PE.05</b>	<b>Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>
PE.05.00	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataaan
PE.05.00.00	Program dan Evaluasi
PE.05.00.01	Data dan Publikasi
PE.05.01	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
PE.05.01.00	Program dan Evaluasi
PE.05.01.01	Data dan Publikasi
PE.05.02	Pengembangan SDM Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif
PE.05.02.00	Program dan Evaluasi
PE.05.02.01	Penyelenggaraan dan Kerjasama
PE.05.03	Kompetensi Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif
PE.05.03.00	Evaluasi dan Kerjasama
<b>PG</b>	<b>PENGADAAN</b>
PG. 00	<b>KEBLJAKAN</b>
PG. 00.00	Pengkajian Dan Pengusulan Kebijakan
PG. 00.01	Penyiapan Kebijakan
PG. 00.01	Penyiapan Kebijakan
PG. 00.02	Perumusan Kebijakan
PG. 00.03	Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)
PG. 00.04	Penetapan Kebijakan
PG. 00.05	MOU
PG. 01	<b>PELAKSANAAN PENGADAAN</b>
PG. 01.00	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
PG. 01.01	Pemilihan Penyedia
PG. 01.02	Penandatanganan Kontrak dan Pelaksanaan Kontrak
PG. 01.03	Swakelola
PG. 02	<b>PENGEMBANGAN STRATEGI PENGADAAN</b>
PG. 02.00	Pengembangan Strategi Pengadaan Umum
PG. 02.01	Pengembangan Strategi Pengadaan Khusus
PG. 02.02	Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
PG. 02.02.00	Pengembangan Pelaku Usaha
PG. 02.02.00.00	Laporan Kegiatan Pengembangan Pelaku Usaha
PG. 02.02.00.01	Dokumen Kajian Pengembangan Pelaku Usaha
PG. 02.02.01	Pengembangan Kesempatan Usaha
PG. 02.02.01.00	Laporan Kegiatan Pengembangan Kesempatan Usaha
PG. 02.02.01.01	Dokumen Kajian Pengembangan Kesempatan Usaha
PG. 02.02.02	Kerjasama Multilateral
PG. 02.02.03	Kerjasama Bilateral
PG. 03	<b>MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI</b>
PG. 03.00	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
PG. 03.00.00	Perencanaan Pengadaan
PG. 03.00.01	Monitoring dan Evaluasi
PG. 03.01	Pengembangan Sistem Katalog
PG. 03.01.00	Riset Dan Kontrak
PG. 03.01.01	Pengelolaan katalog
PG. 03.02	Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
PG. 04	<b>PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>
PG. 04.00	Pengembangan Pengelola Pengadaan
PG. 04.01	Pelatihan Kompetensi
PG. 04.01.00	Penyelenggaraan Diklat
PG. 04.01.00.00	Konsultasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat
PG. 04.01.00.01	Perencanaan; Peserta, Pengajar, Penjadwalan

PG. 04.01.00.02	Penyelenggaraan
PG. 04.01.00.03	Pengembangan Bahan Ajar dan Metodologi Pembelajaran.
PG. 04.01.00.04	Monitoring dan Evaluasi
PG. 04.01.00.05	Sistem Informasi
PG. 04.01.00.06	Alumni
PG. 04.01.01	Pembinaan Pengajar/ Narasumber
PG. 04.01.01.00	Seleksi dan Pengembangan
PG. 04.01.01.01	Sertifikasi
PG. 04.01.01.02	Monitoring dan Evaluasi
PG. 04.01.01.03	Sistem Informasi
PG. 04.01.02	Pembinaan Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan (LPP)
PG. 04.02	Sertifikasi Profesi
PG. 04.02.00	Sistem dan Sarana sertifikasi
PG. 04.02.00.00	Sistem sertifikasi
PG. 04.02.00.00.00	Dokumen ISO
PG. 04.02.00.00.01	Dokumen Kebijakan/ Reguler
PG. 04.02.00.01	Sarana Sertifikasi
PG. 04.02.01	Tata Kelola Dan Evaluasi Sertifikasi
PG. 05	<b>HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH</b>
PG. 05.00	Bantuan Hukum/ Konsultasi Hukum/ Advokasi Pemberian Bantuan/ Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, tata Usaha Negara dan Agama)
PG. 05.01	Penanganan Permasalahan Hukum

## **PI**

PI	<b>PERIKANAN</b>
PI.00	<b>RUMUSAN KEBIJAKAN</b> dibidang : Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Peningkatan Daya Saing
PI.00.00	Pengkajian dan pengusulan kebijakan
PI.00.01	Penyiapan bahan
PI.00.02	Perumusan kebijakan
PI.00.03	Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
PI.00.04	Penetapan kebijakan
PI.01	<b>PERIKANAN TANGKAP</b>
PI.01.00	Pengelolaan Sumber Daya Ikan
PI.01.00.00	Data dan Statistik Perikanan Tangkap
PI.01.00.01	Sumber Daya Ikan Perairan Umum
PI.01.00.02	Pengelolaan Sumber Daya Ikan Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan
PI.01.00.03	Pengelolaan Sumber Daya Ikan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Laut Lepas
PI.01.00.04	Evaluasi pengelolaan Sumber Daya Ikan
PI.01.01	Pelabuhan Perikanan
PI.01.01.00	Identifikasi, penyiapan dan pengembangan pelabuhan perikanan
PI.01.01.01	Tata Operasional Pelabuhan Perikanan
PI.01.01.02	Pembangunan Pelabuhan Perikanan
PI.01.01.03	Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan
PI.01.01.04	Sistem informasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelabuhan Perikanan
PI.01.02	Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan
PI.01.02.00	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
PI.01.02.01	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Penangkapan Ikan
PI.01.02.02	Pendaftaran Kapal Perikanan
PI.01.02.03	Pengawasan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
PI.01.02.04	Operasional dan Produktivitas Kapal Perikanan
PI.01.02.05	Pemantauan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
PI.01.03	Pengendalian dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan

PI.01.03.00	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
PI.01.03.01	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
PI.01.03.02	Verifikasi dan Analisis Dokumen Penangkapan Ikan
PI.01.03.03	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
PI.01.03.04	Pemantauan dan evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan
PI.01.03.05	Harmonisasi dan evaluasi perizinan Pusat dan Daerah
PI.01.04	Pengembangan Usaha Penangkapan
PI.01.04.00	Kelembagaan Usaha
PI.01.04.01	Investasi dan Pemodalan Usaha
PI.01.04.02	Kenelayanan
PI.01.04.03	Pembinaan pengelolaan usaha
PI.01.04.04	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
PI.02	PERIKANAN BUDIDAYA
PI.02.00	Prasarana dan Sarana Budidaya
PI.02.00.00	Lahan dan Air
PI.02.00.01	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
PI.02.00.02	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau
PI.02.00.03	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Laut
PI.02.00.04	Minapolitan budidaya
PI.02.01	Perbenihan
PI.02.01.00	Induk
PI.02.01.01	Perbenihan skala kecil
PI.02.01.02	Perbenihan skala besar
PI.02.01.03	Standarisasi dan Sertifikasi Perbenihan
PI.02.01.04	Informasi dan Distribusi Perbenihan
PI.02.02	Produksi
PI.02.02.00	Budidaya air tawar
PI.02.02.01	Budidaya air payau dan laut
PI.02.02.02	Budidaya ikan hias
PI.02.02.03	Sertifikasi
PI.02.02.04	Data dan statistik perikanan budidaya
PI.02.03	Kesehatan Ikan dan Lingkungan
PI.02.03.00	Hama dan penyakit ikan
PI.02.03.01	Perlindungan lingkungan budidaya
PI.02.03.02	Standarisasi dan kesehatan dan lingkungan
PI.02.03.03	Obat ikan, kimia, dan bahan biologi
PI.02.03.04	Pengendalian residu
PI.02.04	Usaha budidaya
PI.02.04.00	Investasi dan permodalan
PI.02.04.01	Kewirausahaan
PI.02.04.02	Pelayanan Usaha
PI.02.04.03	Kelembagaan dan ketenagakerjaan
PI.02.04.04	Informasi usaha dan promosi
PI.02.04.05	Data statistik tahunan budidaya ikan laut, payau dan air tawar
PI.03	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
PI.03.00	Pengolahan hasil
PI.03.00.00	Standarisasi
PI.03.00.01	Pengembangan poduk
PI.03.00.02	Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah
PI.03.00.03	Industri pengolahan
PI.03.00.04	Sarana dan Prasarana
PI.03.01	Pengembangan produk non konsumsi
PI.03.01.00	Standarisasi
PI.03.01.01	Promosi dan jaringan pasar ikan hias
PI.03.01.02	Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah
PI.03.01.03	Pengembangan Industri
PI.03.01.04	Sarana dan Prasarana
PI.03.02	Pemasaran dalam negeri
PI.03.02.00	Kelembagaan

PI.03.02.01	Analisis dan informasi pasar dalam negeri
PI.03.02.02	Jaringan distribusi dan kemitraan
PI.03.02.03	Promosi dan kerja sama
PI.03.02.04	Sarana dan Prasarana
PI.03.03	Pemasaran luar negeri
PI.03.03.00	Kelembagaan
PI.03.03.01	Analisis dan informasi pasar luar negeri
PI.03.03.02	Pengembangan ekspor
PI.03.03.03	Pengendalian impor
PI.03.03.04	Promosi dan kerjasama
PI.03.04	Usaha dan investasi
PI.03.04.00	Pelayanan usaha
PI.03.04.01	Kemitraan Usaha
PI.03.04.02	Ketenagakerjaan pengolahan dan pemasaran
PI.03.04.03	Investasi dan permodalan
PI.03.04.04	Informasi dan promosi
PI.04	<b>KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL</b>
PI.04.00	Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
PI.04.00.00	Rencana Tata Ruang Laut Daerah dan Perairan Yurisdiksi
PI.04.00.01	Informasi dan evaluasi spasial
PI.04.01	Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan
PI.04.01.00	Jejaring, data dan informasi konservasi
PI.04.01.01	Konservasi kawasan
PI.04.01.02	Konservasi jenis ikan
PI.04.01.03	Pemanfaatan kawasan dan jenis ikan
PI.04.02	Pesisir dan Lautan
PI.04.02.00	Mitigasi bencana lingkungan
PI.04.02.01	Pendayagunaan sumber daya kelautan
PI.04.02.03	Penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir dan laut
PI.04.02.04	Rehabilitasi dan reklamasi
PI.04.03	Pendayagunaan Pulau-Pulau Terkecil
PI.04.03.00	Identifikasi pulau-pulau terkecil
PI.04.03.01	Pengelolaan ekosistem pulau-pulau terkecil
PI.04.03.02	Investasi dan promosi pulau-pulau terkecil
PI.04.03.03	Sarana dan prasarana pulau-pulau terkecil
PI.04.04	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha
PI.04.04.00	Akses permodalan
PI.04.04.01	Akses ilmu pengetahuan dan teknologi
PI.04.04.02	Sosial budaya masyarakat
PI.04.04.03	Pengembangan usaha
PI.05	<b>PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
PI.05.00	Pengawasan Sumber Daya Perikanan
	Pengawasan pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran
	Pengawasan usaha budidaya
PI.05.01	Pengawasan sumber daya kelautan
PI.05.01.00	Pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi
PI.05.01.01	Pengawasan pencemaran perairan
PI.05.01.02	Pengawasan pesisir dan pulau-pulau terkecil
PI.05.01.03	Pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati
PI.05.02	Kapal Pengawas
	Logistik dan operasional pengawasan
	Perawatan kapal pengawas
	Pengawakan kapal pengawas
PI.05.03	Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
PI.05.03.00	Sistem pemantauan
PI.05.03.01	Pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan



PI.05.03.02	Pemantuan pemanfaatan sumber daya perikanan
PI.05.03.03	Pengembangan infrastruktur pengawasan
PI.05.04	Penanganan pelanggaran
	Penyidikan
	Penanganan barang bukti dan awak kapal
	Kerjasama penegakan hukum dan fasilitas PPNS perikanan

Pemantauan dan evaluasi

**PK**

**PK.00**

PK.00.00

PK.00.01

PK.00.02

PK.00.03

PK.00.04

**PK.01**

PK.01.00

PK.01.00.00

PK.01.00.01

PK.01.00.02

PK.01.00.03

PK.01.00.04

**PK.01.01**

PK.01.01.00

PK.01.01.00.00

PK.01.01.00.01

PK.01.01.00.02

PK.01.01.00.03

PK.01.01.00.04

PK.01.01.00.05

PK.01.01.00.06

PK.01.01.00.07

PK.01.01.01

PK.01.01.02

**PK.01.02**

PK.01.02.00

PK.01.02.01

PK.01.02.02

PK.01.02.03

PK.01.02.04

PK.01.02.04.00

PK.01.02.04.00

PK.01.02.04.01

PK.01.02.04.02

PK.01.02.05

PK.01.02.05.01

PK.01.02.05.02

PK.01.02.05.03

PK.01.02.06

**PK.01.03**

PK.01.03.00

PK.01.03.01

PK.01.03.02

**PERPUSTAKAAN**

Kebijakan Perpustakaan

Pengkajian dan pengusulan kebijakan

Penyiapan Kebijakan

Perumusan dan Penyusunan Bahan

Pemberian Masukan dan Dukungan dalam penyusunan Kebijakan

Penetapan dalam Bentuk NSPK

Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi

Deposito Bahan Pustaka

Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Pemantauan Wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam

Bibliografi dan Katalog ( Bibliografi Daerah, Katalog Induk Daerah, Katalog Dalam Terbit)

Pendaftaran Nomor ISBN

Pendaftaran Nomor ISMN

Pengembangan Koleksi

Akuisisi

Pembelian

Hibah

Hadiah

Tukar Menukar

Implementasi Undang-Undang KCKR

Terbitan Internal

Pendistribusian bahan pustaka surplus

Inventarisasi Koleksi (Buku Induk)

Pengolahan Bahan Pustaka

Pangkalan Data Katalog Koleksi

Jasa Perpustakaan dan Informasi

Keanggotaan

Sirkulasi

Referensi

Alih aksara, Alih Bahasa dan Kajian Naskah Nusantara

Kerjasama Perpustakaan

MoU

Pengembangan Situs web

Perjanjian Kerjasama

Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional

Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan

Pengembangan kemas ulang informasi multimedia

Pengembangan program aplikasi perpustakaan

Pengembangan pangkalan data perpustakaan digital

Pangkalan Data Layanan Perpustakaan

Preservasi Bahan Pustaka

Konservasi ( Perawatan Bahan Perpustakaan, Perbaikan Bahan

Perpustakaan, Penjilidan Bahan Perpustakaan)

Reprografi( Mikrofilm, Reproduksi Foto)

Transformasi Digital

PK.01.03.03	Kurasi Digital
<b>PK.02</b>	<b>Sumber Daya Perpustakaan</b>
<b>PK.02.00</b>	<b>Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca</b>
<b>PK.02.00.00</b>	<b>Pengembangan Perpustakaan( Perpustakaan Umum, Khusus, Sekolah, Perguruan Tinggi)</b>
<b>PK.02.00.01</b>	<b>Akreditasi Perpustakaan</b>
PK.02.00.01.00	Permintaan akreditasi
PK.02.00.01.01	Pemberian akreditasi
<b>PK.02.00.02</b>	<b>Pangkalan Data Perpustakaan ( Nomor Pokok Perpustakaan, Perpustakaan Berbasis Wilayah)</b>
<b>PK.02.00.03</b>	<b>Pemasyarakatan Minat Baca</b>
<b>PK.02.00.04</b>	<b>Organisasi Perpustakaan ( Forum Perpustakaan Umum, khusus, sekolah, Perguruan Tinggi, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca, Organisasi Perpustakaan lainnya)</b>
<b>PK.02.01</b>	<b>Pengembangan Pustakawan</b>
PK.02.01.00	Sertifikasi Tenaga Perpustakaan
PK.02.01.01	Pembinaan Tenaga Perpustakaan
PK.02.01.02	Penerbitan Jurnal(Master)
PK.02.01.03	Penilaian Jabatan Fungsional Perpustakaan
PK.02.01.03.00	Tim Penilaian Instansi/ Perpustakaan Nasional
PK.02.01.03.01	Tim Penilai Pusat
PK.02.01.03.02	Pangkalan data Tim Penilaian Pustakawan
PK.02.01.04	Pemasyarakatan
PK.02.01.05	Evaluasi Tenaga Perpustakaan
PK.02.01.06	Pangkalan data Tenaga Perpustakaan
<b>PM</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>
<b>PM.00</b>	<b>KEBLJAKAN</b>
PM.00.00	Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
PM.00.01	Penyiapan Kebijakan
PM.00.02	Perumusan Kebijakan
PM.00.03	Masukan dan Dukungan Kebijakan
PM.00.04	Penetapan NSPK
<b>PM.01</b>	<b>PERENCANAAN PENANAMAN MODAL</b>
PM.01.00	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
PM.01.00.00	Agribisnis (Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Peternakan)
PM.01.00.01	Energi (Terbarukan dan Tak Terbarukan)
PM.01.00.02	Sumber Daya Mineral (Logam dan Non Logam)
PM.01.01	Perencanaan Industri Manufaktur
PM.01.01.00	Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka
PM.01.01.01	Industri Kimia
PM.01.01.02	Industri Alat Transportasi dan Telematika
PM.01.02	Perencanaan Jasa dan Kawasan
PM.01.02.00	Jasa Perdagangan dan Pariwisata
PM.01.02.01	Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Jasa Lainnya
PM.01.02.02	Kawasan Ekonomi
PM.01.03	Perencanaan Infrastruktur
PM.01.03.00	Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan dan Jembatan
PM.01.03.01	Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air
PM.01.03.02	Infrastruktur Transportasi Laut, Udara dan Infrastruktur Lainnya
<b>PM.02</b>	<b>PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>
PM.02.00	Deregulasi Penanaman Modal
PM.02.00.00	Sektor Primer (Pertanian, Kelautan, Perikanan, Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan)

PM.02.00.01	Sektor Sekunder (Industri Logam, Mesin, Transportasi, Telematika, Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka)
PM.02.00.02	Sektor Tersier (Pariwisata, Perdagangan, Telekomunikasi, Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya)
PM.02.01	Pengembangan Potensi Daerah
PM.02.01.00	Sektor Primer dan Tersier
PM.02.01.01	Sektor Sekunder (Sektor Industri Logam, Mesin, Transportasi, Telematika, Sektor Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka)
PM.02.02	Pemberdayaan Usaha
PM.02.02.00	Pembinaan dan Penyuluhan
PM.02.02.01	Kemitraan Usaha
PM.02.02.02	Pelayanan Usaha
PM.03	PROMOSI PENANAMAN MODAL
PM.03.00	Pengembangan Promosi
PM.03.00.00	Analisis Strategi Promosi (Target dan Daya Saing Promosi)
PM.03.01	Promosi Sektoral
PM.03.01.00	Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan
PM.03.01.01	Promosi Industri Manufaktur (Industri Logam, Barang Logam, Mesin, Elektronik, dan Industri Manufaktur Lainnya)
PM.03.01.02	Promosi Infrastruktur (Infrastruktur Transportasi, Jalan, Jembatan, Energi, Sumber Daya Air, dan Infrastruktur Lainnya)
PM.03.02	Fasilitasi Promosi Daerah
PM.03.02.00	Wilayah Sumatera dan Kalimantan
PM.03.02.01	Wilayah Jawa dan Bali
PM.03.02.02	Wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua
PM.03.03	Pameran dan Sarana Promosi
PM.03.03.00	Pameran (Penyusunan Program dan Monitoring & Penyelenggaraan dan Evaluasi)
PM.03.03.01	Media Cetak (Materi Promosi, Publikasi dan Distribusi)
PM.03.03.02	Media Elektronik (Materi Promosi dan Pelayanan Informasi)
PM.04	KERJA SAMA PENANAMAN MODAL
PM.05	PELAYANAN PENANAMAN MODAL
PM.05.00	Pelayanan Aplikasi
PM.05.00.00	Aplikasi Sektor Primer dan Tersier
PM.05.00.01	Aplikasi Sektor Sekunder
PM.05.01	Pelayanan Perizinan
PM.05.01.00	Perizinan Sektor Primer dan Tersier
PM.05.01.01	Perizinan Sektor Sekunder
PM.05.02	Pelayanan Fasilitas
PM.05.02.00	Perizinan Sektor Primer dan Tersier
PM.05.02.01	Perizinan Sektor Sekunder
PM.06	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
PM.06.00	Pemantauan Penanaman Modal
PM.06.01	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
PM.06.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah
PM.06.03	Pengawasan Penanaman Modal
PM.06.04	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
PM.06.05	Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal
PM.07	LAPORAN STATISTIK PENANAMAN MODAL
PM.07.00	Laporan Statistik Bulanan, Triwulan, Semester
PM.07.01	Laporan Statistik Tahunan
PM.08	DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

PN.00	Kebijakan di bidang penelitian, Pengkajian, pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
PN.01	Penelitian pengkajian dan pengembangan meliputi rencana kerja, administrasi penelitian, pelaksanaan, hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi
PN.02	Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, hasil pengkajian dan pengembangan
PN.03	Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan
PN.04	Forum Komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
PN.05	Data dan Informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan tehnologi
PN.05.00	Data
PN.05.01	Statistik
PN.05.02	Jurnal Harian Penelitian/ Pengkajian
PN.05	Master procceding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan tehnologi
PN.06	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
PN.07	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
PN.08	Seminar, Lokakarya, temukarya, Workshop

## **PO**

### **KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

PO.00	Perumusan Kebijakan di bidang Kepemudaan dan Olahraga
PO.00.00	Pengkajian dan Pengusulkan Kebijakan
PO.00.01	Penyiapan Kebijakan
PO.00.02	Perumusan dan Penyusunan Bahan
PO.00.03	Pemberian MASukan dan Dukungan dalam penyusunan kebijakan
PO.00.04	Penetapan dalam Bentuk NSPK
PO.01	Pemberdayaan Pemuda
PO.01.00	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda
PO.01.00.00	Pengkajian Tenaga dan Sumber Daya Pemuda
PO.01.00.01	Tenaga Kepemudaan Formal dan Non Formal
PO.01.00.02	Tenaga Kepemudaan Layanan Khusus. Fasilitasi Layanan Khusus dalam Peningkatan kapasitas, kualitas dan kompetensi
PO.01.01	Peningkatan Wawasan Pemuda
PO.01.01.00	Wawasan Politik Pertahanan dan Keamanan
PO.01.01.01	Wawasan Lingkungan Strategis dan Pencegahan Bahaya
PO.01.01.02	Wawasan Sosial Budaya dan Hukum
PO.01.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda
PO.01.02.00	Pariwisata dan Kemaritiman
PO.01.02.01	Industri dan Kemandirian Ekonomi
PO.01.02.02	Kedaulatan Pangan Energi dan Lingkungan Hidup
PO.01.03	Peningkatan IPTEK dan IMTAK Pemuda
PO.01.03.00	Pemetaan dan Penelusuran IPTEK Fasilitasi Pemetaan dan Penelusuran IPTEK
PO.01.03.01	Pemanfaatan IPTEK Peningkatan Teknopreneur Muda Pemula
PO.01.03.02	Penghayatan dan Pengamalan IMTAK
PO.01.04	Peningkatan Kreativitas Pemuda
PO.01.04.00	Kreativitas Grafika dan Kriya
PO.01.04.01	Kreativitas Fashion dan Film
PO.01.04.02	Krreativitas Teknologi Informasi
PO.01.04.03	Kreativitas Musik dan Kuliner
PO.01.05	Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional
PO.01.05.00	Pengelolaan Sarpras Teknis Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Kepemudaan
PO.01.05.01	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Kepemudaan

PO.01.05.02	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Keolahragaan
<b>PO.02</b>	<b>Pengembangan Pemuda</b>
PO.02.00	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
PO.02.00.00	Kaderisasi dan Pendayagunaan Kepemimpinan
PO.02.00.01	Kepeloporan Tanggap Bencana dan Rawan Sosial
PO.02.00.02	Kepeloporan Desa dan Daerah Khusus
PO.02.01	Kewirausahaan Pemuda
PO.02.01.00	Penelusuran Pemetaan Potensi Kewirausahaan Pemuda
PO.02.01.01	Pendampingan dan Pengembangan Potensi
PO.02.01.02	Akses Permodalan
PO.02.02	Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
PO.02.02.00	Organisasi Kepelajaran
PO.02.02.01	Organisasi Kemahasiswaan
PO.02.02.02	Organisasi Kepemudaan
PO.02.02.03	Pembinaan Gerakan Pramuka
PO.02.03	Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda
PO.02.03.00	Standarisasi Organisasi dan Sarana Kepemudaan
PO.02.03.01	Prasarana dan Sarana Kepemudaan
PO.02.04	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
PO.02.04.00	Kemitraan Dalam Negeri
PO.02.04.01	Kemitraan Luar Negeri
PO.02.04.02	Promosi dan Penghargaan Pemuda
<b>PO.03</b>	<b>Pembudayaan Olahraga</b>
PO.03.00	Pengelolaan Olahraga Pendidikan
PO.03.00.00	Olahraga Pendidikan Dasar
PO.03.00.01	Olahraga Pendidikan Menengah
PO.03.00.02	Olahraga Pendidikan Tinggi
PO.03.01	Pengelolaan Olahraga Rekreasi
PO.03.01.00	Pembinaan Olahraga Massal dan Kesehatan Olahraga
PO.03.01.01	Pengembangan Sanggar dan Pusat Kebugaran
PO.03.01.02	Pengelolaan Olahraga
PO.03.01.03	Pengembangan Ruang Publik Olahraga
PO.03.02	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga
PO.03.02.00	Sentra dan Perkumpulan Olahraga
PO.03.02.01	Sekolah Khusus Olahraga
PO.03.02.02	Pembinaan PPLP
PO.03.02.03	Pembinaan PPLM
PO.03.03	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
PO.03.03.00	Olahraga Tradisional
PO.03.03.01	Olahraga Usia Dini, Usia Lanjut Usia dan Olahraga Khusus
PO.03.03.02	Olahraga Penyandang Cacat
PO.03.04	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
PO.03.04.00	Kemitraan Dalam dan Luar Negeri
PO.03.04.01	Bimbingan dan Pengembangan Karir Atlit
PO.03.04.02	Penghargaan Olahraga
<b>PO.04</b>	<b>Peningkatan Prestasi Olahraga</b>
PO.04.00	Pembibitan dan IPTEK Olahraga
PO.04.00.00	Pemanduan dan Pengembangan Bakat
PO.04.00.01	Kompetisi Usia Muda
PO.04.00.02	Pengembangan IPTEK Olahraga
PO.04.00.03	Pemanfaatan IPTEK Olahraga
PO.04.01	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
PO.04.01.00	Peningkatan Mutu Pelatih dan Instruktur
PO.04.01.01	Peingkatan Mutu Wasit, Juri dan Tenaga Pendukung
PO.04.01.02	Organisasi Keolahragaan
PO.04.02	Industri dan Promosi Olahraga
PO.04.02.00	Produk Barang dan Jasa Industri Olahraga
PO.04.02.01	Inventarisasi dan Manajemen Industri Olahraga

PO.04.02.02	Promosi dan Pemasaran Olahraga
PO.04.03	Olahraga Prestasi
PO.04.03.00	Olahraga Prestasi Daerah
PO.04.03.01	Olahraga Prestasi Nasional
PO.04.03.02	Olahraga Prestasi Internasional
PO.04.03.03	Pengelolaan Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional
PO.04.04	Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga
PO.04.04.00	Standarisasi Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
PO.04.04.01	Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan
PO.04.04.02	Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
PO.04.04.03	Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi
PO.04.05	Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Kesehatan Olahraga Nasional
PO.04.05.00	Kegiatan Antropometri dan Kapasitas fisik
PO.04.05.01	Biomekanik dan kebugaran jasmani
PO.04.05.02	Kesehatan Olahragawan

**PP**

PP.00	<b>PENCARIAN PERTOLONGAN</b> Kebijakan Pencarian dan Pertolongan meliputi Kebijakan di Bidang Potensi dan Operasi Pencarian dan Pertolongan
PP.00.00	Pengkajian dan Pengusukan Kebijakan
PP.00.01	Penyiapan Kebijakan
PP.00.02	Perumusan dan Penyusunan Bahan
PP.00.03	Pemberian MASukan dan Dukungan dalam penyusunan kebijakan
PP.00.04	Penetapan dalam Bentuk NSPK
PP.01	Potensi Pencarian dan Pertolongan
PP.01.00	Sarana dan Prasarana
PP.01.00.00	Rencana dan Standarisasi
PP.01.00.00.00	Perencanaan dan Analisa Kebutuhan
PP.01.00.00.01	Kajian Kebutuhan Peralatan
PP.01.00.01	Spesifikasi Rencana Peralatan yang dibutuhkan
PP.01.00.01.00	Standarisasi dan Inventarisasi
PP.01.00.01.01	Standarisasi Peralatan
PP.01.01	Daftar Inventarisasi Peralatan
PP.01.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Darat, Laut, Udara dan Peralatan Pencarian dan Pertolongan
PP.01.01	Manual Book
PP.01.01	Jadwal Pemeliharaan
PP.01.01	Laporan
PP.01.02	Pengawakan dan Perbekalan
PP.01.02.00	Pengawakan
PP.01.02.01	Perbekalan
PP.02	Bina Ketenagaan dan Pemasayarakatan
PP.02.00	Rencana Pendidikan dan Pelatihan
PP.02.00.00	Kurikulum dan Silabus
PP.02.00.01	Evaluasi dan Monitoring
PP.02.01	Penyiapan Tenaga Pencarian dan Pertolongan
PP.02.02	Pemasyarakat dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
PP.02.02.00	Pemasyarakat Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
PP.02.02.01	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
PP.03	Operasi Pencarian dan Pertolongan
PP.03.00	Operasi dan Latihan
PP.03.00	Perencanaan dan Standarisasi
PP.03.00	Perencanaan dan Evaluasi
PP.03.01	Standarisasi Operasi dan Latihan SAR
PP.03.01	Penyelenggaraan Operasi SAR
PP.03.01.00	Pengerahan Potensi SAR
PP.03.01.01	Pengendalian Operasi SAR

PP.03.01.02	Evaluasi Operasi
PP.03.02	Siaga dan Latihan
PP.03.02.00	Siaga
PP.03.02.00.00	Laporan Harian
PP.03.02.00.01	Laporan Bulanan
PP.03.02.00.02	Laporan Tahunan
PP.03.02.00.03	Evaluasi
PP.03.02.01	
PP.03.02.01.00	Lokal
PP.03.02.01.01	Nasional
PP.03.02.01.02	Internasional
PP.04	Komunikasi
PP.04.00	Rencana Pengembangan dan Standarisasi Komunikasi
PP.04.00.00	Perencanaan dan Pengembangan Sistem Komunikasi
PP.04.00.01	Standarisasi dan Evaluasi
PP.04.01	Operasi Komunikasi
PP.04.01.00	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
PP.04.01.01	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
PP.04.01.02	Registrasi BEACON
PP.04.02	Inventarisasi dan Pemeliharaan
PP.04.02.00	Inventarisasi Perangkat Komunikasi
PP.04.02.01	Pemeliharaan Peralatan Komunikasi
PP.05	Data dan Informasi
PP.05.00	Pengembangan Sistem Informasi
PP.05.00.00	Perangkat Lunak
PP.05.00.01	Perangkat Keras
PP.05.01	Pelayanan Informasi
PP.05.01.00	Penyajian dan Pelayanan Data Informasi
PP.05.01.01	Laporan dan Pembuatan Dokumentasi (Data Base)

## **PR**

### **PERUMAHAN RAKYAT**

PR.00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Strategi Perumahan Rakyat
PR.00.00	Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
PR.00.01	Penyiapan Kebijakan
PR.00.02	Perumusan kebijakan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
PR.00.03	Penetapan dalam bentuk NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)
PR.01	Penyediaan Perumahan
PR.01.00	Perencanaan Pembiayaan Perumahan
PR.01.00.00	Keterpaduan Perencanaan
PR.01.00.01	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan
PR.01.00.02	Kemitraan
PR.02	Pola Pembiayaan Perumahan
PR.02.00	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
PR.02.01	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan Mutu
PR.02.02	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
PR.02.03	Pola Investasi Perumahan
PR.03	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
PR.03.00	Sumber Pembiayaan Primer
PR.03.01	Sumber Pembiayaan Sekunder
PR.03.02	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
PR.03.03	Sistem Pembiayaan Perumahan
PR.03.04	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
PR.04	Perencanaan Penyediaan Perumahan
PR.04.00	Keterpaduan Perencanaan
PR.04.01	Analisa Teknik
PR.04.02	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
PR.04.03	Kemitraan dan Kelembagaan
PR.05	Penyediaan Rumah Susun

PR.05.00	Perencanaan Teknik
PR.05.01	Penyediaan
PR.05.02	Penghunian, Pengalihan dan Pemanfaatan
PR.05.03	Pengelolaan
PR.06	Penyediaan Rumah Khusus
PR.06.00	Perencanaan Teknik
PR.06.01	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
PR.06.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi
PR.07	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
PR.07.00	Perencanaan Teknik
PR.07.01	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni
PR.07.02	Pelaksanaan Bantuan Simultan
PR.08	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial
PR.08.00	Perencanaan Teknik
PR.08.01	Pemberian Bantuan Rumah Umum
PR.08.02	Fasilitas Hunian Berimbang
PR.08.03	Fasilitas Penyediaan Lahan Perumahan
PR.09	Pemantauan dan Evaluasi
PR.10	Inventaris Infrastruktur
PR.10.00	Pelaksanaan Kebijakan Inventaris Infrastruktur
PR.10.01	Sinkronisasi Inventaris Infrastruktur
PR.10.02	Fasilitas dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
PR.10.03	Pasar Infrastruktur
PR.11	Penyelenggaraan Jasa Kontruksi
PR.11.00	Sistem Penyelenggaraan
PR.11.01	Kontrak Kontruksi
PR.11.02	Konstruksi Berkelanjutan
PR.11.03	Manajemen Mutu
PR.12	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
PR.12.00	Kelembagaan
PR.12.01	Material dan Peralatan Konstruksi
PR.12.02	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
PR.12.03	Usaha dan Jasa Konstruksi
PR.13	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
PR.13.00	Standar dan Materi Kompetensi
PR.13.01	Penerapan Kompetensi
PR.13.02	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
PR.13.03	Pengembangan Produktivitas
PR.14	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Kontruksi
PR.14.00	Peningkatan Kerjasama
PR.14.01	Pemberdayaan Jasa Kontruksi
PR.15	Peningkatan Jasa Kontruksi
PR.15.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
PR.15.01	Pelaksanaan Pengendalian Mutu
PR.16	Koordinasi, Sinkronisasi dan Kerjasama Penerapan Teknologi Kontruksi
PR.16	Penerapan Teknologi Kontruksi
PR.16.01	Pengembangan Materi
PR.16.02	Pendayagunaan Material dan Peralatan Kontruksi
PR.17	Pemantauan dan Evaluasi
PR.18	Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Antar Sektor
PR.18.00	Antar Sektor
PR.18.01	Antar Wilayah
PR.19	Pengembangan Kawasan strategis
PR.19.00	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
PR.19.01	Pengembangan Infrastruktur antar Kawasan Strategis
PR.20	Pengembangan Kawasan Perkotaan
PR.20.00	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan
PR.20.01	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar



PR.20.02	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Perdesaan
PR.20.03	Analisa manfaat dan Skema Pembiayaan
PR.20.04	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
PR.21	Pemantauan dan Evaluasi
<b>PU</b>	<b>PERUMAHAN UMUM</b>
PU.00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Strategi Pekerjaan Umum
PU.01	Penatagunaan Sumber Daya Air
PU.01.00	Perencanaan Wilayah Sungai
PU.01.01	Pemantauan, evaluasi dan koordinasi Lembaga wadah koordinasi, pengelola sumber daya air, badan usaha, dan peran masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air
PU.01.02	Pemanfaatan Sumber Daya Air
PU.01.03	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
PU.02	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
PU.02.00	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
PU.02.01	Keterpaduan Pemrograman
PU.02.02	Evaluasi dan Manajemen Mutu
PU.02.03	Informasi dan Data Sumber Daya Air
PU.03	Pengelolaan Sumber Daya Air
PU.03.00	Pengelolaan Sungai dan Pantai
PU.03.01	Pengelolaan Irigasi dan Rawa
PU.04	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
PU.04.00	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai
PU.05	Pemantauan dan Evaluasi
PU.05.00	Pemantauan dan Evaluasi
PU.06	Pengembangan Jaringan Jalan
PU.06.00	Keterpaduan Perencanaan
PU.06.003	Lingkungan dan Keselamatan Jalan
PU.06.01	Sistem Jaringan Jalan
PU.07	Pembangunan Jalan
PU.07.00	Manajemen Konstruksi
PU.07.01	3) Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage
PU.08	Preservasi Jalan
PU.09	Pengelolaan Jembatan
PU.09.00	Perencanaan Teknis
PU.09.01	Teknik Jembatan
PU.10	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah
PU.11	Pemantauan dan Evaluasi
PU.12	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
PU.12.00	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
PU.12.01	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan
PU.13	Pengembangan Kawasan Permukiman
PU.13.00	Perencanaan Teknis
PU.13.01	Kawasan Permukiman Perkotaan
PU.13.02	Kawasan Permukiman Pedesaan
PU.13.03	Kawasan Permukiman Khusus
PU.13.04	Kelembagaan
PU.14	Pembinaan Penataan Bangunan
PU.14.00	Perencanaan Teknis
PU.14.01	Penataan Bangunan Gedung
PU.14.02	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
PU.14.03	Kelembagaan
PU.15	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
PU.15.00	Perencanaan Teknis
PU.15.01	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
PU.15.02	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan

PU.15.03	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
PU.15.04	Kelembagaan
PU.16	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
PU.16.00	Perencanaan Teknis
PU.16.01	Pengelolaan Air Limbah
PU.16.02	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
PU.16.03	Kelembagaan
<b>PW</b>	<b>PENGAWASAN</b>
PW.00	Rencana Pengawasan
PW.00.00	Kebijakan terkait Pengawasan
PW.00.01	Rencana Strategis Pengawasan
PW.00.02	Rencana Kerja Tahunan
PW.00.03	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
PW.00.04	Rakor Pengawasan Tingkat Nasional/Daerah
PW.00.05	Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)
PW.01	Pelaksanaan Pengawasan
PW.01.00	Laporan hasil monitoring dan evaluasi
PW.01.01	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Reviu (LHR), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)
PW.01.02	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Reviu (LHR), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL)
PW.01.03	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
PW.01.04	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
PW.01.05	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
PW.01.06	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
PW.01.07	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
PW.01.08	Good Corporate Governance (GCG)
PW.01.09	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)
PW.02	Pengawasan Keuangan Daerah
PW.02.00	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
PW.02.01	Tuntutan Ganti Rugi Dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Manajemen Resiko, Kapabilitas APIP, IEPK, Zona Integritas
<b>RP</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>
RP.00	Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan
RP.00.00	Kebijakan terkait Perencanaan Pembangunan
RP.00.01	Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Master Plan (RPJP)
RP.00.02	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
RP.00.03	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
RP.00.04	Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
RP.01	Rencana Kerja Tahunan
RP.01.00	Usulan unit kerja beserta data pendukung

RP.01.01	Rencana Kerja Tahunan Unit Kerja/Organisasi Perangkat Daerah
RP.01.02	Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten
RP.02	Program Kerja Tahunan
RP.02.00	Program Kerja Tahunan Unit Kerja/Organisasi Perangkat Daerah
RP.02.01	Program Kerja Tahunan Pemerintah kabupaten
RP.03	Penetapan /Kontrak Kerja
RP.03.00	Pimpinan Unit Kerja
RP.03.01	Kontrak Kerja Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Para Pimpinan SKPD, Staf Ahli, Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD, Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi lainnya.
RP.04	Laporan
RP.04.00	Laporan Berkala
RP.04.00.00	Laporan Harian
RP.04.00.01	Laporan Mingguan
RP.04.00.02	Laporan Bulanan
RP.04.00.03	Laporan Triwulan
RP.04.00.04	Laporan Semesteran
RP.04.00.05	Laporan Tahunan Unit Kerja
RP.04.00.06	Laporan Tahunan Lembaga/Instansi
RP.04.00.07	Laporan Pertanggungjawaban Bupati
RP.04.01	Laporan Insidental
RP.04.02	Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)
RP.05	Evaluasi Program
RP.05.00	Evaluasi Program Unit Kerja/Organisasi Perangkat Daerah
RP.05.01	Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten
RP.06	Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
RP.07	Konsultasi Perencanaan Pembangunan
RP.08	Pemantauan Evaluasi, Penilaian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
RP.09	Aksi Strategis Daerah
RP.09.00	Rapat Pembahasan Rancangan Awal dengan SKPD
RP.09.01	Rancangan Awal Perencanaan Aksi Strategis
RP.09.02	Sosialisasi SKPD
RP.09.03	Rencana Akhir Perencanaan Aksi Strategis
RP.09.04	Penetapan Perencanaan Aksi Strategis
RP.10	Perencanaan Pendanaan Pembangunan
RP.10.00	Pendanaan APBN
RP.10.01	Pendanaan APBD
SD	<b>PERSANDIAN</b>
SD.00	Kebijakan pembinaan dan pengendalian persandian
SD.00.00	Pengkajian dan pengusulan kebijakan
SD.00.01	Penyiapan kebijakan
SD.00.02	Perumusan Kebijakan
SD.00.03	Masukan dan dukungan kebijakan
SD.00.04	Norma Standar Prosedur Kriteria
SO.01	Kebijakan pengamanan persandian
SO.02	Pembinaan Dan Pengendalian Persandian
SO.02.00	Sumber Daya Manusia (SDM)
SO.02.01	Materiil dan jaring komunikasi sandi
SO.02.02	Akreditasi dan Sertifikasi
SO.03	Pengamanan persandian
SO.03.00	Pengamanan sinyal :teknik sandi dan kripto
SO.03.01	Analisis sinyal : teknis sandi dan kripto
SO.03.02	Materi sandi : sistem dan peralatan
SO.04	Pengkajian persandian :Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi
SO.04.00	Perencanaan Pengkajian

SO.04.01	Administrasi Pengkajian
SO.04.02	Pelaksanaan
SO.04.03	Pelaporan
SD.04.04	Otoritas Sertifikat Digital (OSD)
SD.04.05	Pelatihan/Workshop/Seminar dalam Rangka Mendukung Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan

**SO**

**SOSIAL**

**SO.00**      **KEBLJAKAN BIDANG REHABILITASI SOSIAL, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

SO.00.00	Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
SO.00.01	Penyiapan Kebijakan
SO.00.02	Perumusan Kebijakan
SO.00.03	Masukan dan Dukungan Kebijakan
SO.00.04	Penetapan NSPK

**SO.01**      **KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK**

SO.01.00	Kesejahteraan Sosial Anak Balita yang Meliputi Pengangkatan Anak, Pengasuhan Anak Balita
----------	--

SO.01.01	Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar yang Meliputi Pengasuhan Anak Dalam Keluarga, Pengasuhan Anak Dalam Lembaga
----------	---

SO.01.02	Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum yang Meliputi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum, Pengembangan Remaja
----------	--

SO.01.03	Kesejahteraan Sosial Anak Dengan Kecacatan yang Meliputi Kelembagaan dan Penguatan Keluarga, Aksesibilitas Anak Dengan Kecacatan
----------	--

SO.01.04	Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Meliputi Kelembagaan Perlindungan Anak, Advokasi dan Perlindungan Khusus
----------	--

**SO.02**      **REHABILITASI SOSIAL**

SO.02.00	Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan Tubuh dan Bekas Penderita Penyakit Kronis, Netra dan Rungu Wicara, Mental yang Meliputi Dalam Panti dan Luar Panti
----------	---

SO.02.01	Kelembagaan dan Advokasi Sosial
----------	---------------------------------

SO.02.02	Asistensi dan Pemeliharaan Kesejahteraan Sosial
----------	---

**SO.03**      **REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL**

SO.03.00	Gelandangan, Pengemis dan Pemulung
----------	------------------------------------

SO.03.01	Tuna Susila dan Korban Trafiking Perempuan
----------	--

SO.03.02	Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Meliputi Penyiapan, Reintegrasi
----------	---

SO.03.03	Pelayanan Sosial Orang Dengan HIV / AIDS dan Kelompok Minoritas
----------	---

**SO.04**      **REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA**

SO.04.00	Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA dan Pengembangan Peran Masyarakat
----------	---

SO.04.01	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Dalam Institusi dan Luar Institusi
----------	--

**SO.05**      **PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA**

SO.05.00	Pelayanan Sosial Dalam dan Luar Panti
----------	---------------------------------------

SO.05.01	Pengembangan Kelembagaan Meliputi Pembinaan Lembaga, Kerjasama Lembaga
----------	--

SO.05.02	Advokasi dan Pelayanan Sosial Kedaruratan
----------	---

**SO.06**      **PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL**

**SO.07**      **PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN PEKERJA MIGRAN**

SO.07.00	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan Meliputi Pemulihan Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi
SO.07.01	Pertindungan Sosial Pekerja Migran Meliputi Penampungan dan Pemulihan Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi
SO.07.02	Evaluasi dan Pelaporan Meliputi Kerjasama, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
SO.08	<b>PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL</b>
SO.08.00	Ketahanan Sosial Masyarakat Meliputi Keserasian Sosial, Penguatan Sumber Daya
SO.08.01	Tanggap Darurat Meliputi Bantuan Darurat, Advokasi Sosial
SO.08.02	Pemulihan Sosial Meliputi Penguatan Sosial, Reintegrasi Sosial
SO.08.03	Kerjasama Meliputi Kerjasama Pemerintah, Kerjasama Non Pemerintah
SO.09	<b>PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM</b>
SO.09.00	Kesiapsiagaan dan Mitigasi
SO.09.01	Tanggap Darurat Meliputi Bantuan Darurat, Advokasi Sosial
SO.09.02	Pemulihan Sosial dan Penguatan Sosial
SO.09.03	Kerjasama Meliputi Kerjasama Pemerintah, Kerjasama Non Pemerintah
SO.10	<b>JAMINAN SOSIAL</b>
SO.10.00	Seleksi dan Verifikasi
SO.10.01	Asuransi Kesejahteraan Sosial Meliputi Kelembagaan, Pengelolaan Premi
SO.10.02	Bantuan Langsung dan Tunjangan Berkelanjutan Meliputi Pendampingan dan Penyaluran
SO.10.03	Kerjasama Meliputi Kerjasama Pemerintah, Kerjasama Non Pemerintah
SO.11	<b>PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN KELEMBAGAAN SOSIAL</b>
SO.11.00	Ketahanan Keluarga Meliputi Bimbingan Kesejahteraan Sosial Keluarga, Konsultasi dan Advokasi Keluarga
SO.11.01	Asistensi Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan
SO.11.02	Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial
SO.11.03	Kemitraan Dunia Usaha Meliputi Kerjasama, Bimbingan Sosial
SO.11.04	Karang Taruna Meliputi Kelembagaan, Pengembangan Kapasitas
SO.12	<b>PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL</b>
SO.12.00	Persiapan Pemberdayaan Meliputi Identifikasi, Analisis
SO.12.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Meliputi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Adat Terpencil, Pemberdayaan Pendamping Sosial Komunitas Adat Terpencil
SO.12.03	Keserasian dan Penguatan Komunitas Adat Terpencil Meliputi Keserasian Sosial, Penguatan Sosial
SO.12.04	Kerjasama Kelembagaan Meliputi Kerjasama Kelembagaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
SO.13	<b>PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN</b>
SO.13.00	Identifikasi dan Analisis
SO.13.01	Pengembangan Kapasitas Meliputi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kapasitas Usaha
SO.13.02	Penataan Sosial Lingkungan Kumuh Meliputi Bimbingan Sosial, Pengembangan Lingkungan Sosial
SO.13.03	Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas Meliputi Advokasi Sosial, Pengembangan Aksesibilitas

<b>SO.14</b>	<b>KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL</b>
<b>SO.14.00</b>	Penghargaan dan Kesejahteraan Keluarga Pahlawan Meliputi Pengangkatan, Penghargaan, Kesejahteraan
<b>SO.14.01</b>	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan Meliputi Identifikasi, Pendayagunaan
<b>SO.14.02</b>	Pengembangan Kesetiakawanan Sosial Meliputi Penggalian Nilai, Pelestarian Nilai
<b>SO.14.03</b>	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional Meliputi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, Standarisasi Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional
<b>ST</b>	<b>STATISTIK</b>
<b>ST.00</b>	Perumusan Kebijakan dibidang Statistik meliputi : Metodologi dan Informasi Statistik, Statistik Sosial, Statistik Produksi, Statistik Distribusi dan Jasa, Neraca dan Analisis Statistik
<b>ST.00.00</b>	Pengkajian dan pengusulan kebijakan
<b>ST.00.01</b>	Penyiapan kebijakan
<b>ST.00.02</b>	Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
<b>ST.00.03</b>	Pengembangan desain dan standarisasi
<b>ST.00.04</b>	Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)
<b>ST.01</b>	<b>SURVEI</b>
<b>ST.01.00</b>	Perencanaan
<b>ST.01.01</b>	Persiapan
<b>ST.01.02</b>	Pengolahan
<b>ST.01.03</b>	Analisis dan Penyajian Hasil Survei
<b>ST.01.04</b>	Diseminasi hasil Survei
<b>ST.02</b>	<b>KONSOLIDASI DATA STATISTIK</b>
<b>ST.02.00</b>	Perencanaan Pengolahan Data
<b>ST.02.01</b>	Kompilasi Data
<b>ST.02.02</b>	Analisis data
<b>ST.02.03</b>	Diseminasi Data
<b>ST.02.04</b>	Penyusunan Publikasi
<b>ST.03</b>	<b>EVALUASI DAN PELAPORAN, SURVEI, DAN KONSOLIDASI DATA STATISTIK</b>
<b>SP</b>	<b>POLISI PAMONG PRAJA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>
<b>SP.00</b>	Kebijakan terkait Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat
<b>SP.01</b>	Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
<b>SP.01.01</b>	Fasilitasi,koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta moniotring dan evaluasi pelaksanaan tata operasional Polisi Pamong Praja
<b>SP.01.02</b>	Standarisasi sarana prasarana Polisi Pamong Praja
<b>SP.02</b>	<b>Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja</b>
<b>SP.02.01</b>	Fasilitasi,koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur Polisi Pamong Praja
<b>SP.02.02</b>	Fasilitasi,koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan evaluasi peningkatan kapasitas aparatur Polisi Pamong Praja
<b>SP.03</b>	<b>Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat</b>
<b>SP.03.01</b>	Perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

		Pelaksanaan sosialisasi, pengamanan, pengawalan, pengendalian operasional, koordinasi teknis operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta penegakkan produk hukum daerah.
SP.03.02		Perencanaan, pelaksanaan,pendataan dan pembinaan,
SP.03.03		koordinasi dan komunikasi pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.
SP.04		Penegakan Produk Hukum Daerah
SP.04.01		Perencanaan, penetapan rumusan, pembinaan, koordinasi pelaksanaan teknis operasional, pelaksanaan tugas operasional dan evaluasi pelaksanaan tugas Penegakkan Produk Hukum Daerah.
SP.04.02		Perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bimbingan dan Penyuluhan Penegakkan Produk Hukum Daerah
SP.04.03		Perencanaan, pelaksanaan, koordinasi evaluasi dan pelaporan
SP.04.04		pelaksanaan tugas Penegakkan Produk Hukum Daerah Perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, analisis pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
<b>TM</b>		<b>PEMERINTAHAN UMUM</b>
TM.00		Kebijakan
TM.00.00		Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
TM.00.01		Penyiapan bahan
TM.00.02		Perumusan Kebijakan
TM.00.03		Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan
TM.00.04		Penetapan berbentuk NSPK
TM.01		Dekonsentrasi dan Kerjasama
TM.01.00		Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
TM.01.01		Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan
TM.01.02		Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerasama
TM.01.03		Fasilitasi Kecamatan
TM.01.03.00		Fasilitasi
TM.01.03.01		Database Pembentukan kecamatan
TM.01.03.02		Koordinasi
TM.01.03.03		Pembinaan dan Pengawasan
TM.01.03.04		Monitoring dan Evaluasi
TM.01.04		Fasilitasi Pelayanan Umum
TM.01.04.00		Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan
TM.01.04.01		Koordinasi Pelayanan Administrasi Kecamatan
TM.01.04.02		Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Administrasi Kecamatan
TM.01.04.03		Monitoring dan Evaluasi
TM.03		Wilayah Administrasi dan Perbatasan
TM.03.00		Toponimi dan Data Wilayah
TM.03.01		Batas Antar Daerah Wilayah
TM.04		Kawasan dan Pertanahan
TM.04.00		Kawasan Sumber Daya Alam
TM.04.01		Kawasan Sumber Daya Buatan
TM.04.02		Kawasan Ekonomi,Industri dan Perdagangan Bebas

TM.04.03	Pertanahan dan Kawasan Khusus
TM.04.04	Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan
TM.05	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
TM.05.00	Identifikasi Potensi Bencana
TM.05.01	Organisasi Sistem dan Prosedur
TM.05.02	Sarana dan Prasarana
TM.05.03	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

## **TN**

<b>TN.00</b>	<b>PERTANIAH</b>
TN.00.00	Kebijakan
TN.00.01	Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
TN.00.02	Penyiapan bahan
TN.00.03	Perumusan Kebijakan
TN.00.04	Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan
TN.01	Penetapan berbentuk NSPK
TN.01.00	Perbibitan Ternak
TN.01.01	Produksi Bibit Ternak Ruminansia
TN.01.02	Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia
TN.01.03	Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak
TN.01.04	Mutu Bibit ternak
TN.01.05	Pengembangan Bibit Ternak
TN.02	Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran
TN.02.00	Pakan Ternak
TN.02.01	Bahan Pakan
TN.02.02	Pakan Hijauan
TN.02.03	Pakan Olahan
TN.02.04	Mutu Pakan
TN.03	Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran
TN.03.00	Budidaya Ternak
TN.03.01	Ternak Potong
TN.03.02	Ternak Perah
TN.03.03	Ternak Unggas dan Aneka Ternak
TN.04	Usaha dan Kelembagaan
TN.04.00	Kesehatan Hewan
TN.04.01	Pengamatan Penyakit Hewan
TN.04.02	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
TN.04.03	Perlindungan Hewan
TN.04.04	Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan
TN.05	Pengawasan Obat Hewan
TN.05.00	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen
TN.05.01	Pascapanen
TN.05.02	Higiene Sanitasi
TN.05.03	Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan
TN.05.04	Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan
TN.05.05	Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan
TN.06	Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran
TN.06.00	Tanaman Semusim
TN.06.01	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya
TN.06.02	Perbenihan
TN.06.03	Budidaya
TN.07	Pemberdayaan dan Kelembagaan
TN.07.00	Tanaman Rempah & Penyegar
TN.07.01	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya
TN.07.02	Perbenihan
TN.07.03	Budidaya
TN.08	Pemberdayaan dan Kelembagaan
TN.08.00	Tanaman Tahunan
	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya



TN.08.01	Perbenihan
TN.08.02	Budidaya
TN.08.03	Pemberdayaan dan Kelembagaan
TN.09	Perlindungan Perkebunan
TN.09.00	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim
TN.09.01	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar
TN.09.02	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan tanaman tahunan
TN.09.03	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
TN.10	Pascapanen dan Pembinaan Usaha
TN.10.00	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
TN.10.01	Pascapanen Tanaman Tahunan
TN.10.02	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
TN.10.03	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik
TN.11	Perlindungan hortikultura
TN.11.00	Perlindungan Tanaman Buah
TN.11.00.00	Teknologi Perlindungan Tanaman Buah
TN.11.00.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
TN.11.01	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
TN.11.01.00	Teknologi Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
TN.11.01.01	Pengendalian Organisme Tumbuhan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
TN.11.02	Perlindungan Tanaman Florikultura
TN.11.02.00	Teknologi Perlindungan Tanaman Florikultura
TN.11.02.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Florikultura
TN.12	Perbenihan Hortikultura
TN.12.00	Penilaian Varietas
TN.12.01	Pengawasan Mutu Benih
TN.12.02	Budidaya dan Pascapanen Florikultura
TN.13	Perluasan dan Pengelolaan Lahan
TN.13.00	Basis Data Lahan
TN.13.01	Pengendalian Lahan
TN.13.02	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
TN.13.03	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
TN.13.04	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
TN.14	Pengelolaan Air Irigasi
TN.14.00	Pengembangan Sumber Air
TN.14.01	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
TN.14.02	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
TN.14.03	Kelembagaan
TN.15	Pembiayaan Pertanian
TN.15.00	Pembiayaan Program
TN.15.00.00	Data dan Informasi pembiayaan program
TN.15.00.01	Pendampingan dan Bimbingan Teknis pembiayaan program
TN.15.01	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
TN.15.02	Pembiayaan Agribisnis
TN.15.03	Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis
TN.16	Pupuk Pestisida
TN.16.00	Pupuk Organik dan Pembenh Tanah
TN.16.01	Pupuk Anorganik
TN.16.02	Pestisida
TN.16.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
TN.17	Alat dan Mesin Pertanian
TN.17.00	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
TN.17.01	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
TN.17.02	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian

<b>TN.18</b>	<b>Perbenihan Tanaman Pangan</b>
<b>TN.18.00</b>	<b>Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih</b>
<b>TN.18.01</b>	<b>Produksi Benih Serealia</b>
<b>TN.18.02</b>	<b>Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi</b>
<b>TN.18.03</b>	<b>Kelembagaan Benih</b>
<b>TN.19</b>	<b>Budidaya Serealia</b>
<b>TN.19.00</b>	<b>Padi Irigasi dan Rawa</b>
<b>TN.19.01</b>	<b>Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering</b>
<b>TN.19.02</b>	<b>Jagung</b>
<b>TN.19.03</b>	<b>Serealia Lain</b>
<b>TN.20</b>	<b>Budidaya Aneka Kacang dan Umbi</b>
<b>TN.20.00</b>	<b>Kedelai</b>
<b>TN.20.01</b>	<b>Ubi Kayu</b>
<b>TN.20.02</b>	<b>Aneka Kacang</b>
<b>TN.20.03</b>	<b>Aneka Umbi</b>
<b>TN.21</b>	<b>Perlindungan Tanaman Pangan</b>
<b>TN.21.00</b>	<b>Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan</b>
<b>TN.21.01</b>	<b>Dampak Perubahan Iklim</b>
<b>TN.21.02</b>	<b>Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan</b>
<b>TN.21.03</b>	<b>Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu</b>
<b>TN.22</b>	<b>Pascapanen Tanaman Pangan</b>
<b>TN.22.00</b>	<b>Padi</b>
<b>TN.22.01</b>	<b>Jagung dan Serealia Lain</b>
<b>TN.22.02</b>	<b>Kedelai dan Aneka Kacang</b>
<b>TN.22.03</b>	<b>Aneka Umbi</b>
<b>TN.23</b>	<b>Pengolahan Hasil Pertanian</b>
<b>TN.23.00</b>	<b>Tanaman Pangan</b>
<b>TN.23.01</b>	<b>Hortikultura</b>
<b>TN.23.02</b>	<b>Perkebunan</b>
<b>TN.23.03</b>	<b>Peternakan</b>
<b>TN.24</b>	<b>Mutu dan Standarasi</b>
<b>TN.24.00</b>	<b>Standardisasi</b>
<b>TN.24.01</b>	<b>Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu</b>
<b>TN.24.02</b>	<b>Akreditasi dan Kelembagaan</b>
<b>TN.24.03</b>	<b>Kerjasama dan Harmonisasi</b>
<b>TN.25</b>	<b>Pengembangan Usaha dan Investasi</b>
<b>TN.25.00</b>	<b>Kemitraan dan Kewirausahaan</b>
<b>TN.25.01</b>	<b>Investasi</b>
<b>TN.25.02</b>	<b>Promosi Dalam Negeri</b>
<b>TN.25.03</b>	<b>Promosi Luar Negeri</b>
<b>TN.26</b>	<b>Pemasaran Domestik</b>
<b>TN.26.00</b>	<b>Informasi Pasar</b>
<b>TN.26.01</b>	<b>Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga</b>
<b>TN.26.02</b>	<b>Sarana dan Kelembagaan Pasar</b>
<b>TN.26.03</b>	<b>Jaringan Pemasaran</b>
<b>TN.27</b>	<b>Administrasi meliputi :</b>
<b>TN.27.00</b>	<b>Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat</b>
<b>TN.28</b>	<b>Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan</b>
<b>TN.28.00</b>	<b>Hasil Penelitian dan Pengembangan</b>
<b>TN.28.01</b>	<b>Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi</b>
<b>TN.29</b>	<b>Diseminasi</b>
<b>TN.30</b>	<b>Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian</b>
<b>TN.30.00</b>	<b>Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop</b>
<b>TN.30.01</b>	<b>Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya</b>
<b>TN.31</b>	<b>Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan</b>
<b>TN.32</b>	<b>Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan</b>
<b>TN.33</b>	<b>Data Penelitian dan Pengembangan</b>

<b>TN.34</b>	<b>Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan</b>
<b>TN.35</b>	<b>HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)</b>
<b>TN.35.00</b>	<b>Hak Cipta</b>
<b>TN.35.01</b>	<b>Hak Paten Sederhana</b>
<b>TN.35.02</b>	<b>Hak Paten Biasa</b>
<b>TN.35.03</b>	<b>Hak Merek</b>
<b>TN.35.04</b>	<b>Pendaftaran Varietas Tanaman</b>
<b>TN.35.05</b>	<b>Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan</b>
<b>TN.35.06</b>	<b>Permohonan HKI yang ditolak</b>
<b>TN.36</b>	<b>Ketersediaan dan Kerawanan Pangan</b>
<b>TN.36.00</b>	<b>Ketersediaan Pangan</b>
<b>TN.36.01</b>	<b>Akses Pangan</b>
<b>TN.36.02</b>	<b>Kerawanan Pangan</b>
<b>TN.37</b>	<b>Distribusi dan Cadangan Pangan</b>
<b>TN.37.00</b>	<b>Distribusi Pangan</b>
<b>TN.37.01</b>	<b>Harga Pangan</b>
<b>TN.37.02</b>	<b>Cadangan Pangan</b>
<b>TN.38</b>	<b>Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan</b>
<b>TN.38.00</b>	<b>Konsumsi Pangan</b>
<b>TN.38.01</b>	<b>Penganekaragaman Pangan</b>
<b>TN.38.01.00</b>	<b>Pengembangan Pangan Lokal</b>
<b>TN.38.01.01</b>	<b>Promosi Penganekaragaman Pangan</b>
<b>TN.38.01.01</b>	<b>Promosi Penganekaragaman Pangan</b>
<b>TN.38.02</b>	<b>Keamanan Pangan Segar</b>
<b>TN.38.02.00</b>	<b>Pengawasan Keamanan Pangan Segar</b>
<b>TN.38.02.01</b>	<b>Kelembagaan Keamanan Pangan Segar</b>
<b>TN.39</b>	<b>Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan</b>
<b>TN.39.00</b>	<b>Pengelolaan Lembaga Ketahanan Pangan</b>
<b>TN.39.01</b>	<b>Dewan Ketahanan Pangan</b>
<b>TN.39.02</b>	<b>SOLID</b>
<b>TN.39.03</b>	<b>Penghargaan Ketahanan Pangan</b>
<b>TN.39.04</b>	<b>Program Penyuluhan</b>
<b>TN.39.05</b>	<b>Kelembagaan Penyuluhan</b>
<b>TN.39.06</b>	<b>Kelembagaan Petani</b>
<b>TN.40</b>	<b>Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman</b>
<b>TN.40.00</b>	<b>Permohonan Perlindungan Varietas Tanam</b>
<b>TN.40.01</b>	<b>Pengujian Perlindungan Varietas Tanam</b>
<b>TN.40.02</b>	<b>Pendaftaran Varietas Sumber Daya Genetik Tanaman</b>
<b>TN.41</b>	<b>Pelayanan Perijinan Pertanian</b>
<b>TN.41.00</b>	<b>Sarana I ( bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian )</b>
<b>TN.41.01</b>	<b>Sarana II ( bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan )</b>
<b>TN.41.02</b>	<b>Sarana III ( bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak )</b>
<b>TN.42</b>	<b>Pelayanan Hukum</b>
<b>TN.42.00</b>	<b>Sertifikasi</b>
<b>TN.42.01</b>	<b>Pertimbangan Hukum</b>
<b>TN.43</b>	<b>KARANTINA PERTANIAN</b>
<b>TN.43.00</b>	<b>Karantina Tumbuhan</b>
<b>TN.43.00.00</b>	<b>Data karantina tumbuhan</b>
<b>TN.43.00.00.00</b>	<b>Data Penyakit Tumbuhan</b>
<b>TN.43.00.00.01</b>	<b>Teknik dan Metode</b>
<b>TN.43.00.00.02</b>	<b>Data Kualitatif dan Kuantitatif</b>
<b>TN.43.00.00.03</b>	<b>Data Sarana/Laboratorium/Lokasi</b>
<b>TN.43.00.00.04</b>	<b>Laporan</b>
<b>TN.43.00.01</b>	<b>Inventarisasi penyakit tumbuhan</b>
<b>TN.43.00.01.00</b>	<b>Survei</b>
<b>TN.43.00.01.01</b>	<b>Determinasi Penyakit/Daerah Pencar</b>

TN.43.00.01.02	Pengamatan Penyakit dilaboratorium
TN.43.00.02	Tindakan karantina tumbuhan
TN.43.00.03	Sertifikasi pelepasan karantina tumbuhan
TN.43.00.04	Pemberantasan penyakit tumbuhan
TN.43.01	Karantina Hewan
TN.43.01.00	Data karantina hewan
TN.43.01.00.00	Data Penyakit Hewan
TN.43.01.00.01	Teknik dan Metode
TN.43.01.00.01	Teknik dan Metode
TN.43.01.00.02	Data Kualitatif dan Kuantitatif
TN.43.01.00.03	Data Sarana/Laboratorium/Lokasi
TN.43.01.00.04	Laporan
TN.43.01.01	Inventarisasi penyakit hewan
TN.43.01.01.00	Survei
TN.43.01.01.01	Determinasi Penyakit/Daerah Pencar
TN.43.01.01.02	Pengamatan Penyakit dilaboratorium/kandang uji diagnosa
TN.43.01.02	Tindakan karantina hewan
TN.43.01.03	Sertifikasi pelepasan karantina hewan
TN.43.01.04	Pemberantasan penyakit hewan
TN.44	Inventarisasi Penyakit
TN.44.00	Inventarisasi Penyakit Hewan
TN.44.00.00	Survei
TN.44.00.01	Determinasi Penyakit/daerah pencar
TN.44.00.02	Pengamatan Penyakit di Laboratorium/kandang uji diagnosa
TN.44.01	Inventarisasi Penyakit Tumbuhan
TN.44.01.00	Survei
TN.44.01.01	Determinasi Penyakit/daerah pencar
TN.44.01.02	Pengamatan Penyakit di Laboratorium/kandang uji diagnosa
TN.45	Tindakan Karantina
TN.45.00	Tindakan Karantina Hewan
TN.45.01	Tindakan Karantina Tumbuhan
TN.46	Sertifikasi Pelepasan Karantina
TN.46.00	Sertifikasi Pelepasan Karantina Hewan
TN.46.01	Sertifikasi Pelepasan Karantina Tumbuhan
TN.47	Pemberantasan Penyakit
TN.47.00	Pemberantasan Penyakit Hewan
TN.47.01	Pemberantasan Penyakit Tumbuhan
TN.48	Keamanan Pangan
TN.48.01	Pengawasan Keamanan PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan)
TN.49	Tertib Operasional
TN.49.00	Tertib Operasional Karantina Hewan
TN.49.00.00	Penelitian Data Laporan Operasional
TN.49.00.01	Polisi Khusus/Ketertiban (PPNS)
TN.49.01	Tertib Operasional Karantina Tumbuhan
TN.49.01.00	Penelitian Data Laporan Operasional
TN.49.01.01	Polisi Khusus/Ketertiban (PPNS)
TN.50	PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN
TN.50.00	Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman
TN.50.01	Pelayanan Perijinan Pertanian
TN.50.02	Pelayanan Hukum
TN.50.02.00	Sertifikasi
TN.50.02.01	Pertimbangan Hukum
TN.51	BIMBINGAN TEKNIS

TN.52

TN.52.00

TN.52.01

EVALUASI DAN STATISTIK PERTANIAN

Evaluasi

Statistik Pertanian

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
AMRULLAH, S.H.  
NIP.19710602 200604 1 005